

Volume 11 Nomor 3 Desember 2019

ISSN 2085-2266 (Print)
ISSN 2502-5449 (Online)

sosio e-kons

Dapat diakses secara daring https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons



Dipublikasikan oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Indraprasta PGRI



SOSIO E-KONS	Volume 11	Nomor 3	Halaman: 183 - 267	Jakarta, Desember, 2019	ISSN 2085-2266 (Print) ISSN 2502-5449 (Online)
--------------	-----------	---------	-----------------------	----------------------------	---

sosio e-kons

ISSN 2502-5449 (Online)
ISSN 2085-2266 (Print)

sosio e-kons

Volume 11, No. 3, Desember 2019

Sosio e-Kons, terbit 3 kali setahun, memuat naskah hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang Sosial, Ekonomi, Sejarah dan Bimbingan dan Konseling.

Penanggung Jawab
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Penyunting
Tjipto Djuhartono

Reviewer
Sumaryoto (Universitas Indraprasta PGRI)
Dedi Purwana, E.S. (Universitas Negeri Jakarta)
Sri Hapsari (Universitas Indraprasta PGRI)
Sisca Folastri (Universitas Indraprasta PGRI)
Ahmad Kosasih (Universitas Indraprasta PGRI)
Hendro Prasetyono (Universitas Indraprasta PGRI)
Lisa Nora (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Penyunting
Ai Annisa Utami
Prasetio Ariwibowo
Itsar Bolo Rangka
Sugeng Haryono
Siti Jubei
Munzir
Syahid

Pelaksana Tata Usaha
Dwi Novrianto
Niin

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Indraprasta PGRI, Gedung Unit 3 Lt. 1
Jl. Nangka No.58C Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Telp./Fax.: (021) 78835283/7818718 Website : www.journal.lppmunindra.ac.id
Email : Sosioekons.ips@gmail.com / sosio.ekons@unindra.ac.id

Sosio e-kons diterbitkan oleh LPPM Universitas Indraprasta PGRI

Redaksi mengundang segenap penulis mengirimkan naskahnya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya oleh media atau lembaga lain. Pedoman penulisan bagi calon Penulis Sosio e-Kons terdapat pada bagian belakang jurnal ini. Naskah yang masuk akan dievaluasi oleh Mitra Bestari dan penyunting pelaksana dengan metode blind-review.

KATA PENGANTAR

Teriring doa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat, dapat melaksanakan segala aktifitas kita masing-masing. Semoga setiap langkah dan tindakan kita bernilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Pada kesempatan ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI menerbitkan Sosio e-kons Volume 11 Nomor 3 Desember 2019. Kami atas nama segenap dewan redaksi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan yang tinggi kepada seluruh kolega penulis yang telah menyumbangkan tulisan ilmiahnya di Jurnal ini.

Sosio e-Kons Terakreditasi SINTA 5 berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 21/E/KPT/2018, tanggal 9 Juli 2018 dan dapat diakses secara daring melalui http://Journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons, sementara untuk edisi cetak akan kami kirimkan kepada rekan-rekan peneliti dan pemerhati Ilmu Sosial, Ekonomi, Sejarah dan Bimbingan dan Konseling di Indonesia. Peran aktif seluruh penulis, editor dan staf pelaksana senantiasa mendukung konsistensi dari Jurnal ini. Korespondensi untuk kritik dan saran yang konstruktif dapat disampaikan melalui email kami yaitu sosioekons.ips@gmail.com./ sosio.ekons@unindra.ac.id

Sosio e-kons Volume 11 Nomor 3, Desember 2019 memuat berbagai artikel ilmiah meliputi Ilmu Sosial, Ekonomi, Sejarah dan Bimbingan Konseling. Semoga jurnal ilmiah ini memberikan kontribusi dalam diseminasi keilmuan Ilmu Sosial, Ekonomi, Sejarah dan Bimbingan Konseling sehingga memberikan manfaat teoritis bagi ilmuan dan manfaat praktis bagi kalangan akademisi. Kami berusaha untuk menjadi semakin baik dari waktu ke waktu, oleh karena itu umpan balik dari segenap pembaca sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2019

Hormat kami

Redaksi

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Penerapan Metode Discovery Learning dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis pada Siswa yang Memiliki IQ Tinggi dan Rendah dalam Mata Pelajaran Ekonomi Ilah, Rita Patonah,	183-194
The Application of Simple Accounting Format in Traditional Shop Dedeh, Dendy Syaiful Akbar, Rizka Andhika Putra,	195-203
Meningkatkan Potensi Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif bagi Anggota Koperasi melalui Program Pemberdayaan dan Peran Koperasi Syariah (Studi Penelitian di Koperasi Syariah Tangerang Selatan). Heri Nurranto, Askardiya Mirza Gayatri, Muzdalifah,	204-216
Analisis Harga Wajar Saham dengan Metode Discounted Cash Flow PT Bank Tabungan Negara, Tbk Periode 2013-2017 Redi Nurhadiman, Desy Septariani,	217-224
Analisis PDRB Provinsi Lampung dan Pengaruhnya terhadap PDB Nasional Periode 2011-2015 Robist Hidayat,	225-237
Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP 23 2018 dibandingkan dengan PP 46 2013 (Studi Kasus UMKM Binaan ZAF Internasional) Tjipto Djuhartono, Ai Annisaa Utami, Zahrudin,	238-248
Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Dampaknya pada Nilai Perusahaan Arief Nurhandika, Amir Hamzah,	249-258
Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Hanifah Azwar,	259-267

**PENERAPAN METODE DISCOVERY LEARNING DALAM
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS
PADA SISWA YANG MEMILIKI IQ TINGGI DAN RENDAH
DALAM MATA PELAJARAN EKONOMI**

Ilah dan Rita Patonah

Program Studi Pendidikan Akuntansi

Universitas Galuh Ciamis

Email: ilahmulyadi.im@gmail.com; ritadearly@gmail.com

Diterima: 14 September; Direvisi: 18 November; dipublikasikan: 9 Desember 2019

ABSTRACT

The aim of this research is to show the differences and interactions between critical thinking skills in students who have a high and low IQ with the discovery learning method. This research was conducted at Senior High School 1 in Baregbeg. The source of research data is all students of class X taking the IPS major. A factorial design was used as the research method. The study used observation, testing, and interview as data collection techniques. Data processing techniques in this study included: data identification, data analysis, normality and homogeneity test, and hypothesis testing. The results of this research is: 1) there are no significant differences in the critical thinking skills of students who have a high and low IQ on economic lessons; 2) the discovery learning method is more effective than conventional method learning to improve critical thinking skills on economic lessons; 3) there is no statistical interaction among learning method, IQ and student's critical thinking skills.

Keywords: *Discovery learning, IQ, critical thinking*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan dan interaksi antara keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki IQ tinggi dan rendah dengan metode discovery learning. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baregbeg. Sumber data penelitian adalah seluruh siswa kelas X IPS yang mengikuti proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, tes, dan wawancara. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu, identifikasi data, analisis data, uji normalitas dan homogenitas, dan uji hipotesis. Adapun hasil yang diperoleh, 1) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang memiliki IQ tinggi dengan siswa yang memiliki IQ rendah dalam keterampilan berpikir kritis pada mata pelajaran ekonomi; 2) metode discovery learning lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi; 3) tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran, IQ, dengan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi.

Kata Kunci: *Discovery learning, IQ, berpikir kritis*

PENDAHULUAN

Era globalisasi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas dalam berbagai hal. Perbaikan dalam berbagai bidang terutama pendidikan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kurikulum pendidikan terus disempurnakan untuk bisa mendapatkan lulusan yang membanggakan.

Salah satu kompetensi yang wajib dimiliki di abad XXI adalah keterampilan berpikir kritis (Abidin, 2014: 8). Berpikir kritis merupakan keterampilan yang penting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan berpikir kritis merupakan proses berpikir yang efektif dan handal, yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang relevan dan benar tentang dunia Jensen (2011: 195). Senada dengan pendapat di atas, Wijaya (2010: 72) mengatakan bahwa berpikir kritis merupakan kegiatan menganalisis gagasan ataupun ide ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan OECD melalui PISA, dan IEA melalui TIMSS serta PIRLS menggambarkan bahwa untuk bidang ilmu Matematika, IPA, dan Bahasa, hanya 5% siswa Indonesia yang dapat menjawab pertanyaan yang membutuhkan pemikiran kritis. Bagian lainnya, 95% siswa Indonesia hanya mampu di tingkat rendah, yaitu tingkat yang memiliki indikator kemampuan menjawab soal yang bersifat mengingat dan memahami. Berikut data hasil penelitian yang dilakukan PISA dari 2012 sampai 2018.

Tabel 1

Hasil Pengukuran Siswa Indonesia Berdasarkan Penelitian PISA

Tahun Studi	Peringkat Indonesia	Jumlah Negara Peserta Studi
2012	64	65
2015	69	76
2018	62	76

Sumber: <http://www.oecd.org/pisa>

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa guru belum sepenuhnya melakukan proses pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berpikir kritis. Pembelajaran hanya berfokus pada hafalan atau mengingat fakta, data, dan teori. Pembelajaran yang seharusnya melatih siswa untuk berpikir siswa belum bekerja dengan baik.

Metode pembelajaran *discovery* dilihat relevan dengan permasalahan yang diungkap. Cruickshank (2014: 17) menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran *discovery* yakni untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari tahu bagaimana pengetahuan dibangun. Artinya, metode pembelajaran *discovery* merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan atas dasar teori siswa akan lebih banyak belajar mandiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah.

Selain itu, keunggulan metode pembelajaran *discovery* dapat menumbuhkan keingintahuan siswa. Siswa bertambah motivasinya untuk terus bekerja hingga mereka menemukan solusi/jawaban. Selain itu, siswa juga mempelajari keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis secara mandiri (Slavin, 2011; Hidayat, 2017). Senada dengan di atas, Eggen dan Kauchak (2012: 201) bahwa metode *discovery* dapat efektif untuk meningkatkan motivasi siswa. Hal ini dikarenakan tingkat keterlibatan yang tinggi, jaminan keberhasilan, dan perasaan misteri adalah ciri-ciri dari metode pembelajaran *discovery*.

Usulan penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) mengetahui perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki IQ tinggi dan rendah pada pengukuran awal (*pretest*) dan akhir (*posttest*) melalui metode pembelajaran *discovery* di kelas eksperimen; (2) mengetahui

perbedaan keterampilan berpikir kritis pada siswa yang memiliki IQ tinggi dan rendah pada pengukuran akhir (*posttest*) yang menggunakan metode *discovery* di kelas eksperimen dengan yang menggunakan metode konvensional di kelas kontrol; (3) mengetahui interaksi antara penggunaan metode pembelajaran, IQ dan keterampilan berpikir kritis siswa.

Berpikir Kritis

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial dalam kehidupan. Berpikir kritis berbeda dengan kegiatan berpikir biasanya. Dewey dalam Fisher (2009 : 2) mendefinisikan berpikir kritis merupakan pertimbangan yang aktif, terus-menerus, dan teliti tentang keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dilihat dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya.

Definisi lain diutarakan oleh Sternberg dalam Kuswana (2012:165) mengungkapkan bahwa berpikir kritis adalah kegiatan yang meliputi kegiatan menganalisis, mengkritisi, memutuskan, mengevaluasi, membandingkan dan menaksir. Kegiatan ini merupakan sebuah proses terarah yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan permasalahan, pengambilan, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah.

Dengan demikian, secara umum dapat disampaikan bahwa berpikir kritis adalah proses berpikir yang aktif dan penuh dengan keterampilan dalam membuat pengertian atau konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berdasarkan hasil pemikiran, pengalaman, observasi, pertimbangan, dan komunikasi, yang akan membimbing dalam menentukan sikap dan tindakan.

Dilihat dari indikatornya, Angelo (dalam Achmad, 2007) mengidentifikasi lima indikator yang sistematis dalam berpikir kritis, yaitu keterampilan menganalisis, mensintesis, mengenal dan memecahkan masalah, menyimpulkan, dan mengevaluasi atau menilai.

Paul dan Scriven dalam Achmad (2007) menyatakan bahwa “mengukur keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan sejauh mana siswa mampu menerapkan standar intelektual dalam kegiatan berpikirnya. *Universal intellectual standards* adalah standardisasi yang harus diaplikasikan dalam berpikir yang digunakan untuk mengecek kualitas pemikiran dalam merumuskan permasalahan, isu-isu, atau situasi-situasi tertentu. Standar intelektual ini terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut: (1) *clarity*/ kejelasan, (2) *accuracy*/ keakuratan, ketelitian, keseksamaan, (3) ketepatan, (4) keterkaitan, (5) kedalaman, (6) keluasan, (7) logika”.

Metode Pembelajaran *Discovery*

Metode pembelajaran *discovery* merupakan metode yang lebih menekankan pada pengalaman – pengalaman secara langsung. Langsung di sini maksudnya siswa diajak untuk melakukan pengamatan, pengukuran, penggolongan, penjelasan, dan pengambilan kesimpulan. Ratuaman (2002:127) menjelaskan bahwa metode penemuan merupakan suatu pembelajaran yang dikembangkan dari pandangan konstruktivisme, yakni pandangan yang mengharuskan siswa untuk menyusun dan merangkai sendiri pengetahuan yang diperlukannya.

Lebih lanjut Joyce, Weil, dan Calhoun (2009:14) menjelaskan pandangan sikap konstruktivis, bahwa pengetahuan tidak hanya disampaikan oleh guru atau orang tua, siswa harus membangun dan memunculkan sendiri agar mereka dapat merespons informasi dalam lingkungan pendidikan. Dengan demikian metode penemuan pada prinsipnya siswa tidak diberi pengetahuan, akan tetapi siswa dituntut menemukan sendiri pengetahuan tersebut.

Kegiatan pembelajaran semacam ini menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk mengatur jalannya pembelajaran. Proses pembelajaran yang demikian membawa dampak positif pada pengembangan kreativitas berpikir siswa. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun (2009:199) keuntungan metode penemuan adalah

akan membantu siswa mengembangkan disiplin intelektual dan kebutuhan keterampilan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mencari jawaban dari keingintahuannya. Lebih dalam Cruickshank (2014:16) menguraikan tujuan pembelajaran penemuan, 1) untuk membantu siswa berpikir untuk dirinya sendiri, 2) untuk membantu siswa menemukan cara pengetahuan diformulasikan, 3) untuk mendorong berpikir tingkat tinggi.

Ada beberapa hal yang perlu direncanakan supaya pembelajaran penemuan berjalan sesuai harapan. Eggen dan Kauchak (2012:182) memaparkan tiga langkah penting dalam perencanaan metode pembelajaran penemuan. Pertama yakni langkah mengidentifikasi topik. Kedua, merumuskan tujuan belajar. Ketiga, menyiapkan contoh dan bukan contoh.

Setelah perencanaan disiapkan dengan baik, Eggen dan Kauchak (2012:190) menjelaskan empat fase dalam menerapkan pelajaran menggunakan metode pembelajaran penemuan. Fase-fase tersebut yakni 1) fase pendahuluan, 2) fase terbuka, 3) fase konvergen, 4) fase penutup dan penerapan. Untuk lebih detailnya terlihat seperti tabel di bawah.

Tabel 2
Fase Metode Pembelajaran Penemuan

Fase	Deskripsi
Fase 1 : Pendahuluan	Guru berusaha menarik fokus siswa dan menetapkan tujuan pelajaran.
Fase 2 : Fase Terbuka	Guru memberi siswa contoh dan meminta siswa untuk mengamati dan membandingkan contoh-contoh tersebut.
Fase 3 : Fase Konvergen	Guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik yang dirancang untuk mengarahkan siswa mencapai pemahaman tentang konsep atau generalisasi.
Fase 4 : Penutup dan Penerapan	Guru mengarahkan siswa untuk memahami definisi suatu konsep atau pernyataan generalisasi dan siswa mengaplikasikan pemahaman mereka ke dalam konteks baru.

Intelegensi

Intelegensi (IQ) adalah kemampuan yang di bawa sejak seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Stern dalam Purwanto (1990:52) mengemukakan batasan bahwa Intelegensi adalah kesiapan untuk menyesuaikan diri pada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Wechsler dalam Sukardi (2003:16) mengemukakan hal senada, yakni intelegensi merupakan kemampuan bertindak dengan menetapkan suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya secara memuaskan.

Yusuf (2004:106) mengatakan bahwa kecerdasan bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, akan tetapi fiksi ilmiah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Pendapat lain dinyatakan oleh David Wechsler dalam Parkay & Stanford, (2008:385) bahwa Intelegensi secara operasional didefinisikan sebagai “Agregat atau kapasitas umum untuk bertindak sesuai tujuan, berpikir secara rasional, serta berurusan dengan lingkungan secara afektif”.

Klasifikasi IQ berbeda untuk setiap metode test yang digunakan. Stanford-Binet mengklasifikasikan nilai IQ normal yang berkisar diantara 85 – 115. Lewis Terman mengklasifikasikan nilai IQ normal pada kisaran 90 – 109. Lebih jauh lagi, Wechsler mengklasifikasikan IQ normal pada angka 100 dengan nilai toleransi 15 (berarti 85 – 115). Dikarenakan perbedaan ini, maka selain nilai IQ yang didapat, harus diperhatikan pula metode test apa yang digunakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu metode yang menganalisis dua atau lebih variabel independen secara bersamaan. “Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengaruh variabel independen (treatment/perlakuan) terhadap variabel dependen (hasil) dalam kondisi yang terkendali” (Sugiyono, 2013:24).

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan berjumlah 40 orang peserta didik, yang terdiri dari 20 orang peserta didik kelas X IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan 20 orang peserta didik kelas X IPS 3 sebagai kelas control. Desain penelitian yang digunakan adalah desain Faktorial. Berikut Desain faktorial dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
 Metode Desain Faktorial

B	A	
	A1	A2
B1	A1B1	A2B1
B2	A1B2	A2B2

Keterangan:

- A = Metode Pembelajaran
- A1 = Penerapan Metode Discovery (Kelas eksperimen)
- A2 = Penerapan Metode Konvensional (Kelas Kontrol)
- B = IQ
- B1 = IQ tingkat tinggi
- B2 = IQ tingkat rendah
- Y = Kemampuan berpikir kritis

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik tes dan wawancara. (1) Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kualitas pembelajaran ekonomi dengan menggunakan metode pembelajaran discovery. (2) Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai hasil belajar siswa. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa dan pemahaman yang tinggi tentang mata pelajaran ekonomi. (3) teknik wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui respon siswa dalam proses pembelajaran. Adapun untuk pengolahan data penelitian ada empat tahap yang dapat dilakukan.

Tahapan tersebut yaitu (1) identifikasi data, (2) analisis data, (3) uji normalitas dan homogenitas, dan (4) uji hipotesis.

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap kegiatan.

1. Tahap persiapan, meliputi mengidentifikasi permasalahan; melakukan studi pustaka yang relevan, membuat rancangan penelitian, serta validitas dan realibilitas instrumen.
2. Tahap pelaksanaan, meliputi tes IQ siswa, *pretest*, pelaksanaan tindakan, dan *Posttest*
3. Tahap analisis data dan pelaporan, meliputi mengelompokkan dan mendeskripsikan data setiap variabel, melakukan analisis data dengan teknik statistika yang sesuai, membuat laporan, dan merealisasikan luaran penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan deskripsi hasil penelitian ini berupa data IQ siswa, nilai *pretest* dan *posttest* di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Hasil tes IQ siswa yang memiliki IQ tingkat tinggi dan memiliki IQ tingkat rendah (B2) baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
 Frekwensi IQ Siswa Tingkat Tinggi dan Tingkat Rendah
 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

IQ	Eksperimen		Kontrol	
	Frekwensi	Prosentase	Frekwensi	Prosentase
Tinggi (B1)	11	55 %	8	40%
Rendah (B2)	9	45 %	12	60%
Jumlah	20	100%	20	100%

Adapun data hasil tes keterampilan berpikir kritis sebelum dan sesudah pembelajaran, diketahui nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 5
 Nilai rata-rata *Pretest*, *Posttest* Keterampilan Berpikir Kritis Siswa
 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Deskripsi	Eksperimen		Kontrol	
	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
Nilai Rata-rata	48,68	74,74	47,11	55,79
Nilai Minimal	30	58	30	35
Nilai Maksimal	70	100	75	88
Gain	26,05		8,68	

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas standardized residual. Uji normalitas ini sebagai syarat untuk uji *Two Way Anova*. Dasar keputusan yang dipakai pada uji normalitas standardized residual dalam SPSS adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai sig. Shapiro Wilk lebih besar dari > 0,05 maka nilai residual standar berdistribusi normal.
2. Sebaliknya, jika nilai sig. Shapiro Wilk lebih kecil dari < 0,05 maka nilai residual standar tidak berdistribusi normal.

Berikut hasil uji normalitas dengan bantuan SPSS versi 17 for windows

Tabel 6

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Standardized Residual for BerpikirKritis	.116	40	.188	.967	40	.298

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diperoleh angka nilai signifikansi standardized residual sebesar 0,298. Jika dibandingkan dengan kriteria maka $Sig > 0,05$, artinya data berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas yang digunakan adalah Levene’s Test. Output Levene’s ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian dari variabel terikat adalah sama atau homogen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai Sig. lebih besar $> 0,05$ maka varian variabel keterampilan berpikir kritis siswa sama atau homogen.
2. Jika nilai Sig. lebih kecil $< 0,05$ maka varian variabel keterampilan berpikir kritis siswa tidak sama atau heterogen.

Berikut hasil perhitungan uji homogenitas hasil perhitungan SPSS.

Tabel 7
Levene's Test of Equality of Error Variances^a
 Dependent Variable: Berpikir Kritis

F	df1	df2	Sig.
.150	3	36	.929

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Metode + IQ + Metode * IQ

Berdasarkan hasil uji homogenitas di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,929, jika dibandingkan dengan kriteria di atas $Sig. > 0,05$, artinya data memiliki varian yang sama atau homogen. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke uji hipotesis Anova dua jalur (*Two Way Anova*)

Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas varian sehingga mendapatkan hasil data yang berdistribusi normal dan mendapatkan varian yang homogen dilanjutkan melakukan uji hipotesis *Two Way Anova* dengan bantuan SPSS versi 17 for windows.

Tests of Between-Subjects Effects merupakan output untuk uji hipotesis penelitian ini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji tow way anova adalah

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan variabel faktor.
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan variabel faktor. Berikut hasil penerapannya.

Tabel 8
 Tests of Between-Subjects Effects
 Dependent Variable: Berpikir Kritis

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Metode	1083.200 ^a	3	361.067	4.332	.010
Intercept	4007.887	1	4007.887	48.088	.000
Metode	1043.764	1	1043.764	12.523	.001
IQ	45.733	1	45.733	.549	.464
Metode * IQ	58.939	1	58.939	.707	.406
Error	3000.400	36	83.344		
Total	8004.000	40			
Corrected Total	4083.600	39			

a. R Squared = .265 (Adjusted R Squared = .204)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa:

1. **Hipotesis pertama**, perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki IQ tinggi dan rendah pada pengukuran awal (*pretest*) dan (*posttest*) akhir diperoleh nilai sig. sebesar 0,464. Nilai ini lebih besar > dari 0,05. Artinya **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan antara siswa yang memiliki IQ tinggi dengan siswa yang memiliki IQ rendah dalam hal keterampilan berpikir kritis.
2. **Hipotesis kedua** perbedaan keterampilan berpikir kritis pada siswa yang memiliki IQ tinggi dan rendah pada pengukuran akhir (*posttest*) antara siswa yang mendapatkan pembelajaran metode discovery dengan siswa yang mendapatkan metode pembelajaran konvensional diperoleh nilai sig sebesar 0,01. Nilai ini lebih kecil < dari 0,05. Artinya **terdapat perbedaan** keterampilan berpikir kritis siswa yang memiliki IQ tinggi dan rendah pada pengukuran akhir (*posttest*) antara siswa yang mendapatkan pembelajaran metode discovery di kelas eksperimen dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran metode konvensional di kelas kontrol. Dengan demikian bahwa metode *discovery learning* lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.
3. Hipotesis ketiga yakni interaksi antara metode pembelajaran, IQ, dengan keterampilan berpikir kritis diketahui nilai sig. sebesar 0,406. Nilai ini lebih besar > dari 0,05. Artinya **tidak terdapat interaksi** antarmetode, IQ keterampilan berpikir kritis.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penggunaan Metode *Discovery Learning*

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan bantuan SPSS versi 17 for windows yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan berpikir kritis siswa yang menggunakan metode *discovery learning* dengan keterampilan berpikir kritis siswa yang menggunakan metode konvensional. Hasil di atas sangat wajar, karena metode pembelajaran *discovery learning* dirancang supaya siswa aktif dalam proses pembelajaran dan mencoba mencari sendiri solusi dalam pemecahan masalahnya, sehingga keterampilan berpikir kritis siswa terasah. Pembelajaran *discovery* memberikan ruang, dorongan dan peluang untuk siswa dalam mempelajari berbagai keterampilan-keterampilan, menentukan kapan waktunya memberikan perlakuan, menentukan petunjuk-petunjuk apa yang tepat diberikan pada tiap siswa tertentu, menentukan cara membaca perilaku siswa pada waktu

mereka bekerja menghadapi tantangan dan cara merancang suatu situasi pembelajaran bermakna dengan memperhatikan perilaku tersebut, menentukan kapan pengamatan atau eksperimen adalah bermakna, menentukan cara bagaimana memberikan toleransi terhadap keragu-raguan, menentukan bagaimana menggunakan kesalahan-kesalahan secara konstruktif, dan menentukan bagaimana membimbing siswa sehingga memberikan mereka keleluasaan kontrol atas eksplorasi mereka tanpa guru kehilangan kontrol kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Ratuaman (2002, hlm.127) menjelaskan bahwa metode penemuan merupakan suatu pembelajaran yang dikembangkan dari pandangan konstruktivisme, yakni mengharuskan siswa untuk menyusun dan merangkai sendiri pengetahuan yang perlu dipahaminya.

Adapun proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran ekonomi di kelas eksperimen adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Langkah-langkah Pembelajaran Ekonomi dengan Metode Discovery Learning

Sintaks	Kegiatan Guru
Fase Pendahuluan Guru berusaha menarik focus perhatian siswa dan menetapkan tujuan pelajaran.	Guru menarik perhatian dengan menayangkan cuplikan tentang Bank Sentral, Sistem dan Alat Pembayaran Guru dan siswa berdiskusi hasil simakan cuplikan sebagai setimulus untuk menarik perhatian siswa Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
Fase Terbuka Guru memberikan contoh dan meminta siswa untuk mengamati dan membandingkan contoh-contoh.	Guru menyajikan situasi yang menantang dengan memberikan beberapa contoh dan bukan contoh bank sentral, system dan alat pembayaran Siswa berdiskusi mengamati dan menemukan pola bank sentral, system dan alat pembayaran
Fase Konvergen Guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik yang dirancang untuk menuntun siswa mencapai pemahaman tentang konsep atau generalisasi	Guru membimbing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung penemuan siswa. Guru bertanya tentang gagasan yang ingin disampaikan, pola bank sentral, system dan alat pembayaran dari contoh-contoh yang disajikan Guru mengecek dan memastikan siswa tahu apa yang harus dilakukan
Fase Penutup dan Penerapan Guru mengarahkan siswa untuk memahami definisi suatu konsep atau pernyataan generalisasi dan siswa menerapkan pemahaman mereka ke dalam konteks yang baru.	Guru memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil temuannya sekaligus memberi penguatan dengan membahasakan temuan siswa tentang materi bank sentral, system dan alat pembayaran Guru memberikan soal tentang aplikasi bank sentral, system dan alat pembayaran Secara berkelompok siswa menjawab pertanyaan untuk mengaplikasikan konsep bank sentral, system dan alat pembayaran

Berdasarkan Proses kegiatan pembelajaran di atas, terlihat jelas kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Untuk menjawab permasalahan, siswa aktif mencari informasi, data dan fakta. Sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator.

Langkah-langkah proses pembelajaran di atas pada prinsipnya selaras dengan apa yang diungkapkan Eggen dan Kauchak (2012, hlm.190) menjelaskan empat fase dalam menerapkan pelajaran menggunakan metodediscovery. Fase-fase tersebut yakni 1) fase pendahuluan, 2) fase terbuka, 3) fase konvergen, 4) fase penutup dan penerapan. Untuk lebih detailnya terlihat seperti tabel di bawah.

Tabel 10
Fase Metode Pembelajaran Penemuan

Fase	Deskripsi
Fase 1 : Pendahuluan	Guru berusaha menarik perhatian siswa dan menetapkan tujuan pelajaran.
Fase 2 : Fase Terbuka	Guru memberi siswa contoh dan meminta siswa untuk mengamati dan membandingkan contoh-contoh.
Fase 3 : Fase Konvergen	Guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik yang dirancang untuk membimbing siswa mencapai pemahaman tentang konsep atau generalisasi.
Fase 4 : Penutup dan Penerapan	Guru mengarahkan siswa memahami definisi suatu konsep atau pernyataan generalisasi dan siswa menerapkan pemahaman tersebut ke dalam konteks baru.

Sumber: Eggen dan Kauchak (2012, hlm. 190)



2. Pengaruh IQ dan Interaksinya

Posisi IQ memiliki peranan yang sangat penting dalam prestasi siswa. Namun IQ tinggi saja tidak cukup. Ada beberapa hal sehingga tidak terdapat interaksi secara statistik antar ketiga variabel di atas. Dilihat dari pengaruh IQ, Purwanto (2004: 55-56) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intelegensi. Adapun faktor - faktor tersebut diantaranya:

1. Pembawaan: pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir batas kesanggupan kita, yakni dapat tidaknya seseorang memecahkan suatu soal, pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita.
2. Kematangan: Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ (fisik dan psikis) dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kesiapan menjalankan fungsinya masing-masing.
3. Pembentukan: pembentukan ialah segala keadaan diluar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelegensi.
4. Minat dan pembawaan yang khas: minat mengarahkan pembuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembawaan itu. Dorongan-dorongan (motif-motif) yang melatarbelakangi manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar.
5. Kebebasan: kebebasan berarti bahwa seseorang itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Setiap orang mempunyai kebebasan memilih metode juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, seperti kita ketahui, selain IQ, kita mengenal EQ dan ESQ. ketiga kecerdasan ini penting untuk diseimbangkan. Hal lainnya, jika melihat data IQ siswa yang menjadi subjek penelitian, terlihat IQ siswa tidak terdapat rentang yang jauh antara siswa yang memiliki IQ tinggi dengan siswa yang memiliki IQ rendah. Populasi subjek banyak menyebar di tingkat IQ 111 dan 114. Tingkatan tersebut adalah yang menjadi sekat antara IQ tinggi dengan IQ rendah. Data inilah yang menyebabkan tidak terdapatnya interaksi dengan metode pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan tinggi rendahnya IQ siswa yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut terjadi karena IQ merupakan kemampuan bawaan setiap siswa yang dapat berubah setiap saat tergantung situasi dan kondisi psikologis dari siswa. Sehingga sekalipun IQ seorang siswa tinggi belum tentu siswa tersebut memiliki kemampuan berpikir kritis yang sangat tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya yaitu penggunaan metode discovery learning. Dengan demikian metode discovery learning lebih dominan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Metode Discovery Learning terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dengan IQ Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kompetensi Dasar Bank Sentral, Sistem dan Alat Pembayaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keterampilan berpikir kritis siswa yang menggunakan metode discovery learning siswa yang memiliki IQ tinggi dan rendah pada pengukuran awal (*pretest*) dan pengukuran akhir (*posttest*) tidak terdapat perbedaan.
2. Keterampilan berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan metode discovery learning lebih unggul dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis di kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan keterampilan berpikir kritis di kelas kontrol.

3. Interaksi antara Metode Pembelajaran, IQ dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa tidak ada interaksi secara statistik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Yunus. (2014). *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: Refika Aditama.
- Achmad, A. (2007). Memahami berpikir kritis [Online]. Diakses dari <http://researchengines.com/1007arief3.html>
- Cruickshank, D. R. dkk. (2014). *The act of teaching 6th ed*. Jakarta: Salemba Humanika
- Eggen & Kauchak (2012) *Strategie and Models for Teachers: Teaching Content and Thinking Skills Sixth Edition*. Boston : Pearson Education Inc.
- Fisher, A. (2009). *Berpikir kritis sebuah pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fraenkel, J., Wallen, N., Helen & Hyun. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education 8th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Hidayat, Taufik. 2017. *Model Pembelajaran Discoveri Berorientasi Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Menulis Ulasan*. *Jurnal Literasi* 1(1): 1-8.
- Jensen, Eric. 2011. *Pemelajaran Berbasis-Otak. Paradigma Pengajaran Baru*. Jakarta: PT Indeks
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). *Model of teaching eighth edition*. New Jersey USA: Pearson Education, Inc.
- Kuswana, W. S. (2012). *Taksonomi kognitif: perkembangan ragam berpikir*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Parkay, F. W., & Stanford, B. H. (2008). *Menjadi seorang guru (edisi ketujuh)*. Terjemahan D. Dharyani. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Purwanto (1990)
- PISA – OECD. (2014) *PISA Result [Online]*. Diakses dari (<http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-results.htm>)
- Ratumanan. (2002). *Model pembelajaran menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif dan efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slavin, E. (2011). *Psikologi pendidikan: teori dan praktik*. Jakarta: Indeks.
- Wijaya, Cece. 2010. *Pendidikan Remedial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, S. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

THE APPLICATION OF SIMPLE ACCOUNTING FORMAT IN TRADISIONAL SHOP

Dedeh¹⁾, Dendy Syaiful Akbar²⁾, Rizka Andhika Putra³⁾

^{1,3}Program Studi Pendidikan Akuntansi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Galuh Ciamis
Email: dedeh.akt15@gmail.com; rizkaandhikaputra@gmail.com

²Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
Email: dendysyaiful1984@gmail.com

Diterima: September 2019; Direvisi: 29 Oktober 2019; dipublikasikan: 11 Desember 2019

ABSTRACT

This study offers to determine the ability of 20 types of MSMEs to trade in the environment around the Universitas Galuh Ciamis campus. The research method used was an experimental method, in which we applied a simple accounting format to their business. The analysis technique used is a different test (t-test) through scores obtained from test results to them before and subsequently applied to a simple accounting format. The results obtained show their low skills in preparing financial statements, as evidenced by the tests before applying a simple accounting format obtained an average score of 27.80. After applying the accounting format, improvements are made to those who prepare financial statements using a simple accounting format. From the test results applied a simple accounting format, obtained an average score of 71.20. So it can be concluded from the changes that occur before and after applying a simple accounting format for MSMEs in the type of business in the environment around the Universitas Galuh Ciamis campus.

Keywords: Accounting, MSMEs, SAK.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 20 pelaku UMKM jenis usaha dagang di lingkungan sekitar kampus Universitas Galuh Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, dimana kami melakukan penerapan format akuntansi sederhana pada usaha mereka. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda (*t-test*) melalui skor yang diperoleh dari hasil tes kepada mereka sebelum dan sesudah diterapkannya format akuntansi sederhana. Hasil yang diperoleh menunjukkan rendahnya keterampilan mereka dalam menyusun laporan keuangan usahanya, terbukti dari tes sebelum diterapkan format akuntansi sederhana diperoleh skor rata-rata 27,80. Setelah diterapkan format akuntansi sederhana terjadi peningkatan keterampilan mereka dalam menyusun laporan keuangan menggunakan format akuntansi sederhana. Terbukti dari hasil tes sesudah diterapkan format akuntansi sederhana, diperoleh skor rata-rata 71,20. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan keterampilan sebelum dan sesudah diterapkan format akuntansi sederhana pada UMKM jenis usaha dagang di lingkungan sekitar kampus Universitas Galuh Ciamis.

Kata Kunci: Akuntansi, UMKM, SAK.

INTRODUCTION

MSMEs activities in Indonesia are expected to be a pillar in an effort to increase economic growth in Indonesia. MSMEs have a contribution in opening employment opportunities and increasing state income, especially in the non-oil sector. The increasing role in the creative economy based on MSMEs requires forms of innovation, both physical and non-physical (Nurranto, Kurniadi&Gayatri, 2019). Based on the Republik of Indonesia Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs, small and medium enterprises are independent economic productive businesses carried out by individuals or business entities that are not subsidiaries or branch companies that are owned, controlled or incorporated, either directly or indirectly with small businesses or results annual sales as stipulated in law.

According to the Law of the Republic of Indonesia, No 20 of 2008 concerning MSMEs referred to as MSMEs is an entity that has Criteria: 1) Net assets owned by micro-businesses, namely IDR50,000,000 in this case, not including building and land assets. As for the annual sales results of IDR300,000,000; 2) Net assets owned by small businesses, namely IDR50,000,000 to Rp500,000,000, in this case not including building and land assets. As for the annual sales results of IDR2,500,000,000.00; 3) Net assets owned by medium-sized businesses, namely IDR500,000,000 to IDR10,000,000,000 in this case not including building and land assets. As for the annual sales results of IDR2,500,000,000 up to IDR50,000,000,000.

The State Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises said that efforts to empower MSMEs from year to year are always monitored and evaluated for developments, both in terms of their contribution to the creation of GDP, employment, exports and the development of business actors as well as the existence of small and medium business investment through gross fixed capital formation. The overall macroeconomic indicators are always used as a reference in the preparation of MSMEs empowerment policies and an indicator of the success of implementing the policies that have been implemented in the previous year.

The development of MSMEs that are engaged in trade types has great potential if this can be managed and developed properly will certainly be able to realize a resilient medium business. Meanwhile, on the other hand MSMEs in the type of trading business are also still faced with problems that lie in the administrative process. The government has tried to help overcome the obstacles faced by most small and medium-sized commercial businesses, such as conducting coaching and extending credit. But a new problem arose, MSMEs in the type of trading business were required to include financial statements as a condition for applying for loans to banks. Because the banks themselves do not want to take risks in lending to MSMEs because banks do not know the development of the business (Ernawati, Asyikin, & Sari, 2016).

From these conditions, it is evident that accounting is very important for the sustainability of MSMEs. Accounting is one of the important indicators in the business world, including in the MSMEs sector. Accounting is the process of preparing and presenting financial statements, where the information contained in the financial statements is useful for the company's strategic decision making related to business financial management. Saragih&Surikayanti (2015) argues that the information allows MSMEs to identify and predict problem areas that may arise, then take corrective actions in a timely manner. Meanwhile, Astuti (2010) expressed the opinion that one of the benefits, if MSMEs compile financial reports, is to be one of the ingredients in decision making.

In fact, MSMEs in Indonesia currently operate without relying on financial information that is prepared systematically and structured. Such a condition causes the information generated from the financial statements to be inadequate and not in accordance with the actual situation (Akbar &Dedeh, 2017; Badria& Diana, 2018). Most MSMEs in Indonesia still think that preparing financial reports is a luxury and there is no benefit, so MSMEs do not know

exactly how much income is received, what operating costs are incurred and how much is left (Savitri&Saifudin , 2018; Akbar &Dedeh, 2017; Salmiah, Nanda, &Adino, 2018).

Based on the results of an initial survey of MSMEs, the types of trading businesses around the UniversitasGaluhCiamis campus also do not have systematic financial accounting. They only did a makeshift financial record using ordinary notebooks. The notebook only contains notes on the list of accounts receivable only. The impact is traders can not know the number of profits obtained each period. Other problems they do not apply one of the accounting principles, namely the principle of the entity. The principle of entity requires the separation of business finances from the personal finances of the owner. Their conditions do not separate business finance from personal finance, so business development cannot be known with certainty.

Currently, there are accounting standards that are suitable for small businesses, namely the StandarAkuntansikeuangan (SAK) EntitasMikro, Kecil danMenengah (EMKM). SAK EMKM is structured to be able to encourage and facilitate MSME financial reporting needs. Many studies have proven that some MSMEs have not implemented the StandarAkuntansiKeuanganEntitasTanpaAkuntabilitasPublik (SAK ETAP) appropriately, because the SAK is still considered too complex and not in accordance with the needs of MSMEs actors, the research recommends the preparation of simpler financial statements (Akbar et al., 2019). So that the IkatanAkuntan Indonesia (IAI) issued SAK EMKM which is expected that its reporting framework can assist entities in making the transition from cash-based reporting to accrual-basis reporting (IAI, 2016 in Badria& Diana, 2018).

Financial management at MSMEs in Indonesia is still alarming, as evidenced by several research results showing that MSMEs actors still do not consider it necessary to prepare their business financial statements. The results of research conducted by Saragih&Surikayanti (2015) show that the financial statements prepared by MSMEs in Medan Perjuangan are only limited to income statements, and even then they are incomplete. Meanwhile, research conducted by Wilujeng (2013) shows that MSMEs in Surabaya do not yet have adequate financial reports and are not aware of any relevant accounting standards applied to MSMEs. In line with the results of the study, research conducted by Azaria (2013) shows that the financial statements made by MSMEs in Unggulandi in Blitar Regency are still very simple with incomplete financial information.

Based on the results of some of the previous studies, the writer will develop the previous research by experimenting with the application of a simple accounting format to the MSMEs of the types of trading businesses around the UniversitasGaluhCiamis campus. The simple accounting format that was made previously refers to the relevant accounting standards applied to the MSMEs (SAK EMKM) type of trading business. The contribution in this research lies in the application of a simple accounting format that has been made by researchers and then will be tested for changes in knowledge and skills that occur in these small traders before and after the application of a simple accounting format.

METHOD

The research method used in this study is an experimental method, wherein this study is to apply a simple accounting format for 20 MSMEs of types of trading businesses around the campus of UniversitasGaluhCiamis. The type of data collected is primary data and secondary data. Primary data obtained from the source directly with interview techniques to determine the conditions before and after the application of a simple accounting format. While secondary data were collected by observation techniques to determine the condition of the financial accounting of businesses before and after applying a simple accounting format. Meanwhile, the simple

accounting format that will be applied is an accounting format that has been previously designed by applying accounting standards for MSMEs and adjusted to the character of the type of trading business.

Data analysis techniques in this study used a different test (t-test) to determine the changes that occurred before and after applying a simple accounting format in the MSMEs in question. To support this different test, it is carried out by providing a test of understanding and skills carried out before and after the application of simple accounting. The test material provided is the practice of applying a simple accounting format.

RESULT AND DISCUSSION

The first step in this research was to dial the test before the application of a simple accounting format to 20 MSMEs of trading businesses around the UniversitasGaluhCiamis campus. The test material given is the skill in applying a simple accounting format. Table 1 shows a description of the overall test results before applying a simple accounting format:

Table 1 Descriptive Statistics of Test_1 Result

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Test_1	20	10.00	41.00	27.8000	9.31665
Valid N (listwise)	20				

Source: Data Processing Using SPSS

In the table, it can be seen the score generated on the first test, with a minimum score of 10.00, a maximum score of 41.00, and an average score of 27.80. The acquisition score shows that the skills in preparing financial statements in accordance with the accounting principles of 20 MSMEs types of trading businesses around the UniversitasGaluhCiamis campus are still low. Based on the information obtained from them, the low skill in preparing financial statements is due to the low educational background, as well as their low knowledge of the importance of accounting in the business world.

In general, the types of MSMEs in the business environment around the campus of UniversitasGaluhCiamis have not been able to make business performance reports and financial reports in accordance with generally accepted accounting standards. This happens because they are not accustomed to recording and compiling financial statements as a description of business activities and financial position of the company. Most of them only record the amount of money received and the amount of money spent, the number of goods bought and sold, and the number of receivables or debts. But the recording is only a reminder and not the format desired by the banks as a condition for credit applications.

The impact of unstructured and systematic bookkeeping in accordance with accounting rules is that the net profit or loss of operating results cannot be known. In addition, with traditional bookkeeping, it is difficult for them to access capital from banks, because one of the conditions for applying for credit is the existence of good bookkeeping for the banking analysis process. In addition, access to capital assistance from the government is also required for good business financial accounting, with the aim that the business is sustainable.

The second stage is to implement a simple accounting format for 20 MSMEs of business types in the campus environment of UniversitasGaluhCiamis. At this stage, training is carried out in one of the classrooms in the Accounting Education Study Program at UniversitasGaluhCiamis. Participants were given the training to prepare financial reports using a simple accounting format. During the training, the participants were very enthusiastic, as evidenced by their communicative activities. After being given training, direct implementation

of a simple accounting format is carried out in their businesses. A simple accounting format is extended for their daily use in running their business. The accounting format provided is the printed version because their ability to operate computers is still low. Following are the simple accounting format materials that are applied:

1. Cash Book

This cash book is made to record income and expenditure transactions for cash. Cash income comes from cash sales of merchandise transactions, in addition to cash income comes from creditors' payments related to credit sales transactions. Spending on cash occurs from purchases of merchandise in cash for inventory needs, in addition to spending on cash also occurs when companies make expenditures on cash related to expenses or costs that are borne by the company.

2. Inventory Book

This inventory book is used to record the entry of merchandise. Exit merchandise occurs when a company sells its merchandise or there is merchandise that is not feasible to sell to consumers or transaction returns, thereby reducing the amount of inventory. The entry of merchandise occurs when the company buys merchandise, thereby increasing the amount of inventory. The main purpose of this inventory book is made so that the stall owner can find out the amount of inventory at any time so that the stall owner can know the cost of goods sold as well as the cost of goods inventory ready to sell. This inventory book is equipped with the name of the goods so that the stall owner can control each type of merchandise.

3. Debt Book

This debt book is used to record liabilities or business debts caused by the purchase of merchandise on credit or capital loans to debtors. With the existence of this debt book, shop owners can find out their debt balance at any time. The debt book is equipped with the name of the debtor, so this debt book will be more informative.

4. Receivable Book

This accounts receivable book is used to record the balance of receivables owned by the company. These receivables arise from the sale of merchandise on credit from consumers. The book of accounts receivable is equipped with the name of the creditor so that the shop owner can find out the balance of accounts receivable per customer.

5. Supplies Book

This equipment book is used to record equipment balances. Equipment in the traditional warung business is in the form of stationery such as books, pencils, pens, highlighter, paper, books, and other supplies. This equipment book is made with the aim that the shop owner can find out the number of supplies at any time. Equipment that has been used will be used as operating expenses every period and reported in the income statement as an equipment expense.

6. Fixed Asset Book

The book of fixed assets is used to record the depreciation of fixed assets owned by the company. Fixed assets that are depreciated in traditional stalls can be in the form of vehicles, equipment (cabinets, chairs, tables, storefronts, etc.), buildings and other fixed assets. The sheet in the book of fixed assets can be used for a period of one year because the recording of depreciation of fixed assets is done at the end of each month and will be reported as a depreciation expense in the income statement.

7. Financial Statement

Financial reports are made per month with the aim that the stall owner can find out the development of the business he is running. The financial statements consist of 3 types of reports which include the income statement, the report on capital changes and also the statement of financial position. The following is an explanation of each financial statement:

a) Income Statement

This income statement is made to determine whether in the period concerned the company made a profit or loss. To find the profit or loss of the results of operations, the owner of the company can do this by pairing total net sales (after deducting the cost of sales) with costs. If the total net sales are greater than the total costs, the company gets a profit, whereas if the total net sales are smaller than the total costs, then the company gets a loss.

b) Changes in Capital Statement

This capital change report is made to be able to know the changes in the capital that occur at the end of the period (per month) due to profit or loss generated during one accounting period, as well as the existence of cash withdrawals that are carried out by the business owner for his personal needs. This capital change is known by adding the initial capital of the period with the profit generated at the end of the period minus the take-up of cash by the owner, then the result is the end-of-period capital. The end period capital is used as initial capital in the next period. If the company suffers a loss at the end of the period, then the initial capital of the period is reduced by losses and withdrawal of cash by the owner, then the result is the end of period capital.

c) Position of Financial Statement

This financial position statement is made to determine the financial position which consists of assets, liabilities or debt and capital. This report is made by recording the types of assets and their balance in the left column after deducting the depreciation of the fixed assets value, while the right column records the types of debt and their balance and records the end of period capital and the balance. The right-hand column shows the total assets in the left-hand column. Because the company's assets are total debt plus capital.

The third stage was to carry out a test after being given training and the application of a simple accounting format to 20 MSMEs types of trading businesses in UniversitasGaluhCiamis. Table 2 shows a description of the overall test results before applying a simple accounting format:

Table 2 Descriptive Statistics of Test_2 Result

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Test_2	20	55.00	90.00	71.2000	10.10784
Valid N (listwise)	20				

Source: Data Processing Using SPSS

In the table, it can be seen the score generated on the second test, with a minimum score of 55.00, a maximum score of 90.00, and an average score of 71.20. The acquisition score shows that the skills in preparing financial statements in accordance with the accounting principles of 20 MSMEs types of trading businesses around the campus of UniversitasGaluhCiamis have increased. To measure how changes occur before and after the adoption of a simple accounting format, a different t-test is performed. Table 3 provides information about these changes.

Table 3 One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Sig
Test_1	20	27.8000	9.31665	.000
Test_2	20	71.2000	10.10784	.000

Source: Data Processing Using SPSS

The table shows that there is a significant change in skills of the 20 MSMEs of types of trading businesses in Universitas Galuh Ciamis before and after the training and application of a simple accounting format to their businesses. Simply change can be seen from the average score achieved from Test_1 is 27.80 and Test_2 71.20 with a significance level of 0,000 or below the required level of significance, which is 0.05. These results indicate an increase in the skills of preparing financial statements using a simple accounting format from the MSMEs of the type of trading business in Universitas Galuh Ciamis.

Surely there are many benefits to be obtained if MSMEs continues to compile financial reports in accordance with accounting rules. These benefits include 1) being able to find out information about the financial position, financial performance, and changes in owner's capital; 2) can be used as a basis for strategic decision making; 3) can know the value of changes in cash inflows and outflows. Based on the cash flow statement, MSMEs will find out how much the increase or decrease in cash in each period. In addition, MSMEs actors can obtain information from where the cash sources come from, where the allocations will be issued and what amount of cash receipts and disbursements, both from operations, investments and from funding.

Therefore, financial records are very important for all types of businesses, especially to avoid things that can harm the company. Many novice business people often ignore the financial records of their businesses, due to a lack of understanding of the importance of accounting in the business world. As the MSMEs business advances and requires additional capital, the financial statements of the business will be seen by the banking sector. Therefore, MSMEs must neatly conduct financial records periodically from the start.

A serious problem faced by MSMEs at present is trade liberalization, such as the entry into force of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) which was effective in 2010 and agreed upon by the Government of Indonesia in the form of an agreement. Pawitan (2012) in his research explained that the presence of ACFTA at that time until now threatened the existence of local products, including products produced by MSMEs in Indonesia. This condition is even tougher for MSMEs in Indonesia with the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. In the era of free trade, the Government of Indonesia did not consider the readiness of MSMEs to compete, such as the readiness of product quality, market readiness and the readiness of its human resources in managing businesses, including financial management (Akbar et al., 2019). Phijaisanit (2017) said that in the era of free trade entrepreneurs in ASEAN must be able to compete by efficiently mobilizing their resources.

Actually, the rapid development of MSMEs has made a real contribution in providing employment and income for the people of Indonesia. Therefore, empowerment and sustainable development need to be done so that MSMEs not only grow in numbers but also develop in the quality of the competitiveness of their products. The empowerment of the MSMEs sector has become very strategic, because of its great potential in driving the community's economy and at the same time becoming the source of income for the majority of the community in improving their welfare. The importance of MSMEs in developing countries can overcome various economic and social problems such as reducing unemployment, eradicating poverty and equitable distribution of income. For this reason, various studies to provide solutions for the development of MSMEs must continue to be carried out by related parties.

CONCLUSION

The results of the study showed the lack of skills of MSMEs in trading business types in Universitas Galuh Ciamis in preparing financial reports. Evidenced by the tests conducted before providing training and applying a simple accounting format on their business, the average score obtained was 27.80. Meanwhile after accounting training was given to them, and after the

application of a simple accounting format to their businesses, there was an increase in their skills in preparing financial statements using that format. Proven from the test after being given training and applying a simple accounting format, the average score obtained was 71.20.

This study has a weakness, namely, the analysis is carried out only on the ability of SMEs before and after accounting training and application of a simple accounting format, so that the impact of applying a simple accounting format to business development cannot be known. It is better for the next study, the analysis conducted is to change business conditions before and after accounting training is given, so that the contribution of accounting can be known to the development of MSMEs businesses.

ACKNOWLEDGMENT

Thank you to the Kemenrsitekdikti for the grant funding for this study. We are also grateful to Universitas Galuh Ciamis for the support it has provided, especially from the various facilities that have been provided to improve the skills and competence of its human resources.

BIBLIOGRAPHY

- Akbar, D. S., & Dedeh, D. (2017). Format Akuntansi Sederhana untuk Warung Tradisional. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 4(2), 121–130.
-, Faridah, E., Apip, M., & Suhendi, R. M. (2019). Strategy of MSMEs Development in Facing The Industrial Era 4.0: in the Accounting Perspective. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 110. <https://doi.org/10.25157/jwr.v6i2.1946>
- Astuti, D. S. P. (2010). Perlunya Penerapan Sistem Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 152–163.
- Azaria, V.M. (2013). Penerapan Akuntansi Pada UKM Unggulandi Kabupaten Kota Blitar dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP. *Univeritas Jember*.
- Badria, N., & Diana, N. (2018). Persepsi Pelaku UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Diberlakukannya Laporan Keuangan yang Berbasis SAK EMKM. *Universitas Islam Malang*, 55–66.
- Ernawati, S., Asyikin, J., & Sari, O. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Dasar Pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 81–91.
<https://doi.org/journal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/JPWIGA/article/viewFile/79/133>
- Nurranto, H., Kurniadi, F., & Gayatri, A. M. (2019). Tingkat Inovasi Sebagai Strategi pengembangan Produk Usaha Kecil Menengah di Desa Kebonharjo. *Sosio E-Kons*, 11(1), 1–15.
- Pawitan, G. (2012). Characteristics of Small Medium Manufacturing Industries In the Era of ACFTA : case study from West Java. *Prcedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 130–139. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00328-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00328-0)
- Phijaisanit, E. (2017). AEC and the Changing Economic Landscape. In *Internationalization and Managing Networks in the Asia Pacific*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100813-3.00002-X>
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2018). Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM: Survey Pada UMKM Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 194–204.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29230/ad.v2i2.2767>

- Saragih, F., & Surikayanti. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, (c), 452–461.
- Savitri, R. V., & Saifudin, S. (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM MR. Pelangi Semarang). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 5(2), 117–125.
- Wilujeng, S.M.R. (2013). Penerapan SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Distro Lollipop di Surabaya). *Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*.

**MENINGKATKAN POTENSI USAHA MIKRO BERBASIS EKONOMI
KREATIF BAGI ANGGOTA KOPERASI MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN PERAN KOPERASI SYARIAH
(Studi Penelitian di Koperasi Syariah Tangerang Selatan)**

Heri Nurranto, Askardiya Mirza Gayatri, Muzdalifah

Program Studi Pendidikan Ekonomi,
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial,
Universitas Indraprasta PGRI
E-mail: heri.nurranto@gmail.com

Diterima: 02 September 2019; Direvisi: 11 November 2019; dipublikasikan: 13 Desember 2019

ABSTRACT

This research aims to increase the potential of a micro-economy based creative economy through empowerment programs and the role of CMS Syariah Cooperatives with 92 members. This study uses a qualitative method. The data needed is primary and secondary data obtained from the chairman of the cooperative, the ranks of the cooperative management and members of the cooperative who have micro-businesses. The population of cooperative members who have micro-businesses is 9, all of which are sampled. Data collection through field observations, discussions, interviews, and documentation. The results showed that members of cooperatives that have micro-businesses really need creative economic knowledge, motivation, and coaching, including assistance in developing products and services so that they can contribute to CMS Cooperatives as a place for their businesses that will automatically turn on CMS Cooperative operations.

Keywords: *Micro Business, Creative Economy, Empowerment Program*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan potensi usaha mikro berbasis ekonomi kreatif melalui program pemberdayaan dan peran Koperasi Syariah CMS yang jumlah anggotanya 92 orang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari ketua koperasi, jajaran pengurus koperasi dan anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro. Populasi anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro berjumlah 9 orang yang seluruhnya dijadikan sampel. Pengumpulan data melalui observasi lapangan, diskusi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro sangat memerlukan pengetahuan ekonomi kreatif, motivasi, dan pembinaan termasuk pendampingan dalam mengembangkan produk dan jasanya supaya bisa berkontribusi di Koperasi CMS sebagai wadah usahanya yang secara otomatis akan menghidupkan operasional Koperasi CMS.

Kata Kunci: Usaha Mikro, Ekonomi Kreatif, Program Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Keberadaan badan usaha non bank yang berbentuk koperasi diperkirakan akan terus meningkat sehingga perekonomian Indonesia akan lebih stabil karena peran koperasi menysasar ke semua pelosok desa sampai perkotaan, termasuk di dalamnya yaitu Koperasi Syariah. Peran Koperasi Syariah dalam menyalurkan dana salah satunya adalah untuk membiayai usaha mikro bagi para anggotanya atau yang sering disebut sebagai program Kredit Koperasi Primer Anggota (KPPA). Program KPPA yang dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran dapat memberikan manfaat bagi anggota koperasi. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Dian Sari (2017) tentang evaluasi program KKPA PT Perkebunan Nusantara V di Kelurahan Sungai Pagar kabupaten Kampar menunjukkan bahwa program tersebut mampu memberikan beberapa dampak positif bagi anggota koperasi yaitu pertama, bahwa rata-rata anggota memiliki pendapatan kurang dari Rp 1.000.000/bulan sebelum ikut dalam program dan meningkat pendapatan mereka menjadi Rp. 1.500.000/bulan. Kedua, bahwa 74,63% anggota koperasi menyatakan bahwa program KKPA PT. Perkebunan Nusantara V Kelurahan Sungai Pagar Kabupaten Kampar dapat memampukan anggota KUD Hidup Baru meningkatkan pendidikan anak mereka. Dampak yang terjadi ini membuat keefesienan anggota KUD hidup baru, sehingga mengurangi pengangguran, mengurangi banyaknya penduduk setempat yang mencari pekerjaan keluar daerah, dan membuat semakin berkualitasnya SDM masyarakat setempat karena dapat menyekolahkan anaknya (Sari, 2017).

Sejak tanggal 2 Februari 2011 pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UMKM telah berupaya meningkatkan populasi wirausahawan di Indonesia melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional atau yang disingkat GKN. Program tersebut meliputi penyelenggaraan seminar, pelatihan sampai program pinjaman tanpa bunga. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2017 jumlah usaha mikro sebanyak 62.106.900 orang, usaha kecil 757.090 unit, usaha menengah 58.627 unit dan usaha besar 5.460 unit. Jumlah tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan maka diharapkan setiap koperasi mampu menjadi wadah kegiatan usaha mereka (anggota), sehingga kualitas usaha mikro dan kecil khususnya memiliki kualitas. Melalui konsep ini maka diharapkan tujuan koperasi yang mendasarkan pada nilai-nilai maupun prinsip-prinsip koperasi dapat tercapai secara optimal. Dalam menciptakan kualitas atau keberhasilan koperasi, salah satu faktor kunci adalah kontribusi atau partisipasi aktif para anggotanya dalam memajukan usaha koperasi, sehingga pasifnya anggota koperasi dapat memperlambat perkembangan operasional/kegiatan koperasi yang berdampak pada tingkat keberhasilan koperasi.

Sebagai soko guru perekonomian, maka koperasi harus mampu menjadi agen perubahan bagi industri rumahan atau usaha mikro yang cenderung memiliki berbagai karakter kelemahan. Usaha mikro menjadi bagian penting dalam kegiatan usaha rakyat, oleh karenanya usaha mikro membutuhkan uluran pengembangan bagi pihak-pihak tertentu, terutama koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yang diuraikan pada Pasal 6 Ayat 1, yaitu 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Harsono (2014: 36), ciri-ciri usaha mikro adalah 1) jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, artinya sewaktu-waktu dapat berganti, 2) tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu berpindah tempat, 3) belum melakukan administrasi keuangan meskipun dengan cara yang sederhana, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, 4) sumber daya manusianya (pelaku usahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, 5) tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah, 6) umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank, 7)

umumnya tidak memiliki ijin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Sedangkan jika dilihat dari kriteria jumlah tenaga kerja untuk usaha mikro yaitu 1-4 orang, jadi karyawan atau tenaga kerja maksimal 5 (lima) orang.

Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera (CMS) adalah salah satu koperasi syariah di kota Tangerang Selatan. Jumlah anggota Koperasi Syariah Citra Mandiri saat ini sebanyak 92 orang, dimana mayoritas berpendidikan strata satu (S1). Berdasarkan hal tersebut, koperasi Koperasi Syariah Citra Mandiri pada dasarnya memiliki kekuatan internal kuat yang memungkinkan anggota dapat berkontribusi secara maksimal untuk memajukan Koperasi. Anggota koperasi yang mayoritas berpendidikan S1 memungkinkan telah didukung oleh tingkat pengetahuan yang cukup, sehingga pemikiran-pemikiran atau ide gagasan dari mereka dapat memberikan peran dalam mengembangkan koperasi di masa yang akan datang. Akan tetapi dalam observasi awal ditemukan bahwa sebagian besar anggota tidak memiliki perhatian yang cukup terhadap keberadaan Koperasi Syariah Citra Mandiri. Mereka cenderung "berjalan" sendiri-sendiri dalam kegiatan atau usaha sehari-hari masing-masing. Dampaknya bahwa koperasi tidak memiliki posisi yang kuat untuk mengembangkan kegiatan operasional koperasi apalagi sebagai payung usaha anggotanya.

Dari 92 (sembilan puluh dua) anggota terdapat 9 (sembilan) anggota yang memiliki usaha sendiri dan 83 (delapan puluh tiga) anggota lainnya berprofesi sebagai pegawai di suatu lembaga atau perusahaan. Komposisi anggota tersebut membuat Koperasi Syariah Citra Mandiri dituntut mampu memberdayakan anggota yang telah memiliki usaha sendiri secara optimal. Jika hal ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan koperasi tidak akan memiliki *core competition* koperasi sebagai wadah kegiatan usaha anggota. Keberhasilan membina anggota dalam usahanya akan menjadi daya tarik bagi anggota-anggota lain untuk mempunyai usaha sendiri khususnya bagi anggota yang belum memiliki pekerjaan tetap. Bagi anggota yang saat ini berprofesi menjadi pegawai/karyawan memungkinkan peran koperasi menjadi pertimbangan tersendiri bagi mereka untuk memiliki kegiatan/usaha sampingan bahkan alih profesi menjadi wirausaha di bawah binaan koperasi.

Peran Koperasi Syariah Citra Mandiri seyogyanya mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam berwirausaha baik secara mandiri maupun mengadakan kemitraan dengan pihak lain, baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga-lembaga pendidikan di sekitarnya. Hal ini didasarkan bahwa saat ini masih terdapat kecenderungan bahwa anggota koperasi yang memiliki usaha masih memiliki kekurangan pengetahuan dalam menjalankan usaha dengan benar dan tepat sasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Endaryono dan Djuhartono (2018) berjudul "Membangun Jaringan Pasar untuk Mengembangkan Usaha Produk Lokal Dalam Menumbuh Kembangkan Usaha Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Usaha Mikro dan Keuangan Mikro", memberikan acuan strategi pendampingan pada pengabdian masyarakat yaitu memberikan pengetahuan tentang pendidikan keuangan untuk "perempuan matang". Pendidikan itu diberikan berdasarkan kriteria masyarakat yang memiliki usaha produk lokal dengan rata-rata umur diatas 40 tahun, dimana materi yang diberikan berupa, membentuk prakoperasi, koperasi serta bagaimana membuat tabungan untuk masa depan. Penelitian yang kami laksanakan memberikan pengembangan strategi yang berbeda dalam meningkatkan potensi usaha mikro yang didasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota Koperasi Syariah Citra Mandiri di lapangan.

Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan

Ekonomi kreatif menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2008) didefinisikan sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Ekonomi kreatif juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada

kegiatan ekonomi yang menggerakkan sektor industri yang disebut industri kreatif, jadi industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat atau talenta individu yang menciptakan lapangan pekerjaan melalui daya cipta dan kreasi menjadi suatu produk barang atau jasa yang kreatif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, tentang Badan Ekonomi Kreatif bahwa produk ekonomi kreatif diklasifikasikan ke dalam 16 subsektor, yang diurutkan sesuai dengan urutan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah 01) Arsitektur, 02) Desain Interior, 03) Desain Komunikasi Visual, 04) Desain Produk, 05) Film, Animasi, dan Video, 06) Fotografi, 07) Kriya, 08) Kuliner; 09) Musik, 10) Fesyen, 11) Aplikasi dan Game Developer, 12) Penerbitan, 13) Periklanan, 14) Televisi dan Radio, 15) Seni Pertunjukan dan 16) Seni Rupa (Putra, 2017, bekraf.go.id).

Saat ini di era digitalisasi, usaha mikro tidak lepas dari keterkaitannya dengan ekonomi kreatif, yang mana dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia diawali dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berhasil merumuskan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2009-2025 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada 2011 membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 terbentuk Badan Ekonomi Kreatif (Putra, 2017, bekraf.go.id).

Dalam rencana strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019 diuraikan menjadi 3 sasaran pokok yaitu: 1) kreativitas adalah kapasitas atau daya upaya untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik dan baru serta menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda; 2) ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas; 3) usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.

Keberadaan usaha mikro dan kecil membutuhkan perhatian khusus agar potensi mereka dapat optimal sebagai kegiatan ekonomi rakyat dalam memenuhi kebutuhan serta kuat dalam era saat ini. Selain pemerintah, peran dari pihak-pihak tertentu dibutuhkan sebagai upaya memberdayakan potensi usaha mikro dan kecil di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui membangun jaringan usaha mikro dan keuangan mikro, yakni dalam aspek reformasi, investasi pada usaha mikro maka perlu diberikan kebutuhan strategis melalui. a. Kebijakan nasional pengembangan keuangan mikro yang adil sebagai landasan filosofi dan platform bersama dalam mengembangkan produk lokal, usaha mikro, kecil dan menengah serta perkembangan kelompok masyarakat b. Kerangka hukum bagi lembaga keuangan mikro (LKM) dalam bentuk UU/PP atau paling tidak Perda sebagai payung legalitas LKM di daerah. c. Pelatihan bagi masyarakat untuk peningkatan kapasitas usaha produk lokal, usaha mikro dan menengah dalam hal, produk, pemasaran, akses kredit, membangun jaringan pasar dan lain – lain d. adanya Forum Peduli masyarakat usaha kecil mikro yang dapat memberikan kontribusi positif yang saling menguntungkan baik (Endaryono dan Djuhartono, 2018).

Koperasi Syariah dan Perannya

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah (Sumiyanto, 2008:23). Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanalisis di daerah-daerah. Dalam perkembangannya,

memunculkan jenis koperasi berbasis syariah atau disebut sebagai koperasi syariah. Koperasi Syariah yang didefinisikan sebagai adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah untuk 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya dan 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Sholihin, 2013: 459). Dalam menjalankan usahanya koperasi syariah memiliki beberapa landasan hukum yaitu 1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 35.2/PER/MKUM/2007, Koperasi Syariah memiliki landasan dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu 2) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 3) berlandaskan asas kekeluargaan dan 4) berlandaskan pada syariah Islam, yaitu Al-quran dan Ash-Shunah dengan saling tolong-menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).

Pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 35.2/PER/MKUM/2007 tersebut juga diuraikan prinsip koperasi syariah yang dianut yaitu: 1) Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak; 2) Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah; 3) Umat manusia adalah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini; 4) Menjunjung tinggi keadilan, serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.

Keberadaan koperasi syariah tidak kalah pentingnya dengan koperasi konvensional, dimana fungsi koperasi syariah adalah untuk 1) Membangun dan mengembangkan segala potensi anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, 2) Memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota untuk lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dalam syariah Islam, 3) Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan, 4) Menjadi sebuah wadah atau mediator yang dapat menghubungkan pemegang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal, 5) Berusaha untuk memperkuat setiap ekonomi anggota koperasi untuk saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi, 6) Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat secara luas dan 7) membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif anggota koperasi.

Jika melihat beberapa kelemahan atau karakter usaha seperti yang diuraikan pada awal tulisan ini, maka anggota Koperasi Syariah CMS tergolong sebagai orang yang memiliki atau melaksanakan usaha mikro. Tujuan penelitian untuk meningkatkan potensi usaha mikro berbasis ekonomi kreatif melalui program pemberdayaan dan peran Koperasi Syariah CMS dalam menciptakan usaha rintisan atau pengembangan usaha dari anggota. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan serta masukan kepada anggota supaya dapat menyiapkan diri di era digitalisasi melalui usaha mikro berbasis ekonomi kreatif. Melalui langkah ini diharapkan ke depan, anggota Koperasi Syariah yang memiliki usaha telah siap

bersaing secara sehat dan syar'i dengan pelaku usaha mikro yang lain dan memotivasi anggota supaya potensi kewirausahaannya tergalai melalui kreativitas dan kemampuan yang dimilikinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendasarkan pada data primer dan sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari informan-informan yang diambil dengan metode *judgement*, dimana peneliti memiliki kriteria tertentu dalam penentuan sampel informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ketua Koperasi, jajaran pengurus koperasi Syariah CMS serta anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka sasaran penelitian ini adalah anggota koperasi CMS yang memiliki usaha, dimana dari anggota yang berjumlah 92 orang, terdapat 9 orang yang memiliki atau menjalankan usaha mikro, maka seluruh anggota yang memiliki usaha tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat diperoleh melalui diskusi, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi (Sugiyono, 2013:137). Desain penelitian ini diawali dengan pelaksanaan pada siklus 1 yaitu membentuk kelompok anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari kelompok A (keripik, *snack*) sebanyak 3 orang, kelompok B (katering, lauk) 3 orang dan kelompok C (usaha jasa konveksi, kerajinan/ kriya, dan penitipan anak) 3 orang. Masing-masing kelompok diberikan lembar isian (kuesioner), setelah mengisi masing-masing kelompok mendiskusikan akan apa yang diisi yang tentunya jawabannya berbeda satu sama lain. Selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan observasi untuk mengamati dan mencatat perilaku dan partisipasi anggota dalam kelompok. Hasil observasi peneliti selanjutnya dijadikan bahan/materi untuk pelaksanaan pada siklus-siklus berikutnya. Tabel berikut adalah rincian dari setiap siklus sebagai dasar pemetaan tingkat pengetahuan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro anggota Koperasi Syariah CMS Tangerang Selatan.

Tabel 1
Desain Penelitian

Siklus Penelitian	Desain Penelitian
Siklus 1 Perencanaan	1) Observasi usaha mikro anggota. 2) Identifikasi usaha mikro berbasis ekonomi kreatif 3) Pembentukan kelompok 4) Pemberian lembar isian 5) Evaluasi
Siklus 2 Tindakan	1) Mendiskusikan hasil siklus 1 2) Observasi di lapanga 3) Identifikasi hasil observasi di Lapangan 4) Diskusi kelompok 5) Evaluasi dan presentasi
Siklus 3 Pengamatan	1) Observasi indikator usaha mikro berbasis ekonomi kreatif 2) Hasil laporan tugas kelompok (portofolio) 3) Kelebihan dan kelemahan anggota dalam mengisi lembar isian 4) Evaluasi motivasi usaha mikro berbasis ekonomi kreatif melalui wawancara 5) Refleksi hasil pemberdayaan anggota pada usaha mikro berbasis ekonomi kreatif melalui peran Koperasi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota

Sumber : Data primer yang Telah diolah Penulis (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil survei pendahuluan dan berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, peneliti menilai usaha mikro berbasis ekonomi kreatif di Koperasi Syariah CMS masih sangat rendah dan anggota belum memanfaatkan peran koperasi sebagai payung usaha secara maksimal. Berdasarkan hal ini maka, dibutuhkan adanya strategi pemberdayaan bagi anggota koperasi baik yang sedang merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang lama, atau anggota hanya menyimak saja karena belum termotivasi untuk berkontribusi pada usaha mikro berbasis ekonomi kreatif.

Pemetaan Tingkat Pengetahuan Ekonomi Kreatif

Era digitalisasi saat ini sangat memudahkan kita dalam mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Walaupun begitu, bagi pelaku usaha mikro dan atau masyarakat tanpa adanya bimbingan atau sosialisasi dari pihak lain (misalnya, pemerintah) atas manfaat teknologi bahkan cara akses mendapatkan informasi, mereka tidak pernah dan termotivasi untuk menggunakan peran teknologi di era digital saat ini. Akibatnya, masih terdapat pelaku usaha mikro memiliki pengetahuan yang rendah baik secara umum maupun berkaitan dengan kebutuhan usahanya.

Dalam upaya memetakan tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro pada anggota Koperasi Syariah CMS, diawali dengan memberikan lembar isian yang dikerjakan secara berkelompok bertujuan untuk saling sharing antar anggota. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa dalam wadah koperasi salah satunya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan kelak dinikmati secara bersama pula. Dalam lembar isian tersebut anggota akan melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk mengemukakan pendapat/ ide/ gagasan/ opini dan sebagainya serta akan saling bekerja sama pada tugas yang diberikan oleh peneliti. Proses pemetaan pengetahuan ekonomi kreatif ini dilakukan melalui 3 (tiga) siklus, dimana tujuan akhir dari pelaksanaan siklus 1 sampai siklus 3 adalah untuk mendapatkan asumsi yang mendasar untuk memberikan solusi strategi pemberdayaan usaha mikro berbasis ekonomi kreatif melalui peran koperasi Syariah dalam meningkatkan potensinya.

Dari 9 (sembilan) orang anggota Koperasi Syariah CMS yang mempunyai usaha mikro, diperoleh karakteristik dasar responden yaitu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan S2 sebanyak 3 (tiga) orang, S1 sebanyak 4 orang, dan SLTA/ SMK sebanyak 2 orang. Seluruh anggota tersebut telah memiliki rumah sendiri selama 5 s.d 10 tahun. Di lihat dari profesi/pekerjaan mereka memiliki pekerjaan utama yaitu sebagai sebagai pengajar 2 (dua) orang, ibu rumah tangga 4 (empat) orang dan 3 (tiga) lainnya adalah sebagai wiraswasta.

Hasil penelitian melalui desain siklus, bahwa pada pelaksanaan siklus 1, peneliti kesulitan dalam memberikan pemahaman akan pelaksanaan penelitian ini kepada anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro dalam bidang kuliner terutama pada tim catering. Awalnya mereka mengira bahwa kami akan mengorek keuntungan usaha mereka dan omzet untuk keperluan pajak penghasilan. Melalui pendekatan dialog dengan menyampaikan secara terbuka tentang maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan strategi pemberdayaan usaha mikro berbasis ekonomi kreatif, maka pelaksanaan yang sebelumnya kurang kooperatif menjadi kooperatif. Dalam proses selanjutnya, peserta peserta mengisi lembar isian tentang identitas diri, usaha mikro, pemberdayaan, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan anggota dengan maksud untuk mendapatkan data awal sebagai bagian dari karakteristik responden.

Hasil pada siklus ini menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) anggota koperasi yang mempunyai usaha mikro hanya terdapat 1 (satu) orang yang mengetahui maksud dari pemberdayaan. Sehingga peneliti beranggapan bahwa semua peserta memerlukan pelatihan dan pengembangan diri, kesulitan mendapatkan tenaga kerja, kesulitan memasarkan produk. Selanjutnya dapat diketahui bahwa 2 (dua) orang telah aktif menggunakan media sosial. Dari

siklus ini juga dapat diketahui bahwa semua pelaku usaha mikro anggota Koperasi Syariah CMS belum pernah ikut bazar atau buka stand untuk memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

Pada kelompok B (usaha bidang catering dan lauk) masih harus banyak belajar tentang pengetahuan dalam berwirausaha seperti manajemen produksi, pengembangan produk dalam hal kreativitas dan inovasi produk dan pelaksanaan pemasaran. Sedangkan data dari Kelompok A (usaha produk keripik dan snack) dan Kelompok C (usaha jasa konveksi dan penitipan anak), menunjukkan bahwa pelaku usaha khususnya usaha konveksi sudah memahami manajemen produksi, namun belum bisa mengembangkan produk karena tidak ada keberanian dan takut gagal dalam usaha atau ketakutan terhadap dampak kerugian. Pada pelaku usaha penitipan anak pada umumnya sudah mengetahui manajemen dan melihat peluang pasar, namun juga masih mereka juga masih memiliki kekhawatiran dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi usahanya.

Selanjutnya dilakukan evaluasi yang berkaitan dengan jawaban dari lembar isian, observasi dalam penelitian ini memberikan tugas untuk menghadiri dan mengamati pameran INACRAFT di Balai Sidang JCC (International Handicraft Trade Fair) Senayan yang diselenggarakan dari 24 s.d 28 April 2019, yang mengusung tema "*Jakarta Enjoyable Multicultural Diversities*".

Hasil pengamatan nantinya akan disampaikan dalam bentuk presentasi tanpa teks. Namun pada kenyataannya mereka hanya datang dan belanja saja serta hanya sekilas melihat-lihat yang bukan bidang usahanya, seperti anggota kelompok B (katering, lauk) lebih banyak atau menyukai *stand* kerajinan. Hasil evaluasi kelompok B bahwa, kelompok tersebut sangat menyukai hadir ke INACRAFT meskipun tugas yang peneliti berikan tidak dilaksanakan dengan baik.

Siklus 2 merupakan kegiatan yang mendiskusikan hasil siklus 1. Metode diskusi ini dipilih karena dianggap sebagai metode yang lebih efektif. Metode diskusi menurut Darwyan (2009: 143) yaitu percakapan yang responsif yang dijalin oleh pertanyaan-pertanyaan problematis dan diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil pada siklus 1 bahwa tugas yang diberikan untuk menghadiri INACRAFT belum terlaksana dengan baik, maka peneliti memberikan tugas untuk menghadiri pameran produk binaan Bank Indonesia di JCC Hall A, dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2019. Pada siklus ini peneliti mengamati para anggota koperasi pelaku usaha mikro sudah memperlihatkan kemajuan karena telah mendapatkan pengalaman nyata dan menyenangkan atas keikutsertaan mereka dalam event pameran produk di JCC Jakarta.

Dari hasil laporan yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok, presentasi tentang kewirausahaan yang mereka paparkan masih harus diperbaiki, baik dari cara berbicara maupun bersikap di depan umum. Maka melalui pendekatan interaktif dalam proses evaluasi, mereka sanggup untuk memperbaiki dengan cara presentasi lagi. Akibatnya, Siklus ini memakan waktu yang lama tidak sesuai dengan target rencana. Pada siklus 2 dilaksanakan 2x pertemuan karena kekurangan waktu pada saat diskusi kelompok sehingga kelompok B belum sempat presentasi hasil diskusi kelompok.

Dari topik/ tema diskusi bahwa peserta masih kurang mengerti dan memahami pada saat mengisi lembar isian (kuesioner) seperti yang berkaitan dengan 1) pemberdayaan; 2) pemasaran; 3) kreativitas dan inovasi produk; 4) sumber daya (bahan baku, tenaga kerja); 5) gelar produk; 6) modal; dan 7) peran koperasi. Setelah masing-masing kelompok melakukan diskusi pada tema-tema tersebut kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Peserta diperkenankan untuk menggunakan media internet, dengan tujuan bahwa penggunaan internet selain untuk menambah pengetahuan juga bisa digunakan secara produktif berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Setelah peneliti melakukan evaluasi hasil diskusi dan presentasi yang

berupa tanya jawab, setelah peserta mendapatkan masukan-masukan dari peneliti maka hasil akhir dan atau perbaikan akan dibahas pada saat pelaksanaan siklus 3.

Siklus 3 merupakan hasil laporan tiap kelompok berupa portofolio secara singkat . Dari siklus ini bahwa kelompok A masih memerlukan motivasi dan pengembangan diri sehingga masih dibutuhkan pelatihan-pelatihan atau praktek langsung untuk menggali kreativitas mereka. Peneliti memberikan masukan agar mereka mencoba menambah varian supaya tidak ketergantungan terhadap bahan baku. Akan tetapi mereka mengaku bahwa kesulitan mendapatkan tenaga kerja dan akses pemasaran sehingga memerlukan bantuan pemasaran. Seperti halnya kelompok A, pada kelompok B juga masih membutuhkan pelatihan dan praktek langsung dalam menentukan harga jual dan membuat laporan keuangan. Kelompok ini juga memiliki beberapa hambatan yaitu kesulitan mendapatkan tenaga kerja, kesulitan memasarkan produk karena usaha ini sangat menjamur. Sehingga pada kelompok B dapat diambil kesimpulan bahwa mereka membutuhkan kemitraan untuk memperkuat usaha mereka.

Seiring dengan kelompok A maupun kelompok B, bahwa kelompok C juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja terdidik. Kelompok C memerlukan motivasi untuk lebih kreatif. Minimnya kreatifitas dalam usaha bidang yang dilakukan oleh kelompok C, dapat berdampak pada kerugian dan tidak mampu melanjutkan usahanya kembali. Pada kelompok C, mereka tidak mengetahui atau memahami bagaimana cara memasarkan jasa usahanya dengan tepat. Dalam pendekatan interaktif yang dilakukan, maka kelompok C menginginkan agar Koperasi Syariah CMS ikut berperan dalam mengembangkan usahanya. Hasil dari siklus penelitian yang telah diuraikan di atas secara terperinci ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2
Hasil Siklus Desain Penelitian

Siklus Penelitian	Deskripsi Hasil
Siklus 1 Perencanaan	1) Pada awalnya pelaku usaha tidak kooperatif 2) Diperoleh deskripsi responden 3) Dibentuk 3 (tiga) kelompok berdasarkan bidang usaha 4) Peserta kesulitan dalam mengisi lembar kuesioner 5) Pelaku usaha mikro anggota Kopsyah CMS masih rendah dan menghadapi kendala usaha
Siklus 2 Tindakan	1) Diskusi interaktif 2) Peserta tidak mampu melaporkan studi banding/pameran sehingga dilakukan studi banding/mengunjungi pameran ke-2 3) Terdapat peningkatan pengetahuan tetapi belum mampu membuat laporan dengan baik 4) Diskusi peserta menghasilkan kesepakatan untuk memperbaiki laporan dan presentasi 5) Menambah waktu diskusi dan presentasi karena banyaknya perbaikan presentasi
Siklus 3 Pengamatan	1) Observasi indikator ekonomi kreatif : pemberdayaan, pemasaran, kreativitas dan inovasi produk, sumber daya (bahan baku, tenaga kerja), gelar produk, modal dan peran koperasi 2) Peserta kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja, akses pemasaran, ketergantungan bahan baku dan kreatifitas 3) Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang dalam indikator ekonomi kreatif 4) Peserta masih butuh motivasi dalam keuletan dalam menjalankan usaha

-
- 5) Refleksi strategi : a) Tenaga kerja : rekrut siswa SMK dan pemberdayaan remaja, ibu-ibu dan kaum disabilitas b) Bahan baku : inovasi dan kreatifitas, c) motivasi dan pengembangan SDM, d) pelatihan peneytapan harga jual dan laporan e) peran Koperasi Syariah CMS
-

Sumber : Data primer yang Telah diolah Penulis (2019)

Berdasarkan permasalahan atau keadaan yang dialami oleh pelaku usaha mikro anggota Koperasi Syariauh CMS, maka diperlukan strategi-strategi khusus bagaimana peran koperasi mampu mendorong dan memberdayakan anggotanya dalam upaya mencapai keberhasilan usaha.

Strategi Koperasi Syariah CMS dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Semua pelaku usaha yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok memiliki banyak kesamaan yang membuat usahanya terhambat. Berdasarkan pada keadaan tersebut, maka penelitian ini melakukan proyeksi strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro anggota koperasi CMS maupun secara general dapat digunakan oleh anggota lain atau masyarakat pelaku usaha mikro secara umum. Adapun beberapa strategi Koperasi CMS untuk mengembangkan usaha mikro anggotanya adalah:

1. Masalah kesulitan tenaga kerja,

Kesulitan tenaga kerja merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh pelaku usaha mikro anggota Koperasi Syariah CMS. Masalah ini dapat diatasi dengan merekrut dan atau bekerjasama dengan siswa SMK jurusan tata boga untuk kuliner dan tata busana untuk jasa konveksi. Keterbatasan dana atau modal untuk membayar upah kepada pegawai, pelaku usaha dapat memilih opsi tenaga kerja magang atau kontrak. Hal ini dilakukan selain untuk mengantisipasi keterbatasan dana juga untuk menjaring pekerja yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam usahanya. Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi anggota dapat berperan sebagai perantara dan media komunikasi kemitraan dengan pihak SMK atau sekolah-sekolah di sekitar daerahnya. Selain siswa SMK koperasi dapat menjadi agen pemberdayaan terhadap ibu-ibu rumah tangga, remaja putus sekolah, atau kaum disabilitas.

2. Kesulitan bahan baku

Dalam mengatasi kesulitan bahan baku, pelaku usah mikro dapat mengembangkan produk berbasis inovasi dengan mengganti bahan baku lain. Jika bahan baku yang digunakan biasanya tidak bisa dihindari, maka pelaku usaha harus dapat memaksimalkan penggunaannya secara efektif dan efisien. Kemitraan dengan para pengusaha atau pengrajin lain dalam *supply* bahan baku bisa dilakukan, baik di daerah tersebut atau daerah lainnya. Berkaitan dengan hal ini, maka koperasi sebagai wadah usaha bisa memberikan akses kerjasama kemitraan dengan penyedia bahan baku. Pengembangan produk inovasi adalah bagian penting dalam mengatasi kelangkaan bahan baku, sehingga inovasi dan kreatifitas diharapkan dapat melahirkan karya produk unggulan atau produk substitusi yang dapat ditawarkan ke pasar atau pelanggan.

3. Motivasi dan pengembangan diri

Motivasi merupakan bagian paling mendasar dalam melakukan kegiatan usaha. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan usaha akan berdampak pada penyelesaian masalah secara mandiri. Motivasi dapat dibangun dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop dan *sharing* informasi kepada pihak lain. Motivasi harus dibangun secara berkelanjutan untuk menciptakan kepercayaan diri yang kuat, baik saat usaha telah berhasil maupun saat usaha mengalami kerugian. Bahwa dalam motivasi perlu peran pihak

lain, Koperasi Syariah CMS seyogyanya mampu memberikan motivasi usaha dengan cara memberikan langkah konkrit, misalnya memberikan akses pasar, support peralatan, informasi maupun dana pinjaman lunak. Menurut Ariwibowo (2013), untuk memungkinkan peningkatan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan peluang lokal dan pasar global perlu didukung dengan pengembangan lembaga pendamping atau yang lazim dikenal dengan *Business Development Service* (BDS). BDS ini diharapkan mampu menyediakan dukungan perkuatan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memperoleh akses teknologi dan pasar (non financial BDS) maupun akses terhadap permodalan (financial BDS).

4. Penetapan Harga Jual dan Laporan Keuangan

Penetapan harga jual merupakan bagian penting baik sebelum produk diproduksi maupun saat diluncurkan. Untuk merangsang daya tarik bagi pelanggan, khususnya bagi pengusaha baru, penetapan harga rendah merupakan strategi yang tepat untuk melakukan penetrasi pasar. Harga rendah yang dimaksud adalah tetap mengacu pada *Return of Investment* (ROI). Pelaku usaha dapat menetapkan harga di bawah pasar dalam beberapa waktu atau periode untuk mendapatkan *market share* secara bertahap. Kelemahan pelaku usaha mikro pada umumnya adalah ketidaktertiban terhadap laporan kinerja keuangan. Kecenderungannya adalah hasil penjualan atau uang tidak dipisahkan dengan uang kebutuhan sehari-hari. Dalam tahap awal, Koperasi dapat memberikan sosialisasi atau pelatihan bagaimana membuat laporan keuangan yang praktis dan mudah. Target pertama yang harus ditekankan adalah tertib administrasi, sehingga secara bertahap kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan dan lebih sempurna diwaktu yang akan datang. Baik cara menetapkan harga jual maupun laporan keuangan dibutuhkan pelatihan yang teratur, terstruktur dan berkelanjutan serta pendampingan.

5. Event Edukatif

Dalam meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan anggota dalam menjalankan usaha, Koperasi Syariah CMS dapat melakukan secara teratur pertemuan-pertemuan dengan anggota. Pertemuan ini dapat dilakukan 1 kali dalam sepekan atau 2 kali dalam sebulan. Pertemuan sosialisasi dan edukatif yang teratur serta dalam intensitas yang seimbang dapat memberikan motivasi dan peningkatan pengetahuan kepada anggota dengan baik. Koperasi dapat melakukan kerjasama dan atau mendatangkan para ahli, praktisi, dosen ataupun guru serta motivator dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar pengetahuan yang dimiliki anggota lebih banyak dan dalam aspek ilmu yang lebih luas. Secara singkat, bahwa dibutuhkan kemitraan edukasi bagi pelaku usaha mikro terhadap anggota Koperasi Syariah CMS, sehingga koperasi selayaknya bertindak sebagai wadah edukasi yang terstruktur untuk meningkatkan keberhasilan usaha ekonomi yang dijalankan oleh anggotanya.

Kelemahan-kelemahan yang dialami oleh anggota Koperasi Syariah CMS yang memiliki usaha mikro merupakan kelemahan yang umum ditemui di lapangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmud Amir (2012) membuktikan bahwa UMKM masih menghadapi masalah yang mendasar yang salah satunya adalah masih kesulitan dalam mengakses UMKM pada pasar atas dari produk yang dihasilkan. Perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa, pada penelitian ini objek bukan UMKM tetapi Usaha Mikro dari anggota Koperasi CMS dan bukan untuk mengentaskan kemiskinan tetapi mendapatkan strategi pemberdayaan usaha mikro.

Hasil dari penelitian yang lainnya yaitu Isa Muzakar (2016) menyimpulkan bahwa pengembangan industri kreatif yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif melibatkan peran berbagai elemen seperti pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi, mass media, agen, serta lembaga pendidikan dan pelatihan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah jumlah populasi

yang masih minim dan strategi pemberdayaan yang diperlukan anggota koperasi CMS melalui peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Sementara jika dilihat dari keterkaitan hasil penelitian dengan sumber dari teori-teori yang ada seperti yang telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini, yang menyatakan pada tingkat pendidikan yang rendah maka pada kenyataannya anggota koperasi CMS yang kami jadikan responden dan informan pendidikan terendah SLTA/ SMK sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 2 orang, sisanya 5 orang pendidikan S1. Sehingga pendidikan yang cukup tinggi juga memiliki keterbatasan pengetahuan, ketrampilan serta membutuhkan faktor lain agar mereka berhasil dalam usahanya, misalnya dengan mengikuti pameran, pelatihan atau pendampingan serta motivasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa anggota Koperasi Syariah CMS yang memiliki usaha mikro, mereka masih sebatas ikut-ikutan dan belum menggali potensi atau talenta masing-masing individu sehingga perkembangan usahanya masih lambat dan produknya belum masuk kategori kreatif maupun inovatif.

Peran koperasi syariah belum dimaksimalkan oleh para anggota, meskipun pada saat RAT maupun pertemuan non formal diadakan, namun masih membutuhkan motivasi supaya potensi yang dipunyai bisa tergali secara maksimal, secara tidak langsung peran koperasi belum seutuhnya mensejahterakan para anggotanya terutama yang sudah mempunyai usaha mikro, bagi yang belum mempunyai usaha apabila mempunyai bakat atau potensi dalam berwirausaha dalam bidang apapun bisa dikembangkan melalui koperasi dengan cara menjual produk atau jasanya melalui koperasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada pelaku usaha mikro anggota Koperasi Syariah CMS ndi Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat partisipasi anggotanya masih sangat kurang sehingga secara tidak langsung akan menjadikan hambatan bagi koperasi CMS
2. Memerlukan program pemberdayaan ekonomi kreatif bagi anggota koperasi baik yang sudah mempunyai usaha maupun akan memulai usahanya.
3. Kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja sehingga usaha yang dijalankan tidak atau kurang maksimal.
4. Koperasi CMS untuk lebih sering memotivasi para anggotanya supaya aktif dalam semua kegiatan yang diadakan oleh koperasi CMS maupun dari koperasi lain.
5. Pengurus koperasi dan Pembina sudah saatnya melakukan secara aktif dalam mensosialisasikan program-program dari pemerintah tentang pemberdayaan yang berkelanjutan.
6. Dalam upaya memberikan pemahaman dan menambah pengalaman berwirausaha Koperasi Syariah CMS sebaiknya mendorong anggotanya untuk mengunjungi dan atau mengikuti pameran / festival/ bazar dan sebagainya supaya mendapatkan inspirasi dan pertemanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada LPPM Universitas Indraprasta PGRI yang telah membantu mendanai dalam pelaksanaan penelitian ini melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian Semester Genap Tahun 2019 Nomor: 0367/SP3/KP/LPPM/UNINDRA/III/2019; Kepada Ibu Wardah Jafar. L.c., M.Ag. selaku Ketua Koperasi Syariah CMS di Tangerang Selatan beserta pengurus yang berkenan memberi waktu dan data-data yang kami perlukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariwibowo, Prasetio. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengetnasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economic* Volume 1 No. 3, 2015, hal 173-183. DOI: <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1398>
- Endaryono, Tony Bakti dan Djuhartono, Tjipto. 2018. *Membangun Jaringan Pasar untuk Mengembangkan Usaha Produk Lokal Dalam Menumbuh Kembangkan Usaha Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Usaha Mikro dan Keuangan Mikro*. Jurnal Sosio E-Kons, Volume 10, No. 3, Desember 2018, hal 228-233, DOI: https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/2793.
- Harsono, Budi. 2014. *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Dan Kelas Dunia Melalui UMKM*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Isa, Muzakar. 2016. *Model Penguatan Kelembagaan Industri Kreatif Kuliner Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Daerah*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA 2016. DOI: <http://eprints.umsida.ac.id/133/>
- Machmud, Amir. 2013. *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Tahun 2012, Tangerang Selatan. DOI: <https://repository.ut.ac.id/5078/>.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 35.2/PER/MKUM/2007, tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.
- Putra, Nadia Cifra. 2017. *Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015 – 2019*. DOI: <https://www.bekraf.go.id/berita/page/17/rencana-strategis-badan-ekonomi-kreatif-2015-2019>.
- Sari, Dian. 2017. *Evaluasi Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) PT. Perkebunan Nusantara V*. Sosio E-Kons, Volume 9 No 1 April 2017, hal. 9-17. DOI: https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/1683/1300.
- Sholihin, Ahmad Ifham, Ahmad Ifham. 2013. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Gramedia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *Menuju Koperasi Modern : Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi*. Yogyakarta: Debeta.
- Syah, Darwyan. dkk. 2009. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Diadit Media.

ANALISIS HARGA WAJAR SAHAM DENGAN METODE *DISCOUNTED CASH FLOW* PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK PERIODE 2013-2017

Redi Nurhadiman¹, Desy Septariani²,

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi,
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Sosial,
Universitas Indraprasta PGRI
E-mail: *desy_septa@yahoo.com*
E-mail: *redinurhadiman46@gmail.com*

Diterima: 07 Oktober 2019; Direvisi: 11 November 2019; dipublikasikan: 21 Desember 2019

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze and find out the fair price of the shares of PT Bank Tabungan Negara, Tbk for the period 2013-2017. The research method use quantitative descriptive methods with analyze discounted cash flow methods with proxy earning per share, dividen pay out ratio, price earning ratio dan required rate of return. The result research in 2013, 2014 and 2016 stock prices were undervalued while in 2015 and 2017 the stock prices were overvalued. Then based on the analysis using the graph of stock price movements of PT Bank Tabungan Negara, Tbk for the period 2013-2017, the results show that in 2013 and 2014 the share price of PT Bank Tabungan Negara, Tbk was almost close to its fair price, while in 2015, 2016 and 2017 the stock price PT Bank Tabungan Negara, Tbk has reached and exceeded its fair price.

Keywords : *Fair Price of Stock, Discounted Cash Flow*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui harga wajar saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis metode *discounted cash flow* dengan proksi *earning per share, dividen pay out ratio, price earning ratio* dan *required rate of return*. Hasil penelitian adalah pada tahun 2013, 2014 dan 2016 harga saham bersifat *undervalued* sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 harga saham bersifat *overvalued*. Kemudian berdasarkan analisa menggunakan grafik pergerakan harga saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk periode 2013-2017, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2013 dan 2014 harga saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk hampir mendekati harga wajarnya, sedangkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 harga saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk telah mencapai dan melampaui harga wajarnya.

Kata kunci : *Harga Wajar Saham, Discounted Cash Flow*

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain (www.idx.co.id). Pada dasarnya, pasar modal (*capital market*) sama dengan pasar lain, yakni tempat penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi. Sesuai namanya, perdagangan yang di transaksikan di pasar modal adalah modal dan aktiva yang mewakili modal seperti saham, surat utang dan turunannya (derivatif) baik saham maupun surat utang (Moechdie, 2012: 26).

Investasi di pasar modal, nilai harga saham merupakan faktor penting. Oleh karena itu, para investor harus memperhatikan pergerakan harga saham yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, yang terdiri dari intern meliputi keadaan para emiten seperti laporan kinerja keuangan, laporan dan kebijakan manajemen, aksi korporasi, *public expose*, pembagian deviden, serta perubahan strategi dalam rapat umum pemegang saham, akan menjadi informasi penting bagi para investor di pasar modal. Sedangkan faktor ekstern meliputi kebijakan pemerintah, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar (kurs), keadaan inflasi dan penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia.

Sebagian besar investor, merasa kebingungan ketika mereka untuk pertama kalinya terjun ke dunia pasar modal. Mereka bingung harus memulai dari mana dan apa yang harus di pelajari, karena saham memang terkesan sebagai sesuatu yang canggih dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu (Hidayat, 2017: 1). Sebelum melakukan investasi atau transaksi saham, tentunya investor perlu membekali dirinya dengan memahami beberapa metode analisis yang mudah diaplikasikan sesuai dengan pribadi dan kenyamanan investor, maka resiko tersebut dapat dicegah. Bahkan bukan tidak mungkin aset atau dana yang dimiliki berpotensi untuk berkembang pesat. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis atau memprediksi pergerakan terhadap suatu harga saham jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, investor cukup memilih metode yang mampu dipahami dan diterapkan dalam memprediksi nilai yang terkandung dalam saham yang akan dibelinya.

Saham adalah tanda penyertaan kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Selambar saham adalah selambar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik (berapapun persinya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham (Masri dan Wahbi, 2017: 73). Saham adalah suatu bukti kepemilikan suatu perusahaan riil, dimana jika seseorang membeli saham maka sama dengan ia membeli bisnis dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (Wira, 2014: 5)..

Analisis fundamental juga dipakai untuk menganalisis tingkat kewajaran harga suatu saham. Mengukur tingkat kewajaran suatu saham biasanya adalah dengan membandingkan rasio-rasio keuangan tertentu dengan saham lainnya yang bergerak dalam bisnis yang sama. Pada dasarnya, analisis fundamental digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham termasuk kategori mahal (*overvalued*), wajar (*fair*) atau murah (*undervalued*) untuk dibeli (Wira, 2014: 3). Mengetahui fundamental suatu saham akan sangat membantu investor untuk menghindari membeli saham yang berkinerja buruk. Analisis fundamental adalah suatu pendekatan yang mempelajari kinerja suatu perusahaan atau emiten secara menyeluruh yang memperhitungkan berbagai faktor, seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis makro dan mikro (Wira, 2014: 3). Pendapat lain mengatakan, analisis fundamental adalah suatu kegiatan membaca laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya terkait suatu perusahaan, sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan apakah sahamnya tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak (Hidayat, 2017: 121).

Untuk mengetahui harga wajar atau nilai intrinsik suatu saham, metode analisis fundamental yang sering digunakan oleh para investor profesional salah satunya adalah dengan

menerapkan metode *discounted cash flow* (arus kas terdiskon). Metode ini menganut konsep *time value of money* yang memproyeksikan arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang (*future value*) untuk selanjutnya di nilai sekarang (*present value*) dengan faktor diskonto (Wira, 2014: 132). *Discounted cash flow* di pilih karena merupakan metode investasi yang cukup efektif dalam analisis fundamental dan sering digunakan para investor professional untuk mengetahui nilai intrinsik atau harga wajar serta mahal atau murahnya suatu saham.

Salah satu saham yang menarik untuk dianalisis menggunakan metode *discounted cash flow* adalah saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk (Kode saham : BBTN), karena saham ini memiliki laporan kinerja keuangan yang cukup bagus dimana selalu menghasilkan laba setiap tahunnya, dimana itu memenuhi kriteria dari metode *discounted cash flow*.

Harga wajar saham sering juga disebut sebagai nilai intrinsik suatu saham (*intrinsic value*) yaitu suatu nilai saham yang dianggap benar-benar mewakili performa atau kinerja suatu perusahaan (Wira, 2014: 126). Dengan mengetahui nilai intrinsik suatu saham, investor dapat mengatur strategi yang tepat pada saham-saham bagus pada saat harga saham tersebut menurun dengan tajam (Siregar, 2018: 100).

Discounted Cash Flow (DCF) adalah metode valuasi saham yang menggunakan konsep *time value of money*. Teori yang mendasari metode ini adalah seluruh uang yang mengalir di perusahaan di masa depan (*future value*), bila didiskontokan merupakan nilai wajar saham tersebut (*present value*), atau biasa disebut dengan arus kas terdiskon (Wira, 2014: 142). *Discounted cash flow* juga merupakan metode dengan perhitungan menggunakan arus kas seperti *net income*, *free cash flow*, dan *operating cash flow* yang di hitung *future value* nya lalu didiskontokan untuk mendapatkan nilai harga wajar saham (Filbert, 2017: 175). *Discounted cash flow* adalah suatu metode investasi dengan menggunakan analisis fundamental, untuk membeli saham-saham yang di perdagangkan di bawah harga wajarnya, serta memiliki fundamental yang baik dan menjual kembali saham tersebut ketika harganya sudah mencapai atau melebihi harga wajar (nilai intrinsik) nya. Penelitian ini memfokuskan pada harga wajar saham dengan metode *discounted cash flow* menggunakan indikator rasio *earning per share*, *dividen pay out ratio*, *price earning ratio* dan *required rate of return* pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk periode 2013-2017.

Earning Per Share atau laba per saham, adalah rasio yang digunakan untuk untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Semakin besar rasio ini, akan semakin baik (Wira, 2014: 94).

Dividen payout ratio adalah rasio yang menghitung nilai dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan (Moechdie, 2012: 284).

Price Earning Ratio, adalah rasio yang dihitung dengan membagi harga saham saat ini dengan *earning per share*. PER menggambarkan seberapa banyak investor menghargai saham tersebut. Asumsinya, semakin kecil nilai PER suatu emiten itu semakin bagus dan murah (Wira, 2014: 94)

Required Rate of Return, merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan yang layak dalam berinvestasi saham (Wira, 2014: 148).

METODE

Penelitian berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengunjungi website <http://www.idx.co.id> yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunannya. Pengambilan data dilakukan dari tahun 2013 sampai 2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2017, sedangkan sampel penelitian adalah PT.Bank Tabungan Negara, Tbk. Metode pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dan *annual report*. metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data dengan deskriptif kuantitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
 Hasil Perhitungan Harga Wajar Saham BBTN Periode 2013-2017

No	Tahun	Rata-rata EPS Growth (%)	Future Value Harga Saham	Rata-rata DPR (%)	Future Dividen	Rata-rata PER (x)	Future Value	Required Rate of Return (%)	Harga Wajar
1.	2013	20,67	3.161,9	25	253,94	9,46	3.415,84	14,17	1.760,91
2.	2014	18,75	3.572,2	26	298,36	10,62	3.870,56	17,59	1.721,56
3.	2015	9,32	2.048,5	26	185,08	10,69	2.233,58	15,38	1.092,32
4.	2016	14,71	4.223,9	24	325,66	9	4.549,56	17,98	1.990,34
5.	2017	19,13	5.961,7	24	459,64	8,53	6.421,36	17,65	2.848,78

Sumber : Hasil perhitungan peneliti

Setelah dilakukan perhitungan harga wajar saham dengan metode *discounted cash flow*, maka akan diketahui bagaimana kondisi harga saham perusahaan yang telah ditawarkan di Bursa Efek. Untuk mengetahui kondisi harga saham, diperlukan perbandingan antara harga wajar dari perhitungan metode *discounted cash flow* dengan harga pasar.

Adapun perbandingan antara perhitungan harga wajar dengan metode *discounted cash flow* dengan harga pasar saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk periode 2013-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2
 Perbandingan Harga Pasar Dengan Harga Wajar Saham BBTN Periode 2013-2017

TAHUN	HARGA PENUTUPAN	HARGA WAJAR	MARGIN OF SAFETY	KONDISI
2013	870	1.760,91	102,40%	<i>Undervalued</i>
2014	1.205	1.721,56	42,87%	<i>Undervalued</i>
2015	1.295	1.092,32	-15,65%	<i>Overvalued</i>
2016	1.740	1.990,34	14,39%	<i>Undervalued</i>
2017	3.570	2.848,78	-20,20%	<i>Overvalued</i>

Sumber : Hasil perhitungan peneliti

Berdasarkan tabel 2 perbandingan harga pasar dengan menggunakan harga penutupan per akhir Desember terhadap harga wajar saham pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Menurut hasil perhitungan *discounted cash flow* pada tahun 2013-2014 bersifat *undervalued* atau harga

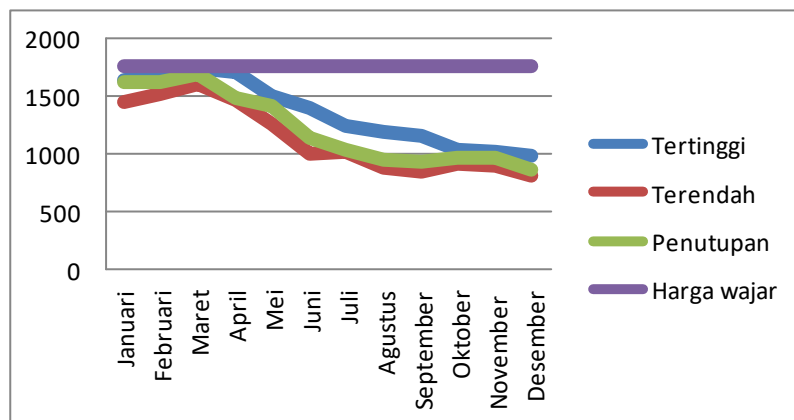
saham lebih rendah dari harga wajarnya, sedangkan pada tahun 2015 bersifat *overvalued* atau lebih tinggi dibandingkan harga wajarnya. Tahun 2016 harga saham bersifat *undervalued* namun pada tahun 2017 kembali bersifat *overvalued*.

Dari pendekatan metode *discounted cash flow*, bisa dilihat bahwa harga wajar saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk selama periode 2013-2017 cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali terjadi penurunan harga wajar pada tahun 2015 yang disebabkan oleh turunnya *earning per share* (EPS) pada tahun 2014, dimana laba bersih perusahaan turun sebesar -28,58% dari Rp. 1.562.161.000.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.115.592.000.000 pada tahun 2014.

Secara teori jika laba bersih suatu perusahaan menurun sedangkan jumlah saham beredar tetap atau bertambah, maka laba bersih per saham (*earning per share*) pun akan ikut turun. Jadi dalam hal ini, kenaikan dan penurunan laba bersih perusahaan akan sangat berkaitan dengan kenaikan dan penurunan EPS dan dalam metode *discounted cash flow*, pertumbuhan EPS menjadi salah satu faktor yang sangat penting sebagai indikator untuk memproyeksikan pertumbuhan EPS dimasa yang akan datang.

Dengan mengetahui harga wajar saham pada tahun suatu periode, investor bisa membuat keputusan untuk membeli atau menjual saham tersebut sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Sederhananya, ketika investor sudah mengetahui harga wajar suatu saham, selanjutnya adalah berusaha membeli saham tersebut dibawah nilai wajarnya dan menjual ketika mendekati atau melampaui harga wajarnya.

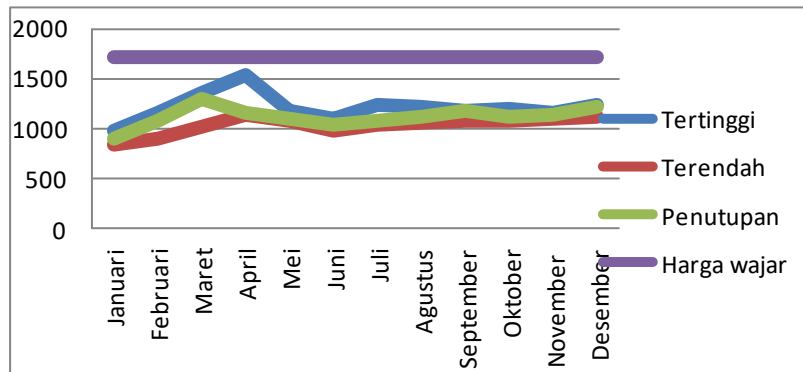
Analisis grafik harga saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk dibandingkan dengan harga wajarnya pada periode 2013-2017. Data yang disajikan adalah pergerakan harga saham secara bulanan dalam suatu periode.



Sumber : www.investing.com dan hasil perhitungan peneliti

Gambar 1. Pergerakan harga saham dan harga wajar BBTN 2013

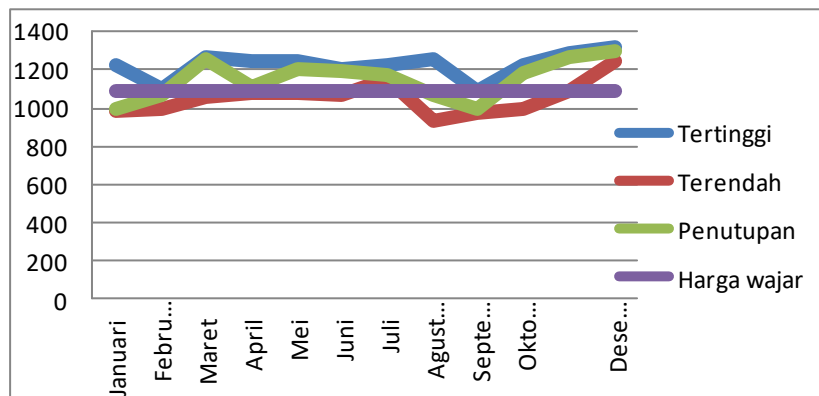
Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa harga wajar saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk pada tahun 2013 adalah 1.760,91 dan pada bulan Maret sempat mencapai harga tertinggi di level 1.740 atau hampir mendekati harga wajarnya.



Sumber : www.investing.com dan hasil perhitungan peneliti

Gambar 2. Pergerakan harga saham dan harga wajar BBTN 2014

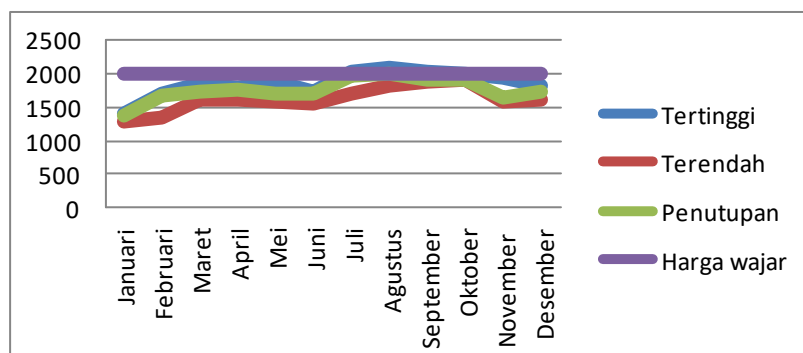
Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa harga wajar saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk pada tahun 2014 adalah 1.760,91 dan pada bulan Maret sempat mencapai harga tertinggi di level 1.525 atau hampir mendekati harga wajarnya.



Sumber : www.investing.com dan hasil perhitungan peneliti

Gambar 3. Pergerakan harga saham dan harga wajar BBTN 2015

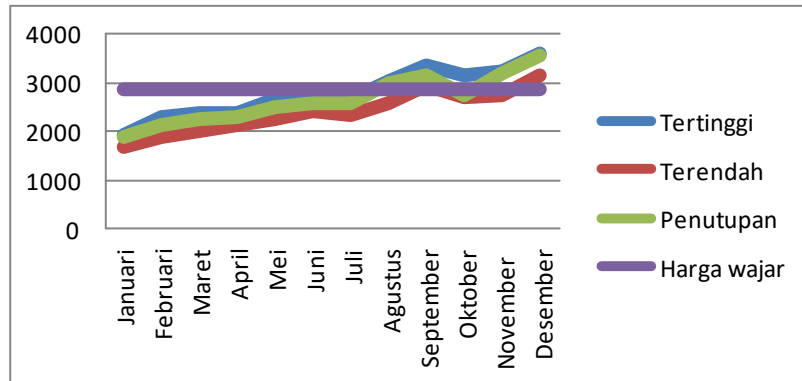
Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa harga wajar saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk pada tahun 2015 adalah 1.092,34 dan pada bulan Desember sempat mencapai harga tertinggi di level 1.315 atau telah mencapai dan melampaui harga wajarnya.



Sumber : www.investing.com dan hasil perhitungan peneliti

Gambar 4. Pergerakan harga saham dan harga wajar BBTN 2016

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa harga wajar saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk pada tahun 2016 adalah 1.990,34 dan pada bulan Agustus sempat mencapai harga tertinggi di level 2.100 atau telah mencapai dan melampaui harga wajarnya.



Sumber : www.investing.com dan hasil perhitungan peneliti

Gambar 5. Pergerakan harga saham dan harga wajar BBTN 2017

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa harga wajar saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk pada tahun 2017 adalah 2.848,78 dan pada bulan Desember sempat mencapai harga tertinggi di level 3.610 atau telah mencapai dan melampaui harga wajarnya.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka simpulannya adalah sebagai berikut: 1). Hasil perhitungan *discounted cash flow*, diperoleh harga wajar saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk pada tahun 2013 yaitu Rp. 1.760,91, tahun 2014 Rp. 1.721,56, tahun 2015 Rp. 1.092,32, tahun 2016 Rp. 1.990,34 dan tahun 2017 Rp. 2.848,78. Sedangkan harga pasar berdasarkan harga penutupan pada tahun 2013 yaitu Rp. 870, tahun 2014 Rp. 1.205, tahun 2015 Rp.1.295, tahun 2016 Rp.1.740 dan tahun 2017 Rp. 3.570, sehingga pada tahun 2013, 2014 dan 2016 harga saham bersifat *undervalued* sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 harga saham bersifat *overvalued*. 2). Hasil analisa menggunakan grafik pergerakan harga saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk periode 2013-2017, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2013 dan 2014 harga saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk hampir mendekati harga wajarnya, sedangkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 harga saham PT Bank Tabungan Negara, Tbk telah mencapai dan melampaui harga wajarnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Filbert, Ryan dan William Prasetya. 2017. *Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Hidayat, Teguh. 2017. *Value Investing : Beat the Market in Five Minutes!*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Masri, Zainal Arifin H. dan Abdul Azim Wahbi. 2017. *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Jakarta : Unindra Press.
- Moechdie, Abi Hurairah. 2012. *Gerbang Pintar Pasar Modal*. Jakarta: Capital Bridge Advisory.

- Siregar, William Ardian. 2018. *The Kingvestor : Bagaimana Memperoleh Keuntungan Lebih dari 100% Dalam Berinvestasi Saham*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wira, Desmond. 2014. *Buku Wajib Investor Saham : Analisis Fundamental Saham*. Jakarta : Exceed.

ANALISIS PDRB PROVINSI LAMPUNG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PDB NASIONAL PERIODE 2011-2015

Robist Hidayat

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: *robisth96@gmail.com*

Diterima: 02 September 2019; Direvisi: 11 November 2019; dipublikasikan: 21 Desember 2019

ABSTRACT

This study aims to analyze the gross regional domestic product in Lampung province. As for what is being analyzed is whether there is any influence from Lampung province's GRDP with the national GDP. With the data taken namely 5 years starting in 2011-2015. By using the literature review method and analyzing existing data, it continues to be developed into a new analysis by not ruling out existing methods. The results of this study are that the GDP of each province is different so it does not become a reference in the effect of national GDP in implication.

Keywords: GRDP Analysis, Lampung Province, National GDP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk domestik regional bruto di provinsi Lampung. Adapun yang dianalisis yakni apakah ada pengaruhnya dari PDRB provinsi Lampung dengan PDB nasional. Dengan data yang di ambil yakni 5 tahun dimulai tahun 2011-2015. Dengan menggunakan metode kajian pustaka da menganalisis data yang sudah ada terus dikembangkan menjadi sebuah analisis yang baru dengan tidak mengesampingkan kaedah-kaedah yang ada. Hasil dari penelitian ini yakni PDRB setiap provinsi berbeda beda sehingga tidak menjadi acuan dalam pengaruh PDB nasional secara implikasinya.

Kata kunci: Analisis PDRB, provinsi Lampung, PDB nasional

PENDAHULUAN

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi disuatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya (Haryanto, 2008). Selain itu PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa

yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Keadaan ekonomi daerah dapat terlihat dari PDRB tersebut, dimana PDRB dapat mencerminkan suatu kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah itu. Informasi ini sangat dibutuhkan sebagai bentuk dukungan di setiap kebijakan yang akan diambil oleh para pengambil keputusan mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi pencapaian pembangunan di suatu daerah. Penyusunan PDRB suatu daerah merupakan salah satu cara upaya daerah tersebut dalam memberikan informasi yang jelas tentang gambaran pembangunan, situasi, kondisi dan serta potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah tersebut. Dengan begitu maka daerah tersebut bisa berkembang dan maju sebagaimana apa yang diharapkan masyarakat.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDB menurut harga berlaku dan PDB menurut harga konstan. (bi.go.id, 2016).

Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan tahunan). 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) Jasa Perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya

2. Pendekatan Pengeluaran

(1). Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (2). Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (4) Pembentukan modal tetap domestik bruto (5). Perubahan inventori, (6) Ekspor Barang dan Jasa (7) Impor barang dan jasa

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung

lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Bi.go.id (2016)

Tabel 1.
 Jumlah kependudukan Provinsi Lampung 2011-2015
 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2011 - 2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Lampung Barat	77.159	78.232	79.318	80.418	81.532
2. Tanggamus	133.263	136.285	139.374	142.532	145.759
3. Lampung Selatan	236.003	240.916	245.927	251.039	256.255
4. Lampung Timur	256.238	259.884	263.578	267.321	271.113
5. Lampung Tengah	313.181	318.248	323.397	328.622	333.928
6. Lampung Utara	145.516	147.610	149.734	151.886	154.066
7. Way Kanan	107.342	109.748	112.205	114.716	117.282
8. Tulang Bawang	107.711	110.698	113.767	116.919	120.158
9. Pesawaran	101.338	103.285	105.267	107.286	109.342
10. Pringsewu	93.713	95.143	96.593	98.065	99.558
12. Mesuji	50.842	51.703	52.577	53.465	54.368
13. Tulang Bawang Barat	67.240	68.517	69.817	71.141	72.490
14. Pesisir Barat	33.070	33.748	34.439	35.144	35.863
15. Bandar Lampung	213.576	217.674	221.848	226.100	230.429
16. Metro	36.961	37.719	38.492	39.281	40.084
Lampung	1.973.153	2.009.410	2.046.333	2.083.935	2.122.227

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Dari tabel di atas bisa dikatakan bahwa setiap tahun kabupaten di provinsi Lampung mengalami pertumbuhan jumlah yang cukup signifikan, misalkan sebagai contoh kota Bandar Lampung, di tahun 2011 sebanyak 213.576 rumah tangga hingga tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni mencapai 230.429 ini membuktikan selama 5 tahun kota Bandar Lampung mengalami kenaikan sebanyak 16.853 rumah tangga.

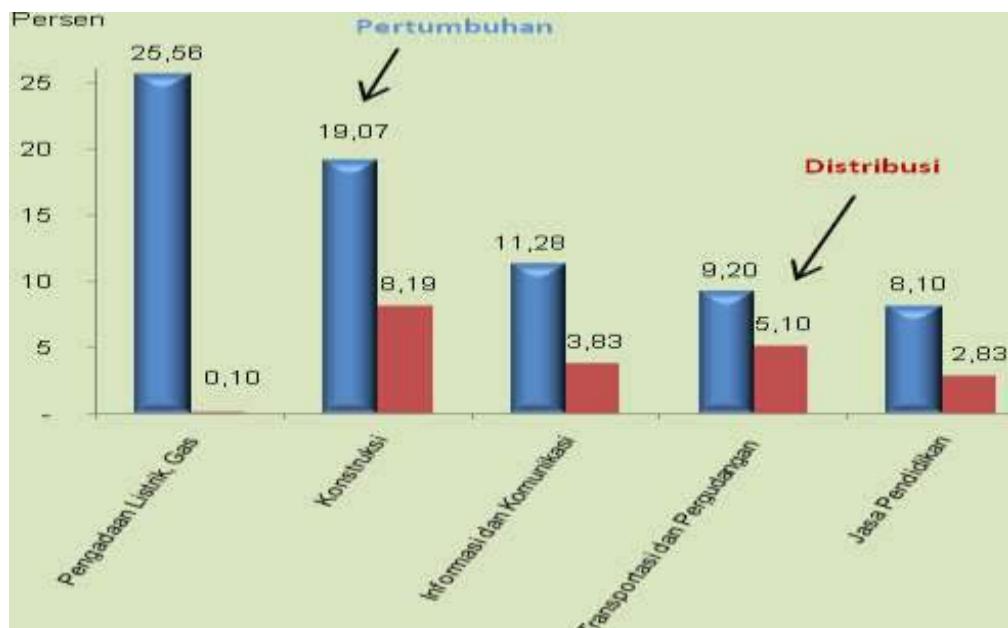
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tri-Wulan 2016

Perekonomian Lampung triwulan I-2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 66,66 triliun, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 51,06 triliun. Ekonomi Lampung triwulan I-2016 tumbuh 5,05 persen menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (y on y) sebesar 4,91

persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,99 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,61 persen dan pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,33 persen. Ekonomi Lampung triwulan I-2016 mengalami peningkatan 6,51 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, beberapa komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura mulai memasuki masa panen, sehingga mengalami pertumbuhan ekspansif 38,11 persen. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Sumatera triwulan I-2016 tumbuh sebesar 4,18 persen dan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Sumatra Barat yang tumbuh 5,48 persen (Berita Resmi Statistik No.09/05/18/Th.XVII, 4 Mei 2016 3)

PDRB menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2016 Terhadap Triwulan I-2015 (y-on-y) Pada triwulan I-perekonomi Lampung tumbuh 5,05 persen bila dibandingkan triwulan I-2015 (y-on-y). Pertumbuhan meningkat didukung oleh seluruh lapangan usaha. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 25,56 persen, diikuti Konstruksi sebesar 19,07 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 11,28 persen. Struktur perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I-2016 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (33,90 persen); Industri Pengolahan (17,81 persen); serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,72 persen).

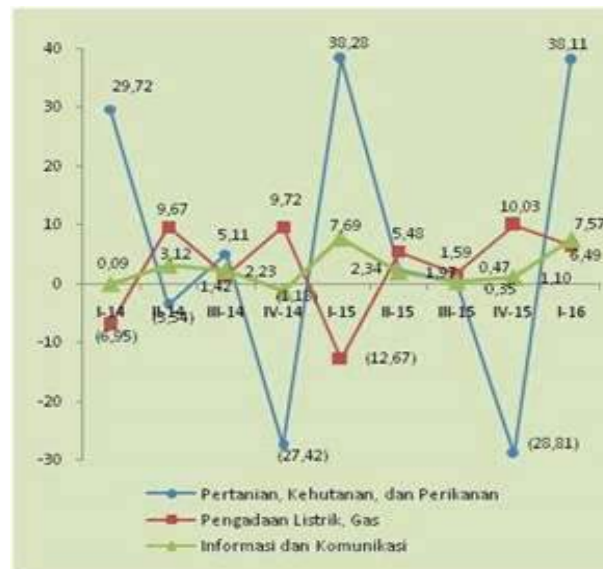


Grafik 1. Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha 2016 Perikanan



Grafik 2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2016 (y on y), Konstruksi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,44 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil- Sepeda Motor, serta Industri Pengolahan yang masing- masing tumbuh 0,6 persen



Grafik 3. Pertumbuhan PDRB q to q Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I-2016 (q to q) diwarnai oleh faktor musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh ekspansif sebesar 38,11 persen. Hal ini didorong oleh efek musiman beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seperti padi, dan jagung yang memasuki musim panen raya dan hasil panen meningkat dari sebelumnya. Pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya, seperti Informasi dan Komunikasi sebesar 7,57 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar

6,49 persen. Hal ini menyebabkan ekonomi Lampung tumbuh positif 6,51 persen pada triwulan I-2016 dibanding triwulan sebelumnya. Meskipun juga ada beberapa lapangan usaha berkontribusi besar yang mengalami kontraksi, seperti Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor.

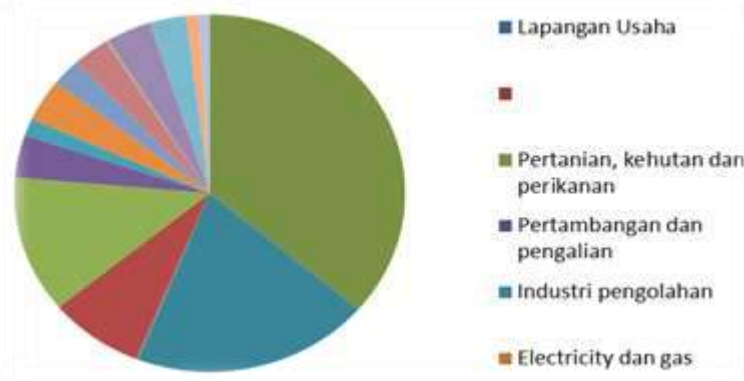
PDRB Provinsi Lampung periode 2011-2015

PDRB Provinsi Lampung periode 2011-2015 menggunakan pendekatan PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha. Data bersumber dari website resmi BPS Provinsi Lampung.

Tabel 2
 PDRB Lampung atas Dasar Harga berlaku menurut Lapangan Usaha
 Periode 2011-2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Total 2011-2015
Pertanian, kehutan dan perikanan	34.627.543.746
Pertambangan dan pengalihan	5,041.915.038
Industri pengolahan	18.857.489.009
Electricity dan gas	72.478.070
Pengadaan air, pengolaan sampah dan lainnya	107.790.297
Kontruksi	7.521.423.574
Perdagangan besar dan reparasi kendaraan	11.829.416.498
Transportasi dan pergudangan	3.691.631.902
Penyedia akomodasi makan dan minum	1.473.652.676
Informasi dan komunikasi	3.653.639.491
Jasa keuangan dan asuransi	2.335.036.754
Real estat	2.930.939.642
Jasa perusahaan	147.699.731
Administrasi pemerintah dan lainnya	3.567.558.981
Jasa pendidikan	2.909.196.968
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	978.219.407
Jasa lainnya	863.838.184
PDRB	104.592.942.332

Adapun analisis yang dapat dibuat jika dilihat dari tabel tersebut yakni, provinsi lampung mempunyai potensi pertanian , kehutanan dan perikanan yang besar dimana hal tersebut menyumbngag pendapatan sebesar 34.627.543.746. ini membuktikan bahwa didaerah provinsi lampung tersebut lebih kecenderuagan terhadap hasil alam. Dan ini merupakan faktor terbesar yang dimiliki oleh provinsi lampung. Kemudian setelah pertanian,kehutanan dan perikanan diikuti oleh industri pengolahan sebesar 18.857.489.009. faktor pendapatan terbesar kedua yakni idstri pengolahan tidak dipungkiri bahwa lampung merupaka salah satu provinsi tujuan banyak didirikan industri baik secara lokal maupun nasinla karena itu menyumbngakkan pendapatan sebesar kedua setelah pertanian dan selanjutnya bisa dilohat ditabel diatas. Dengan hasil tersebut dalam jangka waktu dari tahun 2011-2015 PDRB ynag didapati oleh provinsi lampung dari 17 item harga berlaku lapangan usaha maka didapati PDRB ecara keseluruhan yakni sebesar 104.592.942.332.



Grafik 4. PDRB Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2015 (Juta Rupiah)

Dari grafik diatas punsudah terlihat bahwa sektor pertanian,kehutanan dan perikaana merupakan penyumbang terbesar dalam hal PDRB provinsi lampung kemudian diikuti oleh sektor yang lain yang saling menunjang.

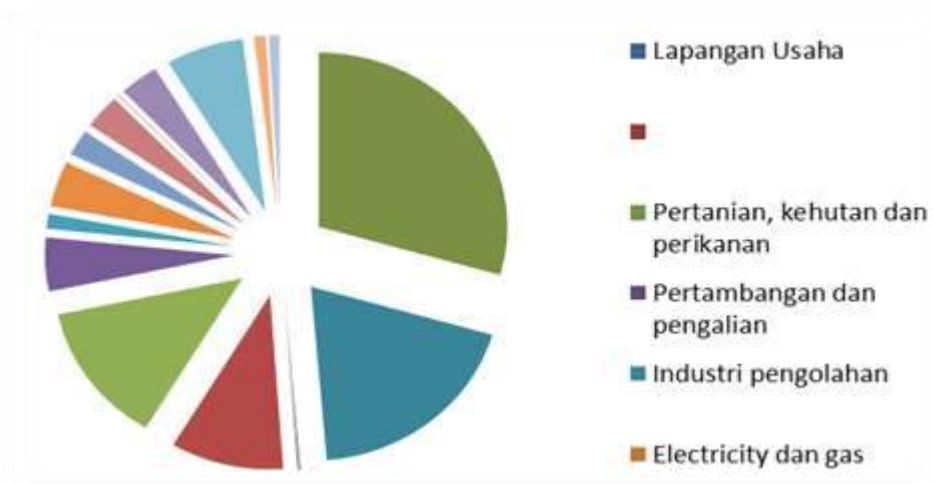
Tabel 3.

PDRB Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2015 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Total 2011-2015
Pertanian, kehutan dan perikanan	24.279.109.351
Pertambangan dan pengalihan	5.521.839.362
Industri pengolahan	15.812.507.952
Electricity dan gas	88.193.970
Pengadaan air,pengolaan sampah dan lainnya	94.035.570
Kontruksi	7.983.996.229
Perdagangan besar dan reparasi kendaraan	10.789.959.158
Transportasi dan pergudangan	4.111.827.110
Penyedia akomodasi makan dan minum	1.134.823.507
Informasi dan komunikasi	3.490.390.926
Jasa keuangan dan asuransi	1.980.140.100
Real estat	2.625.001.462
Jasa perusahaan	120.349.567
Administrasi pemerintah dan lainnya	2.792.407.542
Jasa pendidikan	5.502.503.559
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	837.257.084
Jasa lainnya	756.699.058
PDRB	243.814.213.495

Adapun analisis yang dapat dibuat jika dilihat dari tabel tersebut yakni, provinsi lampung mempunyai potensi pertanian , kehutanan dan perikana yang besar dimana hal tersebut menyumbng pendapatan sebesar 24.279.109.351ini membuktikan bahwa didaerah provinsi lampung tersebut lebih kecenderuagan terhadap hasil alam. Dan ini merupakan faktor terbesar yang dimiliki oleh provinsi lampung. Kemudian setelah pertanian,kehutanan dan perikanan diikuti oleh industri pengolahan sebesar 15.812.507.952, faktor pendapatan terbesar kedua yakni industri pengolahan tidak dipungkiri bahwa lampung merupakan salah satu provinsi

tujuan banyak didirikan industri baik secara lokal maupun nasional karena itu menyumbangkan pendapatan sebesar kedua setelah pertanian dan selanjutnya bisa dilihat di tabel di atas. Dengan hasil tersebut dalam jangka waktu dari tahun 2011-2015 PDRB yang didapatkan oleh provinsi Lampung dari 17 item harga konstan lapangan usaha maka didapatkan PDRB secara keseluruhan yakni sebesar 243.814.213.495 jika menilik dari harga berlaku maka PDRBnya lebih besar dibandingkan oleh harga berlaku dengan begini maka hasil dari hasil konstan lebih besar dari hasil berlaku. Namun dari segi urutan terbesar tetap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mempunyai peranan vital untuk provinsi Lampung, karena merupakan pendapatan terbesar di provinsi tersebut.



Grafik 5. PDRB Lampung Atas Dasar Harga konstan Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2015 (juta rupiah)

Dari grafik di atas pun sudah terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar dalam hal PDRB provinsi Lampung kemudian diikuti oleh sektor yang lain yang saling menunjang. Hal ini sama persis seperti harga berlaku tadi cuman yang membedakan yakni angka disetiap item nya dimana PDRB di harga konstan lebih besar jika dibandingkan dengan harga berlaku. Dan hasil dari grafik pun berupa walaupun posisi item seperti pertanian, kehutanan dan perikanan tetaplah terbesar dalam sektor penyumbang bagi provinsi Lampung.

Tabel 4
 PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2015 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**
1. Pertanian, Peternakan,	315 036,8	328 279,7	339 560,8	350 722,2
2. Kehutanan dan Perikanan				
a. Tanaman Bahan Makanan	154 153,9	158 910,1	161 925,5	164 082,6
b. Tanaman Perkebunan	49 260,4	52 325,4	54 629,3	57 245,7
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	40 040,3	41 918,6	43 902,3	45 960,1
d. Kehutanan	17 395,5	17 423,0	17 442,5	17 476,3
e. Perikanan	54 186,7	57 702,6	61 661,2	65 957,5
	0	0	0	0

3. Pertambangan dan Penggalian	190 143,2	193 139,2	195 853,2	195 425,0
a. Minyak dan gas bumi	95 155,2	91 691,1	88 789,1	86 477,6
b. Pertambangan tanpa Migas.	70 814,4	75 473,0	79 470,0	79 620,1
c. Penggalian.	24 173,6	25 975,1	27 594,1	29 327,3
	0	0	0	0
4. Industri Pengolahan	633 781,9	670 190,6	707 481,7	741 835,7
a. Industri Migas	46 757,8	45 450,6	44 651,3	43 639,9
1). Pengilangan Minyak Bumi	21 459,7	21 046,5	21 286,5	21 566,5
2). Gas Alam Cair	25 298,1	24 404,1	23 364,8	22 073,4
b. Industri tanpa Migas	587 024,1	624 740,0	662 830,4	698 195,8
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	174 566,7	187 787,0	194 063,0	208 105,4
2). Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	56 131,1	58 527,1	62 076,7	63 536,2
3). Brg. Kayu & Hasil hutan lainnya.	19 427,4	18 817,8	19 980,8	21 446,3
4). Kertas dan Barang cetakan	27 930,3	26 603,5	27 786,1	29 494,6
5). Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	75 657,5	83 598,2	85 449,3	86 530,8
6). Semen & Brg. Galian bukan logam	17 424,1	18 783,4	19 346,5	19 640,3
7). Logam Dasar Besi & Baja	8 915,2	9 437,4	10 091,1	10 515,8
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya	202 892,0	217 152,1	240 031,6	254 564,1
9). Barang lainnya	4 079,8	4 033,5	4 005,3	4 362,3
	0	0	0	0
5. Listrik, Gas, dan Air Bersih	18 899,7	20 094,0	21 254,8	22 423,5
a. Listrik	11 959,6	12 970,9	14 006,2	14 872,1
b. Gas Kota	4 583,9	4 696,4	4 763,7	5 010,0
c. Air bersih	2 356,2	2 426,7	2 484,9	2 541,4
	0	0	0	0
6. Bangunan	159 122,9	170 884,8	182 117,9	194 093,4
0				
7. Perdagangan, Hotel dan Restoran	437 472,9	473 152,6	501 040,6	524 309,5
a. Perdagangan Besar dan Eceran	364 472,1	396 116,0	419 251,1	437 784,4
b. Hotel	17 868,6	19 577,5	21 321,5	23 059,0
c. Restoran	55 132,2	57 459,1	60 468,0	63 466,1
	0	0	0	0
8. Pengangkutan dan Komunikasi	241 303,0	265 383,7	291 404,0	318 527,9
a. Pengangkutan	91 846,8	97 878,8	104 787,7	112 570,7
1). Angkutan Rel	798,8	745,5	765,7	926,5
2). Angkutan Jalan raya	38 339,3	41 071,0	44 282,6	47 705,9
3). Angkutan laut	9 157,2	9 547,9	10 128,9	10 832,6

4). Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	3 083,5	3 288,9	3 518,1	3 758,2
5). Angkutan Udara	19 815,7	21 460,7	22 701,3	24 237,8
6). Jasa Penunjang Angkutan	20 652,3	21 764,8	23 391,1	25 109,7
b. Komunikasi	149 456,2	167 504,9	186 616,3	205 957,2
	0	0	0	0
9. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	236 146,6	253 000,4	272 141,6	288 351,0
a. Bank	96 393,1	104 391,0	113 983,6	119 372,3
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	20 745,1	22 200,5	23 769,5	25 574,0
c. Jasa Penunjang Keuangan	1 627,2	1 729,8	1 818,0	1 889,9
d. Sewa Bangunan	71 760,2	76 100,3	80 684,7	84 882,0
e. Jasa Perusahaan	45 621,0	48 578,8	51 885,8	56 632,8
	0	0	0	0
10. Jasa – Jasa	232 659,1	244 807,0	258 198,4	273 493,3
a. Pemerintahan Umum	97 806,0	99 590,9	101 031,8	102 272,1
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	61 510,9	62 553,2	63 407,2	64 178,4
2). Jasa Pemerintahan lainnya	36 295,1	37 037,7	37 624,6	38 093,7
b. Swasta	134 853,1	145 216,1	157 166,6	171 221,2
1). Sosial Kemasyarakatan	33 800,1	36 229,1	38 872,3	41 989,7
2). Hiburan dan Rekreasi	10 461,7	11 271,5	12 270,4	13 371,4
3). Perorangan dan Rumah tangga	90 591,3	97 715,5	106 023,9	115 860,1
	0	0	0	0
Produk Domestik Bruto	2 464 566,1	2 618 932,0	2 769 053,0	2 909 181,5
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	2 322 653,1	2 481 790,3	2 635 612,6	2 779 064,0

Adapun ada hubungan antara PDRB provinsi lampung dengan PDB nasional yakni: PDRB Provinsi Lampung harga konstan didapati sebesar 243.814.213.495 (juta rupiah) dihitung dari tahun 2011-2015 sedangkan PDB Nasional sebesar 104.617.326 (miliar rupiah) dari tahun 2011-2014 (- tahun 2015) hal ini jika dilihat dari hasilnya maka PDRB lampung sekitaran 5% dari PDB Nasional.

Tabel 5
PDB Nasional atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Periode 2011-2015 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**
1. Pertanian, Peternakan,	1091447,1	1193452,9	1310427,3	1446722,3
2. Kehutanan Dan Perikanan	0	0	0	0
a. Tanaman Bahan Makanan	529967,8	574916,3	621832,7	668337,7
b. Tanaman Perkebunan	153709,3	162542,6	174638,4	192921,5
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	129297,7	145720	165162,9	184246,5

d. Kehutanan	51781,3	54906,5	56994,2	60872,8
e. Perikanan	226691	255367,5	291799,1	340343,8
	0	0	0	0
3. Pertambangan dan Penggalian	876983,8	972458,4	1026297	1058750,2
a. Minyak dan gas bumi	370222,9	386560,2	401139,1	413105,2
b. Pertambangan tanpa Migas.	397629,1	461651	482823,2	480081,2
c. Penggalian.	109131,8	124247,2	142334,7	165563,8
	0	0	0	0
4. Industri Pengolahan	1806140,5	1972523,6	2152802,8	2394004,9
a. Industri M i g a s	253078,6	254556,7	267003,5	290286,4
1) Pengilangan Minyak Bumi	131482,3	130273,6	144769,7	161457,8
2) Gas Alam Cair	121596,3	124283,1	122233,8	128828,6
b. Industri tanpa Migas	1553061,9	1717966,9	1885799,3	2103718,5
1) Makanan, Minuman dan Tembakau	546752	623194,6	674269,4	776857,7
2) Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki	143385,2	156634,1	172422,5	186355,1
3) Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.	84481,4	85495,4	94651,1	106839,6
4) Kertas dan Barang cetakan	69339,6	67109,5	72781,3	80600,9
5) Pupuk, Kimia & Barang dari karet	189700	216863,8	230236,1	242599,1
6) Semen & Brg. Galian bukan logam	50790,5	57996,3	63973,8	67933,8
7) Logam Dasar Besi & Baja	31101,1	33212,7	35746,1	38615,3
8) Alat Angk., Mesin & Peralatannya	426233,7	465889,1	529828,8	590282
9) Barang lainnya	11278,4	11571,4	11890,2	13635
	0	0	0	0
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	55882,3	62271,6	70339,6	81131
a. Listrik	35443,1	39377,6	46521,5	54730,7
b. Gas Kota	14833,9	16906,7	17379,8	19456,6
c. Air bersih	5605,3	5987,3	6438,3	6943,7
	0	0	0	0
5. Bangunan	753554,6	844090,9	907267	1014540,8
	0	0	0	0
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1023724,8	1148791	1301175	1473559,7
a. Perdagangan Besar dan Eceran	827456,5	929746,1	1052709,3	1191231,4
b. Hotel	26560,5	32276,6	39453,6	46970,2
c. Restoran	169707,8	186768,3	209012,1	235358,1
	0	0	0	0
7. Pengangkutan dan Komunikasi	491287	549105,4	635302,9	745648,2
a. P e n g a n g k u t a n	254524,2	287346,1	344485,8	425179
1) Angkutan Rel	2367,1	2478,3	2687,2	3626,4

2) Angkutan Jalan raya	140603,6	152548,2	184216,1	220916,9
3) Angkutan laut	18589,9	19661,8	21656,3	25419,5
4) Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	7646,2	8765,7	10675,9	12543,2
5) Angkutan Udara	46701,8	62153,3	79038,2	111231,8
6) Jasa Penunjang Angkutan	38615,6	41738,8	46212,1	51441,2
b. Komunikasi	236762,8	261759,3	290817,1	320469,2
	0	0	0	0
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	535152,9	598433,3	682973,2	771961,5
a. Bank	166489,8	191095	224972,7	252216,3
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	70576,4	79807,1	90870,8	103994,7
c. Jasa Penunjang Keuangan	4075,8	4582,2	5117,1	5662,5
d. Sewa Bangunan	191928,5	209521,8	232221,7	258868,5
e. Jasa Perusahaan	102082,4	113427,2	129790,9	151219,5
	0	0	0	0
9. Jasa – Jasa	785014,1	889798,8	1000691,7	1108610,3
a. Pemerintahan Umum	433370,9	486315,2	541191,3	579981,2
1) Adm. Pemerintahan & Pertahanan	266410,1	300520,4	333960,9	358608,7
2) Jasa Pemerintahan lainnya	166960,8	185794,8	207230,4	221372,5
b. Swasta	351643,2	403483,6	459500,4	528629,1
1) Sosial Masyarakat	135184,9	159177,1	185103,2	215684
2) Hiburan dan Rekreasi	20455,7	23069,3	26483,8	31351,5
3) Perorangan dan Rumah tangga	196002,6	221237,2	247913,4	281593,6
	0	0	0	0
Produk Domestik Bruto	7419187,1	8230925,9	9087276,5	10094928,9
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	6795885,6	7589809	8419133,9	9391537,3
Catatan:				
* Angka Sementara				
** Angka Sangat Sementara				

Adapun ada hubungan antara PDRB Provinsi Lampung dengan PDB Nasional yakni: PDRB Provinsi Lampung harga berlaku didapati sebesar 104.592.942.332 (juta rupiah) dihitung dari tahun 2011-2015 sedangkan PDB Nasional sebesar 348.323.184 (miliar rupiah) dari tahun 2011-2014 (- tahun 2015) hal ini jika dilihat dari hasilnya maka PDRB lampung sekitaran 5% dari PDB Nasional

Berdasarkan dari pemaparan data yang di dapati bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar PDRBnya di karenakan letak geografis yang sangat strategis sebagai pintu utama perdagangan serta perekonomian antara pulau jawa sebagai pusat utama ekonomi Indonesia dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa ada Provinsi lain yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan rentan penelitian Provinsi yang lebih banyak tidak hanya satu saja.

SIMPULAN

1. Provinsi Lampung mempunyai potensi pertanian, kehutanan dan perikanan yang besar dimana hal tersebut menyumbang pendapatan sebesar 24.279.109.351 ini membuktikan bahwa di daerah provinsi Lampung tersebut lebih kecenderungan terhadap hasil alam. Dan ini merupakan faktor terbesar yang dimiliki oleh provinsi Lampung. Kemudian setelah pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti oleh industri pengolahan sebesar 15.812.507.952 faktor pendapatan terbesar kedua yakni industri pengolahan tidak dipungkiri bahwa Lampung merupakan salah satu provinsi tujuan banyak didirikan industri baik secara lokal maupun nasional karena itu menyumbangkan pendapatan sebesar kedua setelah pertanian dan selanjutnya bisa dilihat di tabel di atas. Dengan hasil tersebut dalam jangka waktu dari tahun 2011-2015 PDRB yang didapat oleh provinsi Lampung dari 17 item harga konstan lapangan usaha maka didapat PDRB secara keseluruhan yakni sebesar 243.814.213.495
2. Jika dilihat dari grafik bahwa potensi besar penyumbang PDRB Lampung yakni sektor pertanian dan industri hal ini yang membuat provinsi Lampung mempunyai potensi potensial di sektor tersebut.
3. Dari hasil analisis PDRB provinsi Lampung dengan PDB nasional, maka potensi PDRB Lampung cukup besar yakni sekitaran 3% pertahunnya

DAFTAR RUJUKAN

- BPS. 2011. Lampung dalam Angka 2011. Jakarta
_____. 2012. Lampung dalam Angka 2012. Jakarta
_____. 2013. Lampung dalam Angka 2013. Jakarta
_____. 2014. Lampung dalam Angka 2014. Jakarta
_____. 2015. Lampung dalam Angka 2015. Jakarta
_____. 2016. Lampung dalam Angka 2016. Jakarta
- Rino, Haryanto. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Sukirno, Sadono.
- Tri, Wahyuni Krismanti. 2009. *Analisis pengaruh infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap produktivitas ekonomi di Indonesia*, fakultas ekonomi dan manajemen. departement ilmu ekonomi, Institut Pertanian Bogor
- Wahyunairti et al, 2006. *dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan penduduk miskin*. MB-IPB
www.bi.go.id

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ATAS PEMBERLAKUAN
PP 23 2018 DIBANDINGKAN DENGAN PP 46 2013
(Studi Kasus UMKM Binaan ZAF Internasional)****Tjipto Djuhartono¹⁾, Ai Annisaa Utami²⁾, Zahrudin³⁾**Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI
Email: *aiannisaa87@gmail.com*

Diterima: 02 September 2019; Direvisi: 11 November 2019; dipublikasikan: 21 Desember 2019

ABSTRACT

The government has been working synergistically lately to encourage tax revenue from the MSME sector by issuing various tax regulations that are pro to MSME needs, including by issuing PP number 23 of 2018. This PP is a revision of the previous PP issuance namely PP number 46 of 2013 with an original tariff of 1% of the value. The research aims to reveal tax compliance with the changes in government regulations conducted by the SMEs in the City of Depok, which is a ZAF International-guided SMEs. The research method uses a survey of MSMEs in Depok City. The sampling technique in this study uses purposive sampling for the UMKM Depok region and is under the auspices of ZAF International. The data analysis method uses FGD with a qualitative approach, the results of this study indicate that the level of compliance of ZAF-assisted MSMEs before and after the enactment of PP 23 of 2018 is getting better and increasing because it is driven by a socialization program carried out by the government.

Keyword : *SMEs , Tax Compliance, PP number 23 of 2018***ABSTRAK**

Pemerintah akhir-akhir ini berupaya secara sinergis untuk mendorong penerimaan pajak dari sector UMKM dengan menerbitkan berbagai aturan perpajakan yang pro terhadap kebutuhan UMKM, diantaranya dengan di terbitkan PP nomor 23 tahun 2018. PP ini merupakan revisi atas penerbitan PP sebelumnya yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan tariff asal 1 % dari nilai. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kepatuhan pajak terhadap perubahan peraturan pemerintah tersebut yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Depok yang merupakan UMKM binaan ZAF Internasional. Metode penelitian menggunakan survey terhadap UMKM yang terdapat di Kota Depok. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk UMKM wilayah Depok dan merupakan binaan ZAF Internasional. Metode analisis data menggunakan FGD dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM binaan ZAF sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 23 tahun 2018 semakin baik dan meningkat karena di dorong oleh program sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah.

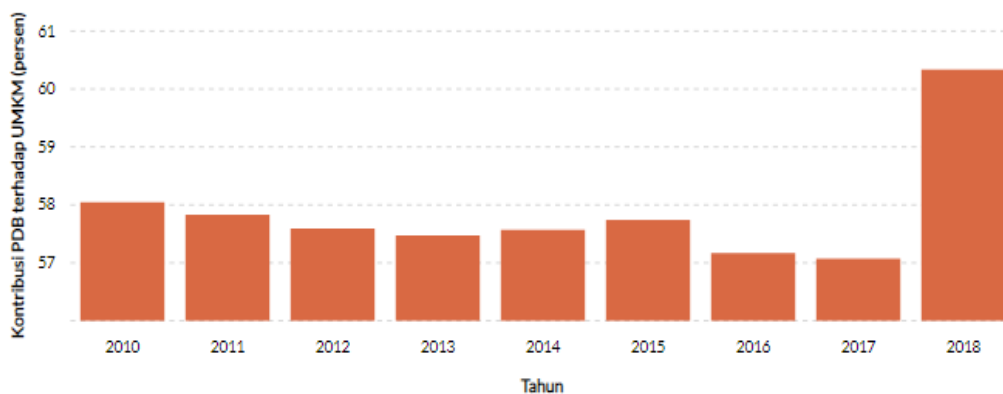
Kata Kunci: *UMKM, Kepatuhan Pajak, PP No 23 Tahun 2018*

PENDAHULUAN

Departemen Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak, secara sinergis bersama pemerintah melakukan pembaharuan terkait dengan peraturan perpajakan yang khusus diberlakukan untuk UMKM. Kebijakan tersebut adalah perubahan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018, hal utama dalam perubahan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penurunan tarif pajak untuk UMKM dengan DPP (Dasar Penerimaan Pajak) yang tetap yaitu 1 % dari total omzet berubah menjadi 0,5 % dari total omzet

Berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi yang cukup dominan untuk angka produk domestic bruto selama periode 2010 sampai dengan periode 2018. Pada delapan tahun tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang disumbangkan oleh sector UMKM pada angka Produk Domestik Bruto selalu di atas 50 %, artinya melebihi separoh dari total produk domestic bruto secara nasional. Perhatikan gambar di bawah ini, secara konsisten kontribusi pajak UMKM untuk PDB selalu tinggi melebihi 50 % dari total PDB Nasional. Berdasarkan gambar di bawah ini, tahun 2018 memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sekitar 60,34 %.Padahal sebelumnya tercatat bahwa kontribusi UMKM terhadap nilai PDB tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 57,08 %, artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 3,26 % dari sejak tahun 2017 sampai tahun 2018.

Gambar 1
 Kontribusi UMKM terhadap Nilai PDB Tahun 2010 -2018



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Angka yang dihasilkan pajak sector UMKM untuk perekonomian nasional tersebut, seharusnya berimplikasi pada peningkatan jumlah pendapatan dan penerimaan Negara melalui sector pajak UMKM, ironinya bahwa jumlah penerimaan pajak nasional selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 membuktikan bahwa jumlah penerimaan pajak yang dominan adalah sector lain, bukan sector UMKM. Fakta lain juga membuktikan pada tahun 2015 total penerimaan pajak dari sector UMKM hanya sebesar 0,5% dari keseluruhan penerimaan pajak secara nasional yaitu sebesar Rp.2,81 triliun dari total Rp. 565,77 triliun. Angka pada nilai APBN tahun 2018 juga menunjukkan hal yang sama, sebagian besar realisasi target nilai APBN yang paling dominan dari sector usaha besar, bukan dari UMKM.

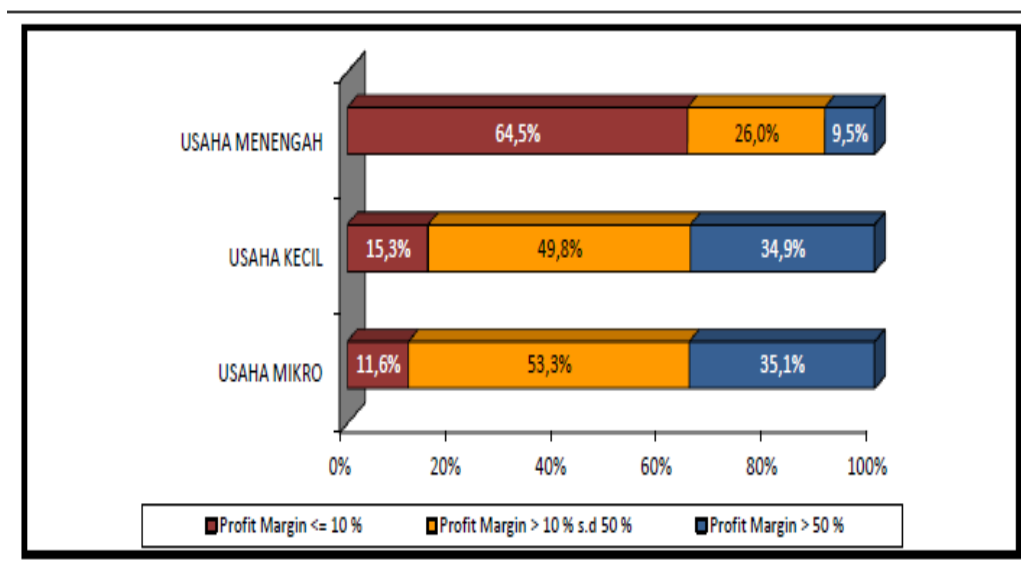
Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela yang dilakukan oleh pelaku UMKM, pemerintah telah membuat revisi peraturan perpajakan untuk UMKM yaitu pengurangan tariff dari 1 % yang menggunakan aturan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi tariff 0,5% berdasarkan peraturan baru yaitu PP Nomor 23 tahun 2018. Pengurangan tariff ini membuktikan bahwa pemerintah konsisten dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak dari sector UMKM. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mulai diberlakukan pada

tanggal 1 Juli tahun 2018, peraturan ini dibuat untuk merevisi beberapa peraturan lama yang memiliki kekurangan dan perlu di adakan penyesuaian dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal utama yang di revisi adalah penurunan tariff yang cukup besar senilai 0,5 %.

Studi ini merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program UMKM taat dalam membayar pajak. Efek dari perubahan tariff pajak UMKM menjadi semakin rendah menjadi 0,5 % diduga memiliki Efek domino *voluntary tax compliance* UMKM karena kana memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan Negara.

Beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat ketaatan UMKM untuk membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan sebaran profit margin. Berdasarkan informasi nilai profit margin untuk UMKM diperoleh bahwa jumlah sebaran profit margin untuk usaha menengah, usaha kecil maupun mikro terdapat perbedaan yang signifikan, perhatikan gambar di bawah ini pada sector usaha menengah yang merupakan dominan dari populasi yaitu sebesar 64,5 % hanya memiliki profit margin yang sangat rendah yaitu kurang dari 10 %, sisanya sekitar 26 % dari total populasi memiliki nilai profit margin yang berkisar antara 10 % sampai dengan 50 % dan hanya sebagian kecil yang memiliki nilai profit margin diatas 50 % untuk sector usaha menengah yaitu hanya sekitar 9,5 % dari total populasi. Hal lain yang bisa kita ungkap dari gambar tersebut adalah untuk usaha sector kecil dan mikro. Sebaran profit margin untuk usaha kecil 49,8 % dari populasi memiliki nilai profit margin 10 % s/d 50 %, dan nilai profit margin yang di atas 50 % sebanyak 34,9 % sisanya hanya sekitar 15,3% dari usaha kecil yang memiliki jumlah profit margin di bawah nilai 10 %.

Gambar 2
 Nilai sebaran jumlah profit margin UMKM



Sumber : Bank Indonesia 2018

Berdasarkan informasi diatas, sehingga penerapan *single tarif* (tanpa melihat sektoral) adalah dimungkinkan dapat dilaksanakan, namun faktanya serapan jumlah pajak dari sector UMKM belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Kajian ini akan semakin menarik karena kebijakan yang diberlakukan pemerintah menurunkan tarif diasumsikan akan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak terutama pajak penghasilann yang dihasilkan oleh UMKM. Saat ini pemerintah sangat serius dalam mendongkrak penerimaan Negara dari

berbagai sector, terutama sector perpajakan. Penelitian ini menguji angka-angka kuantitatif berdasarkan pendekatan kualitatif terhadap beberapa UMKM di Depok yang merupakan binaan ZAF internasional.

Perkembangan UMKM semakin meningkat, tidak terkecuali untuk daerah Kota Depok. Kontribusi UMKM terhadap nilai PDRB kota Depok selama tahun 2018 meningkat menjadi 65 % dari total penerimaan PDRB, sedangkan 35 % berasal dari usaha lainnya

Penelitian ini difokuskan menganalisis sejumlah UMKM yang terdapat di Kota Depok terkait dengan isu penerapan PPH untuk Badan Usaha Tetap berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Pemilihan kota Depok sebagai objek penelitian berdasar pertimbangan bahwa perkembangan ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Depok memiliki trend yang positif dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, selain UMKM yang dipilih lebih spesifik mengarah pada UMKM Binaan ZAF Konsulting karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Kepatuhan pajak UMKM saat di uji membutuhkan informasi laporan keuangan. UMKM binaan ZAF Konsulting data-data laporan keuangan perusahaan yang bersifat rahasia, telah tersedia
2. ZAF internasional merupakan lembaga konsultan pajak yang menaungi banyak UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar
3. ZAF internasional selain konsultan pajak juga merupakan konsultan pendidikan yang serius memberikan edukasi pada UMKM binaannya terkait dengan perubahan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018

Penelitian ini merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program UMKM taat dalam membayar pajak. Efek domino dari *voluntary tax compliance* UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan Negara setelah ada perubahan Undang-Undang untuk tariff perpajakan sector UMKM dari tariff 1 % menjadi 0,5%.

Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. UMKM dapat di klasifikasikan menjadi 3 bagian berdasarkan nilai aktiva dan jumlah omzet sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

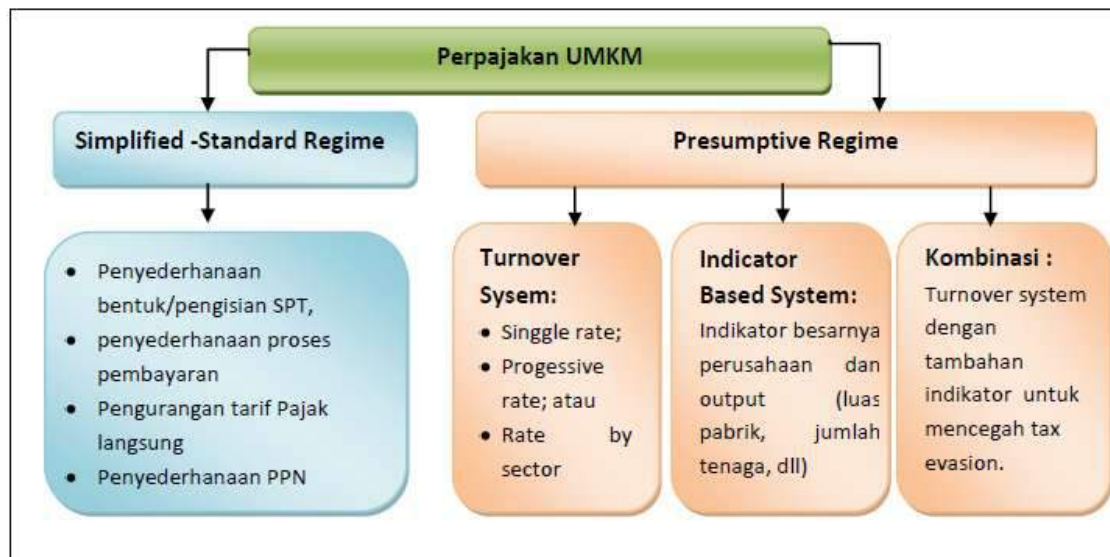
Tabel 1. Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	50 juta -500 juta	300 juta- 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	500 juta- 10 Miliar.	2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM

Model Perpajakan UMKM

Untuk UMKM, secara global model perpajakan yang dapat di terapkan terdiri dari dua model utama, yaitu model system standard regime dan model system presumptive regime. Dalam model standard regime tidak ada perlakuan yang berbeda untuk sector UMKM dalam hal utang pajak pada fiskus, artinya setiap wajib pajak dalam sector UMKM di asumsi kan memiliki keterampilan yang mumpuni dalam proses pembukuan keuangan perusahaan, selain itu model ini diberlakukan oleh sebagian besar Negara-negara maju dengan beberapa modifikasi penyederhaan bentuk formulir, system pembayaran, dan aplikasi pengurangan tariff (Wishon, K., (1985).



Sumber: disarikan dari World Bank¹.

Gambar 3. Model Perpajakan untuk UMKM

Berbeda halnya dengan model presumptive regime, pada model ini pajak penghasilan yang diberlakukan kepada wajib pajak berdasarkan presumsi kondisi tertentu, dimana mayoritas dari wajib pajak tersebut adalah golongan yang sulit untuk membayar pajak secara sukarela yang didukung dengan sumber pembukuan dan pelaporan keuangan perusahaan yang tidak lengkap. Di Negara-negara yang melakukan model presumptive regime pemerintah sulit membuat standar untuk pengenaan jumlah pajak bagi wajib pajak. karena sebagian besar wajib pajak Negara tersebut tidak memiliki informasi laporan keuangan yang transparan. Biasanya pemerintah melakukan perkiraan atau presumsi atas nilai minimum pendapatan yang presisi untuk dijadikan dasar pengenaan pajak. Sebagian besar Negara-negara non anggota OECD yang menerapkan model presumptive regime ini.

Pada beberapa Negara yang menerapkan regime presumsi, umumnya pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah kepatuhan pajak bagi wajib pajak dan mendorong system pembukuan yang lebih transparan dalam pelaporan keuangan perusahaan yang akan digunakan untuk basis penghasilan kena pajak (Engelschak, M. & Loerick, J : 2009).

Sebelum berlakunya PP nomor 23 tahun 2018 , Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*standard regime-simplified/reduced rate*). Kemudahan ini diberikan untuk wajib dalam bentuk Pajak Orang Pribadi, sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Wajib pajak orang pribadi yang mendirikan usaha dan pekerjaan bebas yang jumlah omzetnya selama satu tahun periode kalender kurang dari Rp 4.800.000.000 , diperbolehkan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menghitung jumlah PKP nya. Sedangkan pengurangan tariff juga diberikan bagi wajib pajak badan, seperti tercantun dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31 E di sebutkan bahwa wajib pajak yang berada di dalam negeri dengan jumlah peredaran bruto atau nilai omzet dalam satu tahun berjalan sampai dengan batas Rp. 50 Miliar mendapat potongan tariff sebesar 50 % artinya jika tariff yang berlaku adalah 25 %, wajib pajak badan yang menerima fasilitas ini hanya membayar utang pajak dengan tariff sebesar 12,5 % dari tariff normal PPh yang dikenakan atas PKP dari bagian nilai peredaran bruto sampai dengan nilai Rp. 4,8 Miliar.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana menurut *Kerlinger* dalam Sugiyono (2008:7) menegaskan bahwa "Penelitian dalam populasi yang besar maupun kecil dengan sejumlah data dari sampel yang dianggap mewakili dari jumlah populasi kemudian ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan keterkaitan antar variabel sosiologis dan psikologis dalam sampel tersebut. Populasi yang diambil dalam riset ini yaitu seluruh UMKM yang terdapat di Kota Depok yang menjadi binaan ZAF internasional mulai dari ZAF berdiri sampai tahun 2019. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1 pelaku UMKM yang menjadi binaan ZAF Internasional selama tahun 2018, jumlah sampel yang di ambil hanya 1 dengan pertimbangan sebagai berikut: 1). Laporan keuangan yang dibutuhkan dalam riset merupakan data rahasia yang tidak dapat dipublish secara bebas, 2). Penelitian ini merupakan study kasus dengan pendekatan kualitatif, 3). Sifat dan karakter UMKM relative homogeny untuk proses pelaporan pajak penghasilan Badan

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah: 1).Mengklasifikasikan data berdasarkan pelaporan pajak terhutang untuk UMKM PT SKY, yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan kuesioner. 2). Mengidentifikasi factor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak UMKM berjalan baik sebelum PP no 23 tahun 2018, 3). Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam penerapan *kepatuhan pajak* PP No 23 tahun 2018, 4). Mengolah data dan membuat kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini merupakan salah satu UMKM binaan ZAF consulting yaitu PT SKY yang merupakan kepanjangan dari PT Said Krama Yudha. PT. Said Krama Yudha adalah perusahaan dalam bidang perdagangan yang beralamat di Graha Krama Yudha, Lantai 4 Jalan WarungJati Barat No. 34 Kalibata - Pancoran Jakarta Selatan. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 2. Responden Penelitian PT SKY

NIK	Nama Karyawan	Jabatan	Department
015.03.001	RIZKI MAULANA SAID	Direktur	Board of Director
015.03.002	ALI RASUAN SAID	Direksi Keuangan	Board of Director
015.03.003	TERRY MOHAMAD FATH	Direksi Umum	Board of Director
015.03.004	ABDUL RACHMAN SAID	Direksi Operasional	Board of Director

Responden dalam penelitian kualitatif merupakan *key person* yang di wawancarai untuk mendapatkan data-data primer penelitian. Responden penelitian ini adalah bagian utama dalam perusahaan, yang terdiri dari direktur, direktur keuangan, direktur umum dan direktur operasional. Key person utama dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari direktur keuangan.

Hal utama yang harus diketahui pada saat akan melakukan perhitungan laporan pajak dengan menggunakan aturan PP nomor 23 tahun 2018 adalah mengetahui perhitungan penghasilan netto fiskal perusahaan yang diperoleh dari menjumlahkan seluruh penghasilan netto komersil di dalam negeri dengan seluruh penghasilan netto komersil di luar negeri kemudian dikurangi dengan penghasilan yang dikenakan PPh final yang bukan merupakan objek pajak. Hasil perhitungan tersebut kemudian dilakukan proses penyesuaian sejumlah biaya dan penghasilan yang boleh di kurangkan atau sejumlah penghasilan dan beban yang tidak boleh di kurangkan. Proses ini dinamakan dengan rekonsiliasi fiskal, seluruh rangkaian rekonsiliasi fiskal akan menimbulkan koreksi positif dan koreksi negative, angka-angka dari hasil koreksi positif harus dijumlahkan dengan penghasilan netto komersil yang diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri, sedangkan hasil dari penjumlahan dan penyesuaian negatif di kurangkan dari seluruh aspek penghasilan sebelum dikurangi dengan fasilitas penanaman modal pengurang penghasilan netto.

Data laporan perhitungan Harga Pokok Barang dengan beberapa penghasilan yang diperoleh dari usaha untuk PT SKY adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Perhitungan Harga Pokok Penjualan PT SKY

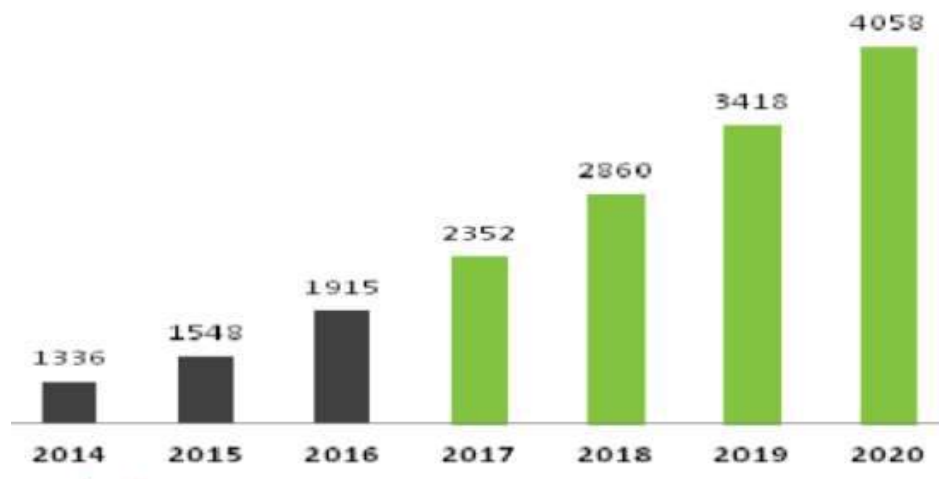
NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	31.957.705.888	428.496.475
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	2.741.345.594
3.	BIAYA TRANSPORTASI	54.839.574	0
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0
5.	BIAYA SEWA	0	354.033.439
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	879.108.800	128.100.000
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	1.491.796.047	0
11.	BIAYA LAINNYA	338.988.271	83.453.850
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)	514.407.691	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		34.208.030.887	3.735.429.358

PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan subjek pajak PT SKY merupakan subjek pajak badan dalam negeri, karena PT SKY berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan data yang tertera di tabel 5.2 tentang Perhitungan Penghasilan Netto PT Sky jumlah peredaran bruto PT SKY adalah 42,2 Miliar artinya masih dibawah 50 Miliar sehingga PT SKY di kategorikan sebagai badan yang berbentuk UMKM.

Perusahaan UMKM berperan sangat sentral dalam perekonomian secara nasional, hal ini dibuktikan dengan beberapa temuan di bawah ini :

1. UMKM mendominasi perekonomian
2. Jumlah unit usaha (98,8% dari total unit usaha)
3. Tenaga kerja (96,99% dari total tenaga kerja)
4. Produk Domestik Bruto (60,3% dari PDB)



Gambar 5. Pertumbuhan UMKM tahun 2014 s/d Tahun 2020

Penerapan PPh Final UMKM (PP No.23 Tahun 2018) untuk Wajib Pajak Badan

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak Penghasilan bersifat final. Kriteria untuk wajib pajak dengan peredaran tertentu adalah sebagai berikut: 1). Wajib pajak yang berbentuk badan atau orang pribadi tidak termasuk di dalamnya bentuk usaha tetap. 2). Mendapatkan sejumlah penghasilan dari usaha tersebut, dan tidak termasuk dari penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan jumlah omzet tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak berjalan

Tarif

Tarif untuk pajak penghasilan final sebesar 0,5 % dari peredaran usaha bruto selama satu tahun pajak

Dasar Pengenaan Pajak

DPP atau dasar pengenaan pajak untuk menghitung utang pajak penghasilan yang bersifat final diambil dari total peredaran bruto setiap bulan, sedangkan pajak penghasilan terutang kepada Negara dihitung dari tarif yang dikalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak .

Tujuan diberlakukan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini adalah sebagai perantara bagi wajib pajak Negara Indonesia untuk dapat membuat pembukuan yang transparan

sebelum dikenakan pajak penghasilan dengan rezim yang bersifat umum sehingga menghasilkan outcome yang lebih sukarela dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak

Beberapa opini yang dikeluarkan oleh responden PT SKY untuk pemberlakuan nilai tarif baru 0,5 % untuk UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1). Ikut membantu masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan ekonomi yang bersifat formal melalui kemudahan dan kesederhanaan pada wajib pajak dengan peredaran tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Negara dengan jangka waktu tertentu. 2). Memberikan rasa keadilan kepada sejumlah wajib pajak dengan jumlah peredaran bruto tertentu dengan proses pembukuan yang baik, sehingga wajib pajak di berikan wewenang untuk memilih dikenakan pajak penghasilan dengan tariff umum senilai 25 % berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018, untuk pelaporan pajak PT SKY yang disampaikan melalui SPT Tahunan bulan April , 2019, belum sepenuhnya menggunakan tarif berdasarkan PP 23 tahun 2018 senilai 0,5 %. Tariff ini baru digunakan untuk sejumlah peredaran bruto yang dihitung mulai bulan Juli 2018, sedangkan periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 tarif untuk pelaporan pajak badan masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama yaitu sebesar 1 % dari nilai peredaran bruto.

Hasil brain storming dan Fokus Grup Discussion dengan para responden terkait dengan isu pemberlakuan tariff baru senilai 0,5 % berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 5
 Hasil FGD Evaluasi Pemberlakuan PP nomor 23 tahun 2018 dengan PT SKY

No	Isu	Tanggapan	Rekomendasi
1	Keuntungan pemberlakuan aturan baru PP nomor 23 tahun 2018	Keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana	Sosialisasi perhitungan pajak terutang dengan nilai peredaran bruto hanya 6 bulan berjalan
2	Subjek Pajak PP nomor 23 tahun 2018	Wajib Pajak (WP) yang berhak untuk menggunakan tariff final berdasarkan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk koperasi,CV, firma, atau PT yang mendapatkan penghasilan dari usaha dengan total omzet tidak lebih dari Rp.4,8 Miliar dalam satu tahun pajak berjalan termasuk PT SKY	Dasar Pengenaan pajak dihitung lebih efisien dari total laba bersih
3	Peredaran Bruto	total peredaran bruto dalam jangka waktu satu tahun dari total tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasar total peredaran brotu dari usaha, termasuk dari	Peredaran bruto adalah total imbalan berupa uang yang didapatkan atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi dengan total potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau

	cabang	potongan sejenis
4	Jangka Waktu	jangka waktu untuk memanfaatkan tariff final peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 adalah paling lama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk WP yang berbentuk badan berupa koperasi, CV, atau firma paling lama 4 tahun pajak, berbeda dengan WP yang berbentuk perseroan terbatas jangka waktu yang diberikan pemerintah adalah paling lama 3 tahun pajak
5	Tempat Membayar Pajak terutang	PPh terutang bagi WP bisa dibayarkan di kantor pos terdekat atau melalui bank yang telah di tentukan oleh menteri keuangan dengan menggunakan bukti setoran pajak yang telah di validasi dengan NTPN atau nomor transaksi penerimaan Negara. Berbagai kemudahan juga diberikan oleh pemerintah pada saat pelunasan utang pajak, karena fasilitas ATM bisa digunakan sebagai tempat yang syah untuk pembayaran pajak yang terpenting telah di validasi oleh NTPN atau nomor transaksi penerimaan Negara

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berikut ini adalah simpulan dari hasil pengambilan data dilapangan terkait dengan isu pemberlakuan PP nomor 23 tahun 2018 tentang pengurangan tarif 0,5 % untuk wajib pajak badan berbentuk UMKM

1. *Kepatuhan pajak* untuk UMKM PT SKY sebagai binaan ZAF internasional sebelum PP nomor 23 tahun 2018 sangat baik, hal ini ditandai dengan tidak pernah mendapat surat teguran dari DJP berupa STP (Surat Tagihan Pajak) untuk utang pajak badan.
2. *Kepatuhan pajak* untuk UMKM PT SKY binaan ZAF internasional sesudah PP nomor 23 tahun 2018 , tidak jauh berbeda dengan sebelum pemberlakuan PP ini, proses pelaporan SPT dilakukan tepat waktu bulan April 2019 sehingga tidak diberikan denda senilai 2 % dari total utang pajak.

3. Factor-faktor yang menyebabkan *kepatuhan pajak* UMKM PT SKY berjalan baik karena dukungan pemerintah dalam proses sosialisasi keuntungan yang diperoleh UMKM setelah diberlakukan PP ini
4. Kendala yang dihadapi UMKM PT SKY dalam penerapan PP nomor 23 tahun 2018 adalah penentuan jumlah utang pajak badan jika jumlah peredaran bruto yang dihitung hanya 6 bulan selama tahun 2018, karena pemberlakuan PP ini mulai tanggal 1 Juli 2018.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya saran yang di usulkan berdasarkan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperluas objek penelitian, dengan ranah Provinsi DKI Jakarta, mengingat bahwa DKI Jakarta merupakan sentral perekonomian nasional
2. Proses FGD yang dilakukan sebaiknya melibatkan *expert judgment* yang diwakili oleh DJP bagian UMKM
3. Alat uji analisis kepatuhan pajak bisa menggunakan analisis konten model kualitatif

DAFTAR RUJUKAN

- Benjamin, W.P., (1990). Laporan Keuangan (Ikhtisar Akuntansi) Perusahaan Kecil, Dalam, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.
- Republik Indonesia, (1995), Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.
- Richardson, Frederick M., Wright, C. T. (1986). Standards Overload: A Case for Accountant Judgment, *The CPA Journal*; New York.
- Suhairi, (2004), Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage And Performance: A Research On Entrepreneurship Of Indonesia Medium Industries, Disertasi, USM, Malaysia.
- Satyo, (2005). UKM dan Kebutuhan Standar, *Media Akuntansi*, 43(XII), 4.
- Williams, L.K., Chen, R.C., & Tearney, M.G., (1989). Accounting Standards: Overskill for Small Business, *The National Public Accountant*, June, pp 40-43.
- Wishon, K., (1985). The FASB and Small Business: Improving the Dialogue, *Journal of Accountancy*; New York.
- Engelschak, M. & Loepnick, J., (2009). Designing/Reforming Presumptive Tax System, International Finance Corporation-World Bank Group

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN DAMPAKNYA PADA NILAI PERUSAHAAN

Arief Nurhandika, Amir Hamzah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Kuningan, Jawa Barat

Email: **amir.hamzah@uniku.ac.id**

Email: **anurhandika47@gmail.com**

Diterima: November; Direvisi: 2 Desember 2019; dipublikasikan: 21 Desember 2019

ABSTRACT

The Effect of Corporate Governance on Social Responsibility and its Impact on Firm Value. The purpose of this research was to determine the effect of Corporate Governance on Social Responsibility Disclosure, Social Responsibility Disclosure of Firm Value and the indirect effect of Corporate Governance on Firm Value through Social Responsibility Disclosure. This research was conducted at a Coal company listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2013-2018. The samples used were 55 samples. The statistical method used is the path analysis method with panel data regression. The results show that the Independent Board of Commissioners, Foreign Ownership, Public Share Ownership, and the Audit Committee has a positive effect on Social Responsibility Disclosure, Social Responsibility Disclosure has a positive influence on firm value, and the Independent Board of Commissioners, the Audit Committee does not have effect on firm value through disclosure of social responsibility, and Foreign Ownership, Public Ownership have an indirect effect on firm value through social responsibility.

Keywords: *Corporate Governance, Social Responsibility, Firm Value*

ABSTRAK

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan dampaknya pada nilai Perusahaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nilai Perusahaan dan pengaruh tidak langsung Tata Kelola Perusahaan pada Nilai Perusahaan melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Sampel yang digunakan sebanyak 55 sampel. Metode statistik yang digunakan adalah metode analisis jalur dengan regresi panel data. Hasil menunjukkan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Saham Asing, Kepemilikan Saham Publik dan Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan secara langsung Dewan Komisaris Independen, Komite Audit tidak memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial dan Kepemilikan Saham Asing dan Kepemilikan Saham Publik berpengaruh langsung pada nilai perusahaan melalui tanggung jawab sosial.

Kata kunci : Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial, Nilai Perusahaan

PENDAHULUAN

Dunia usaha menuntut perusahaan untuk memperoleh keuntungan sebagai tujuan akhir menjalankan aktivitas usahanya. Semakin banyaknya bermunculan perusahaan- perusahaan yang baru membuat dunia usaha tidak menutup kemungkinan menjadi ajang persaingan yang cukup ketat, sehingga perusahaan perlu memberikan fokus terhadap tata kelola sumber daya perusahaan agar aktivitas yang dilakukannya mampu dilaksanakan secara efisien dan efektif. Tata kelola perusahaan yang baik memberikan dampak positif kepada semua lini aktivitas perusahaan. Dampak yang cukup terdekat adalah kepedulian perusahaan dengan lingkungan sosial sekitar.

Perusahaan sebagai organisasi usaha tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial seperti pegawai yang menuntut kesejahteraan, pengolahan limbah perusahaan dan masalah yang menyangkut lingkungan sekitar perusahaan lainnya. Keterkaitan itu menyebabkan perusahaan dituntut untuk fokus kepada kepedulian lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas yang dikeluarkannya berupa laporan tanggung jawab sosial. Menurut (Tommy, Utary, & Oktavianti, 2015) faktanya perusahaan di Indonesia khususnya di sektor tambang yang setiap aktifitasnya tidak jauh dari keadaan lingkungan hidup masih belum fokus untuk peduli terhadap lingkungan sekitar atau kurang dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dewi & Widagdo(2012) menyatakan bahwa perusahaan memiliki keterikatan dengan masyarakat sekitar sebagai satu lingkungan sosial yang menuntut untuk terpenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dibutuhkan penatakelolaan perusahaan yang baik. Menurut Maryanti & Fithri(2017) tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan mampu memberikan peningkatan terhadap semua lini aktivitas perusahaan dan pandangan yang baik dari masyarakat.

Seiringnya waktu perusahaan mulai menyadari bahwa perlu adanya perubahan strategi bisnis yang dulu berfokus dalam mencari laba sebanyak mungkin akan tetapi sekarang perusahaan harus memberikan manfaat yang riil terhadap lingkungan karena setiap perusahaan menjalankan aktifitasnya akan bersinggungan dengan masyarakat sekitar.

Ketersediaan informasi yang cukup pada laporan keuangan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan karena dorongan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi-informasi tersebut. Menurut Dewi & Sitinjak(2019) keputusan investasi para investor akan berubah jika informasi-informasi yang diberikan perusahaan dapat mudah dimengerti.

Menurut Maryanti & Fithri (2017) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terutama investor meningkat saat perusahaan tersebut memperhatikan lingkungan sosial. Investor semakin meningkat kepercayaannya kepada perusahaan yang diikuti dengan meningkatnya likuiditas saham perusahaan (Jiambalvo, 1996) dan biaya modal mengalami penurunan (Botosan, 1997). Maka dapat diharapkan berdampak terhadap nilai perusahaan (Titi, Sabar, & Sixpria Nedsal, 2011).

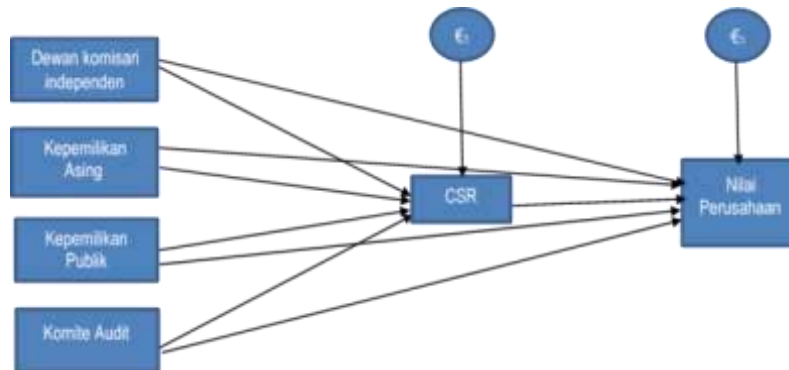
Definsi pengungkapan adalah suatu unsur dari mekanisme transparansi terhadap informasi yang dikeluarkan dan tidak dirahasiakan. Menurut Suwardjono (2005)ada dua tujuan diadakannya pengungkapan antara lain: 1. Dipandang mampu memberikan dan menyajikan transparansi informasi sehingga tujuan yang diperoleh dalam pelaporan keuangan dapat tercapai, 2.Memberikan pelayanan kepada beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lain.Pengungkapan yang ada pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu informasi berbentuk laporan yang ditujukan kepada stakeholder dengan tujuan agar terwujudnya transparansi dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan khususnya aktifitas lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nilai Perusahaan dan pengaruh tidak langsung Tata Kelola Perusahaan pada Nilai Perusahaan melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari segi teoritis dan aplikatif. Manfaat teoritis penelitian ini adalah mampu memberikan bukti secara empiris dan metodologi bagi akademisi dan peneliti lainnya. Manfaat implementasi dari penelitian ini adalah mampu memberikan manfaat pada ilmu pengetahuan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang mampu memberikan manfaat bagi manajemen akan pentingnya investasi jangka panjang bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kajian Teori

1. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di perusahaan antara para peinsipal dengan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi memiliki sebuah pandangan yang disebut dengan *nexus of contract* atau disebut dengan komitmen antara perusahaan dengan stakeholder dengan sebuah kontrak yang mengikat kedua belah pihak (Rustiarini, 2011).
2. Teori legitimasi merupakan teori yang mendasari organisasi usaha untuk memberikan informasi tanggung jawab sosial perusahaan secara sukarela (Lu & Abeysekera, 2014). Menurut (Suchman, 1995) legitimasi adalah sebuah asumsi umum dalam suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dapat dikatakan layak dan tidak jauh dari norma-norma yang ada di masyarakat.
3. Teori *stakeholder* merupakan teori yang berasumsi segala kegiatan yang dilakukan perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Menurut Lindawati & Puspita (2015) Teori *stakeholder* merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa keberlangsungan suatu organisasi usaha tidak terlepas dari ikut campurnya peran dari para *stakeholder*.
4. Dewan komisaris Independen merupakan unsur yang ada didalam perusahaan dan memiliki tugas dalam pengontrolan serta pengawasan terhadap aktifitas perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Sedangkan komisaris independen diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam bersikap netral terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para direksi. Pasal 20 pada aturan Otoritas Jasa Keuangan bernomor 33/POJK 04/2014 menerangkan banyaknya komisaris independen pada perusahaan publik.
5. Kepemilikan Asing adalah penguasaan saham di perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau perseroan terbatas asing dengan ketentuan sesuai aturan hukum yang berlaku. Wirawan (2013) menyatakan bahwa pemilik asing adalah komponen karakteristik tata kelola perusahaan yang mampu berpengaruh pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
6. Kepemilikan Publik adalah kepemilikan yang dimiliki oleh individu atau institusi dengan kepemilikan saham dibawah lima persen yang tidak memiliki afiliasi dengan manajemen atau perusahaan (Rozak, 2012). Menurut Badjuri (2011) perusahaan dengan kepemilikan saham publik menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki kredibilitas yang baik dimata investor luas dalam memberikan kepastian mengenai pembagian keuntungan kepada investor secara layak dan berlanjut terus menerus sehingga dapat dikatakan perusahaan tersebut akan cenderung memiliki fokus terhadap mengungkapkan kegiatan sosialnya.
7. Komite Audit Berdasarkan keputusan yang termuat dalam surat edaran ketua Otoritas Jasa Keuangan No kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa satuan komite audit merupakan satuan yang disusun oleh dewan komisaris perusahaan bertujuan untuk menjadi pelaksana fungsi dalam memberikan informasi bagi dewan komisaris. Keberadaan komite audit mampu diterima sebagai salah satu unsur dalam tercapainya kinerja tata kelola perusahaan. Bahkan adanya komite audit yang efektif mampu melaksanakan salah satu aspek dalam memberikan penilaian pelaksanaan Tata kelola perusahaan dengan baik



Hipotesis

- H1** : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan
- H2** : Kepemilikan saham Asing berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan
- H3** : Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan
- H4** : Komite audit berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan
- H5** : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan
- H6** : Kepemilikan saham Asing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H7** : Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H8** : Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H9** : tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H10** : terdapat pengaruh antara dewan komisaris dan nilai perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan
- H11** : terdapat pengaruh antara Kepemilikan saham asing dan nilai perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan
- H12** : terdapat pengaruh antara Kepemilikan saham publik dan nilai perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan
- H13** : terdapat pengaruh antara komite audit dan nilai perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 7 perusahaan dengan 55 perusahaan. Variabel penelitian yang digunakan dewan komisaris independen, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, komite audit, pengungkapan tanggung jawab sosial, nilai perusahaan. Penelitian ini menggambarkan pola hubungan yang mengungkapkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel lain. Pola hubungan yang semacam ini dapat dianalisis dengan *Path analysis*, dengan rancangan model sebagai berikut :

Sub-Struktural I (Hubungan $X_1, X_2, X_3,$ dan X_4 terhadap Y)

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (1)$$

Sub-Struktural II (Hubungan X_1, X_2, X_3, X_4, Y terhadap Z)

$$Z = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + Y + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (2)$$

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu $\alpha = 5\%$ dengan kriteria pengujian sebagai berikut

: H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil pengujian melalui Uji Asumsi Klasik sudah memenuhi, Pemilihan Model dari kedua sub-struktural pada *common effect* dan Regresi Panel Data, adapun hasil sebagai berikut :

Sub-Struktural I (Hubungan $X_1, X_2, X_3,$ dan X_4 terhadap Y)

Tabel 1. Hasil Estimasi *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0.592120	0.032901	6.296537	0.0000
DKI	0.192100	0.109213	3.290122	0.0000
KA	0.258101	0.049121	2.981211	0.0000
KSP	0.210211	0.042901	2.421334	0.0009
KAU	0.313243	0.034912	2.690153	0.0003

Sumber : *Output Eviews 9.0*

Sub-Struktural II (Hubungan X_1, X_2, X_3, X_4, Y terhadap Z)

Tabel 2. Hasil Estimasi *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0.476912	0.038121	8.542121	0.0000
DKI	0.609121	0.391210	0.992121	0.3796
KA	0.301230	0.056341	3.872131	0.0013
KSP	0.167129	0.020123	3.498235	0.0003
KAU	0.365101	0.044981	0.769321	0.6213
CSR	0.501128	0.058120	3.609712	0.0006

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Tabel 3. Hasil Ringkasan Koefisien Jalur Pengaruh Langsung

Regresi	Koefisien Reg	Std Error	Prob	Keterangan
DKI --- CSR	0.192100	0.109213	0.0000	Signifikan
KA --- CSR	0.258101	0.049121	0.0000	Signifikan
KSP --- CSR	0.210211	0.042901	0.0009	Signifikan
KAU --- CSR	0.313243	0.034912	0.0003	Signifikan
DKI --- NP	0.609121	0.391210	0.3796	Tidak Signifikan
KA --- NP	0.301230	0.056341	0.0013	Signifikan
KSP --- NP	0.167129	0.020123	0.0003	Signifikan
KAU --- NP	0.365101	0.044981	0.6213	Tidak Signifikan
CSR --- NP	0.501128	0.058120	0.0006	Signifikan

Sumber : *Output Eviews 9.0*

Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan ini mendukung teori stakeholder yang menyatakan dewan komisaris cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara jelas kepada para pemangku kepentingan salah satunya informasi dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan tersebut menandakan bahwa perusahaan telah menjalankan peraturan otoritas jasa keuangan bernomor 33/POJK 04/2014 yang mengatur banyaknya dewan komisaris khususnya dewan komisaris independen sebagai penyeimbang pada setiap keputusan perusahaan. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian (Álvarez & Zubeltzu, 2017; Isa & Muhammad, 2014).

Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa kepemilikan saham asing memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa kepemilikan saham asing mampu menjadi suatu pengawas terhadap proses aktivitas perusahaan yang berjalan sehingga para manajemen mendapatkan informasi yang cukup baik untuk dilaporkan kepada para stakeholder. Secara umum dari hasil tersebut dapat dilihat kepemilikan saham asing dapat turut andil dalam isu-isu sosial yang ada di Indonesia. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Dewi & Suaryana, 2015; Julia, 2017; Rustiarini, 2011).

Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa kepemilikan saham publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan tersebut mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh publik akan memberikan dampak yang besar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Entitas usaha dengan kepemilikan saham publik memiliki kepercayaan yang besar dari publik sendiri sehingga entitas tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kepercayaan dengan aktif dalam mengungkapkan kegiatannya salah satunya lingkungan sosial. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Ayu & Harta, 2013; Rahayu & Anisyukurlillah, 2015).

Komite audit berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan tersebut mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa komite audit yang dibentuk oleh perusahaan sebagai unsur yang dapat sebagai penghubung antara manajemen dan para stakeholder perusahaan baik dalam maupun luar perusahaan. Komite audit sangat penting bagi perusahaan dalam sistem pengawasan yang ada di perusahaan dengan semakin banyaknya intensitas rapat komite audit memberikan dampak yang positif terhadap segala bentuk pengawasan aktifitas perusahaan, salah satunya adalah aktifitas dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Laksmi & Kamila, 2018; Suryono & Prastiwi, 2011; Tommy et al., 2015).

Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dewan komisaris tidak efektif dalam meningkatkan nilai perusahaan, kemungkinan yang terjadi dilapangan adalah dewan komisaris masih sedikit sehingga ketidakefektifan tersebut terjadi. Padahal menurut Titi et al., (2011) entitas usaha yang memiliki komisaris independen dengan kuantitas banyak akan berdampak pada kinerja yang bagus salah satunya nilai perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Siallagan & Machfoedz, 2006).

Kepemilikan saham Asing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa kepemilikan saham asing memiliki pengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mendukung Teori stakeholder yang mengartikan bahwa entitas usaha adalah satu kesatuan organisasi yang saling terhubung dengan kepentingan para stakeholder. Temuan tersebut mengindikasikan para pemegang saham asing sangat nyaman untuk berinvestasi dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengaruh terhadap keaikan nilai perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Sujoko (2017).

Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa kepemilikan saham publik memiliki pengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan. Artinya ketika saham perusahaan yang dimiliki oleh publik maka perusahaan akan dituntut untuk meningkatkan kinerja perusahaannya baik secara kinerja sosial maupun keuangan, sehingga perusahaan harus meningkatkan citra dengan melakukan peningkatan dalam segala aktivitasnya dan akan berdampak pada nilai perusahaan tersebut semakin meningkat. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Adnantara, 2014).

Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan. Temuan tersebut tidak mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa komite audit merupakan unsur yang mampu menyelesaikan masalah-masalah agensi yang ada di perusahaan. Menurut Hamzah (2016) unsur komite audit yang berasal dari luar dapat melindungi kepentingan-kepentingan para pemegang saham sehingga meminimalisir kecurangan yang ada. Posisi komite audit merupakan unsur dari pembentukan laporan keuangan sehingga memiliki dampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Handayani, 2017; Rupilu, 2011).

Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Hasil statistik yang diperoleh menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan tersebut mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa suatu keadaan suatu system nilai perusahaan sama dengan system sosial yang berdampak kepercayaan para investor karena perusahaan telah melakukan aktivitas sosial sehingga mendapatkan legitimasinya di masyarakat sekitar. Temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa para investor bahwa para investor memberika respon yang positif bagi perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan nilai investasi yang mengakibatkan nilai perusahaan semakin meningkat pula. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari (Adnantara, 2014).

Terdapat pengaruh tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan pada nilai perusahaan

Berdasarkan hasil statistik analisis jalur, dapat dilihat terdapat pengaruh tidak langsung variabel tata kelola perusahaan yaitu dewan komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan artinya hal ini menunjukkan bahwa variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak mampu memediasi nilai perusahaan. Sedangkan terdapat pengaruh langsung untuk variabel tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan asing dan kepemilikan publik terhadap nilai perusahaan, artinya hal ini menunjukkan bahwa variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mampu memediasi nilai perusahaan.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Saham Asing, Kepemilikan Saham Publik dan Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan secara langsung Dewan Komisaris Independen, Komite Audit memiliki pengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, dan Kepemilikan Saham Asing dan Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh tidak langsung pada nilai perusahaan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial. Implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan perusahaan sektor pertambangan batu bara diharapkan mampu memberikan fokus terhadap isu lingkungan dan sosial. Pada pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, peneliti berharap penelitian mendatang juga menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terindeks di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnantara, K. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Dan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 107–113.
- Álvarez, I., & Zubeltzu, E. (2017). Firms' Board Independence and Corporate Social Performance: A Meta-Analysis. *Sustainability*, 9(6), 1006.
- Ayu, G., Wiwik, P., Putu, N., & Harta, S. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(2), 326–344.
- Badjuri, A. (2011). Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Coorporate Governance, Pengungkapan Coorporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktru dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 38–54.
- Botosan, C. A. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. *Accounting Review*, 72(3), 323–349.
- Dewi, N. P. M. S., & Suaryana, I. G. N. A. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 84–98.
- Dewi, R. K., & Widagdo, B. (2012). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia). *Keberlanjutan*, 2(1), 498.
- Dewi, R. R., & Sitingjak, M. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Earning Response Coeficient Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai

- Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 149.
- Hamzah, A. (2016). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(2).
- Handayani, B. D. (2017). Mekanisme Corporate Governance, Enterprise Risk Management, Dan Nilai Perusahaan Perbankan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(1), 70–81.
- Isa, M. A., & Muhammad, S. (2014). The Impact of Board Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Nigerian Food Product Firms. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 1(12), 34–45.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jiambalvo, J. (1996). Discussion of “causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC.” *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 37–47.
- Julia, J. (2017). pengaruh Struktur Kepemilikan, Pelanggan Dan Slack Organisasi Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perbankan Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013–2015). *Accountthink*, 2(02), 349–361.
- Laksmi, A. C., & Kamila, Z. (2018). The Effect of Good Corporate Governance and Earnings Management to Corporate SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1–16.
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 157–174.
- Lu, Y., & Abeysekera, I. (2014). Stakeholders’ power, corporate characteristics, and social and environmental disclosure: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 64, 426–436.
- Maryanti, E., & Fithri, W. N. (2017). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan. *Journal of Accounting Science*, 1(1), 21.
- Rahayu, P., & Anisyukurlillah, I. (2015). Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas Dan Media Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–9.
- Rozak, A. (2012). Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Oleh Publik, Leverage Dan Kelompok Industri Terhadap Tingkat Internet Financial Reporting (IFR). 6(2), 101–112.
- Rupilu, W. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis, Dan Sektor Publik*, 8(1), 101–127.
- Rustiarini, N. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–24.
- Saputra, M. (2010). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA, JAKARTA. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4(1), 81–92.
- Suchman, M. C. (1995). and Strategic Managing Legitimacy : Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Suryono, H., & Prastiwi, A. (2011). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (SR): Studi pada Perusahaan-Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2009. *Symposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 21–22.

- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan* (3, ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Titi, S., Sabar, W., & Sixpria Nedsal. (2011). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Praktik Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 95–105.
- Tommy, Y. V., Utary, A. R., & Oktavianti, B. (2015). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi*, (c), 427–436.
- Wirawan, N. B. (2013). Karakteristik GCG terhadap pengungkapan TSP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. *Jurnal Profita*, 45(05), 180–200.

ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus BPJS Kesehatan di Kawasan Industri Cikarang)

Hanifah Azwar

Universitas Indraprasta PGRI
Email: hanifahazwar78@yahoo.com

Diterima: 10 Oktober; Direvisi: 21 Desember 2019; dipublikasikan: 28 Desember 2019

ABSTRACT

This study aims to analyze public satisfaction with public services (BPJS Health case studies in the Cikarang Industrial Area) in term of internal and external aspects so BPJS Health Care's performance and service can be seen to provide the satisfaction for customers. The external aspects analysis including the dimensions of rate new customer acquisition, customer acquisition, responding customer complaint, customer satisfaction and customer benefit. The analysis of the internal aspects including the dimensions of innovation, operation and after sales service. The Methode of this research is mixed method. Data collection techniques used in this research is quantitative and qualitative type with the descriptive design. The result of the study is, still there are the indicators of satisfaction which still delivery below expectations, indicated by the gap between customer expectations with services perceived. There are still a shortcomings perceived, especially in the service delivery in the process of services performance of National Social and Healthcare Security (BPJS) that has been run. The advice is the improvement of the service performance attributes that are still perceived below expectations, as well as the increased service performance in providing inpatient, medical personnel and human resources.

Keywords: *Community Satisfaction, Public Service, BPJS Health Care.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (studi kasus BPJS Kesehatan di Kawasan Industri Cikarang) dilihat dari *aspek internal* dan *aspek eksternal* sehingga dapat diketahui sejauh mana pelayanan publik terkait BPJS Kesehatan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Analisis Aspek eksternal meliputi dimensi tingkat perolehan pelanggan baru, akuisisi pelanggan, merespon keluhan pelanggan, kepuasan pelanggan dan manfaat pelanggan. Adapun analisis aspek internal meliputi dimensi inovasi, operasi dan layanan purna jual. Metode penelitian ini adalah *mixed method*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa masih ada indikator kepuasan pelanggan yang masih dibawah harapan, dilihat dari kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang dirasakan. Dalam kinerja pelayanan BPJS Kesehatan, masih ada kekurangan yang dirasakan pelanggan terutama dalam pemberian pelayanan. Saran yang diberikan adalah perbaikan atribut kinerja pelayanan yang masih dipersepsikan dibawah harapan, serta peningkatan kinerja pelayanan dalam penyediaan ruang rawat inap, tenaga medis dan SDM yang menangani pasien.

Kata kunci : *Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, BPJS Kesehatan.*

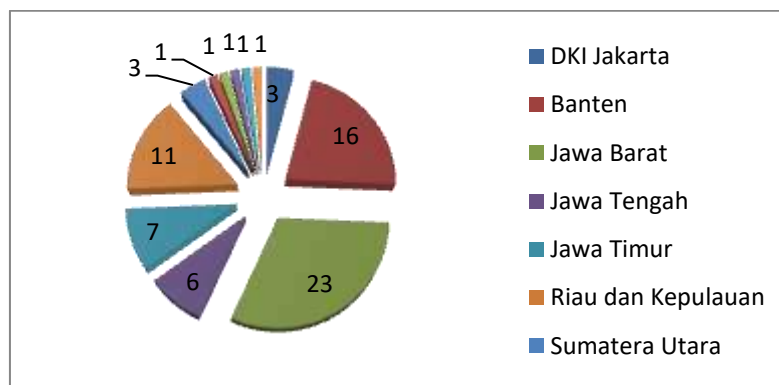
PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya.

Masyarakat memegang peranan yang signifikan dalam pembangunan bangsa. Menurut badan statistik (BPS) jumlah tenaga kerja di Indonesia pada february 2013 mencapai 121,2 juta orang hal ini menandakan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu 120,41 juta. Terdapat beberapa sektor persebaran tenaga kerja di Indonesia, antara lain pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan industri.

Hasil survei tahun 2013 oleh Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah industri terbanyak dan terbesar di Indonesia. Dari 74 kawasan industri yang tersebar di Indonesia, sebanyak 23 diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Barat. Karenanya, Jawa Barat menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) ketiga terbesar mencapai 14,07 persen setelah Jakarta sebesar 16,40 persen dan Jawa Timur sebesar 14,88 persen.

Gambar 1. Diagram Persebaran Kawasan Industri Nasional



Sumber: Kementerian Perindustrian

Bekasi adalah wilayah industri terbesar yang memiliki beberapa kawasan industri raksasa. Menurut Data Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi (2013), kawasan industri terbesar di kabupaten bekasi yaitu kawasan Industri Cikarang, dimana terdapat kawasan industri bernama PT. Jababeka Tbk yang berdiri sejak tahun 1989. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat banyak masyarakat produktif di kawasan ini, oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kawasan industri cikarang.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.

Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi. Program

pemerintah Indonesia dalam menunjang kesehatan masyarakatnya yaitu dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), merupakan usaha pemerintah dalam memberikan suatu bentuk jaminan sosial sebagai tanda besarnya perhatian pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kabupaten Bekasi, pada tahun 2016 terdapat 666 perusahaan di kawasan industri Cikarang. Hingga saat ini, baru 200 (30%) perusahaan yang terdaftar menjadi pengguna BPJS Kesehatan, sedangkan 466 (70%) perusahaan lainnya belum terdaftar menjadi pengguna BPJS Kesehatan. Hal ini menandakan masih kurangnya kepatuhan pemilik usaha terhadap undang-undang yang mewajibkan semua pemilik usaha mendaftarkan pekerjanya sebagai pengguna BPJS Kesehatan.

Pasal 6 ayat (3) Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, menegaskan bahwa pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran keanggotaan jaminan kesehatan kepada pekerjanya dan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku pada perpres. Jika tidak mengikutsertakan karyawannya menjadi pengguna BPJS kesehatan, maka pihak perusahaan akan mendapat sanksi administrasi.

Kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa merupakan salah satu indikator yang dapat menilai mutu pelayanan publik terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kepuasan yang tinggi akan menunjukkan keberhasilan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (studi kasus BPJS kesehatan di kawasan industri cikarang)”

Konsep Pelayanan Publik

Konsep pelayanan atau *service* telah didefinisikan oleh banyak pakar. Davidow dalam Eko Prasajo (2006:17) berpendapat mengenai pelayanan, “*service is those thing which when added to a product, increase its utility or value to the customer*”. Pendapat ini mengemukakan pelayanan adalah berbagai kegiatan yang jika diterapkan terhadap suatu produk akan meningkatkan daya atau nilai terhadap pelanggan. A.S. Moenir (2002:26-27) memaparkan bahwa pelayanan merupakan “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna”.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu mengurus atau menyiapkan apa yang diperlukan oleh orang lain. Widodo (2001:14) mengemukakan beberapa kriteria pelayanan publik yang baik adalah sebagai berikut: (1) Efektif; (2) Sederhana; (3) Kejelasan dan kepastian (transparan); (4) Keterbukaan; (5) Efisiensi; (6) Ketepatan waktu; (7) Responsif; (8) Adaptif.

Konsep Kepuasan Pelanggan

Menurut Kotler (2002) kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja pelayanan. Jika berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas, tetapi jika kinerja melebihi harapan pelanggan amat puas dan senang. Menurut Bitner dan Zeithaml (2003) kepuasan pelanggan adalah evaluasi pelanggan dari produk atau layanan dalam hal apakah produk itu atau layanan itu telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.

Amstrong (1994:46) menyatakan bahwa kinerja pelayanan menyangkut penyelesaian pekerjaan dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dengan mengerahkan segala kemampuan yaitu keterampilan, ilmu pengetahuan dan keahlian. Menurut Kaplan R.S. dan Norton DP (1996: 68), dimensi kinerja pelayanan dalam aspek internal, meliputi ; (1) Tingkat Perolehan Pengguna baru/ Anggota BPJS Kesehatan; (2) Akuisisi Pengguna (Kemampuan Mempertahankan Pengguna Lama); (3) Merespon Keluhan Pengguna; (4)Kepuasan Pengguna; dan (5) Manfaat Pengguna. Adapun dimensi aspek eksternal meliputi ; (1) Inovasi : Kemampuan menganalisa dan memenuhi kebutuhan Pengguna; (2) Operasi: Proses, prosedur, dan biaya BPJS kesehatan; (3) Layanan Purna Jual:Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat serta tanggap.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methode*. Dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terkait BPJS Kesehatan, dengan memberikan kuisioner terhadap masyarakat yang menjadi peserta BPJS kesehatan. Dalam menentukan populasi, menggunakan teknik sampling. Sementara untuk menggambarkan aspek internal BPJS Kesehatan di kawasan industri Cikarang digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada aspek internal dan aspek eksternal kinerja pelayanan BPJS kesehatan di kawasan industri Cikarang. Lokasi penelitian adalah di wilayah propinsi Jawa Barat, yaitu di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling*. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini jumlahnya cukup besar dan heterogen, maka penarikan sampel selanjutnya yaitu menggunakan teknik *accidental sampling*. Penarikan sampel dilakukan secara kebetulan dari 666 perusahaan di kawasan industri Cikarang dilakukan random menjadi 100 perusahaan. Dari setiap perusahaan ditarik 1 responden secara *accidental sampling* sehingga terkumpul menjadi 100 responden.

Untuk teknik perolehan data kualitatif, peneliti menggunakan sumber data berupa informan yang sengaja dipilih. Dalam penelitian ini informan yang dipilih sebagai sumber data adalah: (1) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bagi tenaga kerja kabupaten bekasi; (2) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten bekasi; (3) Kepala Dinas Kesehatan kabupaten bekasi; (4)Kepala Dinas Tenaga Kerja kabupaten bekasi; (5) Bidang personalia perusahaan kawasan industri Cikarang; (6) instansi-instansi yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan bagi tenaga kerja di kawasan industri Cikarang (rumah sakit dan puskesmas); (7) Pekerja di kawasan industri Cikarang sebagai anggota BPJS kesehatan (pengguna BPJS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Kesesuaian Atribut Kinerja Pelayanan BPJS Kesehatan

Kepuasan pengguna BPJS Kesehatan merupakan persepsi pengguna bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Kepuasan pengguna BPJS terletak pada ekspektasi pengguna terhadap suatu layanan. Jika kinerja pelayanan BPJS Kesehatan yang dirasakan oleh pengguna BPJS sesuai dengan harapan, maka akan tercapainya kepuasan pengguna terhadap BPJS Kesehatan. Sedangkan apabila kinerja pelayanan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan harapan, maka pengguna BPJS akan merasa tidak puas dan kecewa dengan pelayanan yang diberikan.

Tingkat kesesuaian masing-masing atribut diperoleh dari perbandingan antara rata-rata kenyataan dan rata-rata harapan pengguna terhadap kinerja pelayanan BPJS Kesehatan di kawasan industri Cikarang. Peringkat tingkat kesesuaian dapat digunakan instansi untuk mengetahui kepuasan pengguna dalam upaya untuk mempertahankan kinerja pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan kinerja pelayanan BPJS Kesehatan di kawasan industri Cikarang sehingga harapan pengguna dapat terpenuhi. Tabel 1.1 menunjukkan penilaian kepuasan pengguna dilihat dari gap rata-rata kenyataan dan rata-rata harapan terhadap 25 atribut kinerja pelayanan BPJS Kesehatan.

Tabel 1. Tingkat Kesesuaian Atribut Kinerja Pelayanan BPJS Kesehatan

No	Pernyataan	Rata-rata		Gap
		Kenyataan	Harapan	
1	Tempat pendaftaran BPJS Kesehatan dalam keadaan bersih, teratur dan nyaman	3,51	3,98	-0,47
2	Sosialisasi BPJS Kesehatan di kawasan industri Cikarang	3,50	4,19	-0,69
3	Kesigapan pegawai dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti terkait BPJS Kesehatan	3,03	4,09	-1,06
4	Kebersihan, keteraturan dan kenyamanan ruang tunggu BPJS Kesehatan	3,35	4,17	-0,82
5	Ketersediaan pelayanan khusus BPJS Kesehatan di Rumah sakit dan puskesmas	4,15	4,11	0,04
6	Pegawai, dokter dan perawat bersikap ramah dan sopan kepada pasien BPJS Kesehatan	3,31	4,19	-0,88
7	Petugas melayani keluhan pasien terkait pembayaran premi BPJS Kesehatan	3,41	4,01	-0,6
8	Petugas merespon keluhan pasien BPJS Kesehatan dengan cepat	3,61	4,19	-0,58
9	Komunikasi yang terjalin antar pasien BPJS Kesehatan dengan perawat dan dokter	3,87	3,93	-0,06
10	Ketersediaan obat yang efektif dan mencukupi bagi pasien BPJS Kesehatan	3,52	4,25	-0,73
11	Ketersediaan jumlah tenaga medis dan pegawai untuk menangani pasien BPJS Kesehatan	3,22	4,19	-0,97
12	Kelengkapan fasilitas bagi pasien BPJS Kesehatan	3,51	4,22	-0,71
13	Peserta BPJS kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan di RS dan Puskesmas yg bekerjasama dgn BPJS Kesehatan	3,65	4,20	-0,55
14	Peserta BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan biaya yg ringan karena menggunakan sistem asuransi	3,89	3,99	-0,1
15	Rumah sakit dan puskesmas yang melayani peserta BPJS Kesehatan tertata rapi dan nyaman	4,13	4,29	-0,16
16	Dokter dan perawat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien BPJS Kesehatan	3,41	4,29	-0,88

17	Kemampuan dokter dalam melakukan tindakan kepada pasien BPJS Kesehatan	3,51	4,21	-0,7
18	Rumah Sakit memiliki jumlah rawat inap yang mencukupi untuk pasien BPJS Kesehatan	3,1	4,34	-1,24
19	Peserta BPJS kesehatan memahami dan menyanggupi pembayaran premi setiap bulan	3,86	4,18	-0,32
20	Rumah sakit dan puskesmas memiliki papan petunjuk tentang prosedur pelayanan BPJS	4,41	4,31	0,1
21	Peserta BPJS memahami prosedur berobat dan rawat inap menggunakan BPJS Kesehatan	3,70	4,22	-0,52
22	Pelayanan berobat menggunakan BPJS kesehatan	3,50	4,25	-0,75
23	Efisiensi waktu pelayanan	3,67	4,18	-0,51
24	Rasa aman yang diberikan dokter	4,03	4,02	0,01
25	Petugas pelayanan terampil dalam memberikan pelayanan	3,54	4,36	-0,82
Rata-rata		3,79	4,17	-0,38

Sumber data : hasil kuesioner

Pada table 4.35 terlihat bahwa terdapat 22 atribut kinerja pelayanan BPJS Kesehatan yang memiliki nilai gap negatif. Dan terdapat 3 atribut yang memiliki nilai positif. Tingkat kesenjangan yang positif memperlihatkan bahwa Kinerja pelayanan BPJS kesehatan sudah berhasil dilaksanakan dengan baik di kawasan industri Cikarang, sehingga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Adapun kesenjangan negatif memperlihatkan bahwa kinerja pelayanan BPJS kesehatan belum berjalan dengan baik, sehingga harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan

Kepuasan pelanggan BPJS Kesehatan bagi tenaga kerja, dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu dengan melihat gap antara harapan dan kenyataan dengan nilai rata-rata kesenjangan per dimensi sebagai berikut :

Tabel 2. Rata-rata Kesenjangan Per Dimensi

Dimensi	Atribut	Nilai Rata-rata		Kesenjangan /Gap
		Kenyataan	Harapan	
ASPEK EKSTERNAL				
Tingkat Perolehan Pengguna baru	1-3	3,34	4,08	-0,74
Akuisisi Pengguna	4-6	3,60	4,15	-0,55
Merespon Keluhan Pengguna	7-9	3,63	4,04	-0,41
Kepuasan Pengguna	10-12	3,41	4,22	-0,81
Manfaat Pengguna	13-15	3,89	4,16	-0,27
ASPEK INTERNAL				
Inovasi	16-18	3,34	4,28	-0,94
Operasi	19-22	3,86	4,24	-0,38
Layanan Purna Jual	23-25	3,74	4,18	-0,44

Sumber data: Hasil Pengumpulan data di lapangan

Tabel 2 diatas menggambarkan hasil penelitian nilai rata-rata kesenjangan per dimensi. Dimensi dengan nilai rata-rata kesenjangan terendah dalam aspek eksternal yaitu dimensi *kepuasan pengguna* dengan skor -0,81. Sedangkan nilai tertinggi diperoleh dimensi *manfaat pengguna* dengan skor -0,27. Atribut dari dimensi tingkat kepuasan pengguna yang memiliki nilai rata-rata kesenjangan terendah adalah *ketersediaan jumlah tenaga medis dan pegawai untuk menangani pasien BPJS Kesehatan* dengan skor -0,97.

Adapun dalam aspek internal, dimensi dengan nilai rata-rata kesenjangan terendah yaitu dimensi *Inovasi* dengan skor -0,94. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi diperoleh dimensi *operasi* dengan skor -0,38. Atribut dari dimensi inovasi yang memiliki kesenjangan terendah yaitu *rumah Sakit memiliki jumlah rawat inap yang mencukupi untuk pasien BPJS Kesehatan* dengan skor -1,24.

Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (BPJS Kesehatan)

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pengguna merasa belum puas dengan kinerja pelayanan BPJS Kesehatan bagi tenaga kerja di kawasan industri Cikarang sehingga perlu adanya peningkatan kinerja pelayanan. Adapun kinerja pelayanan BPJS Kesehatan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan yaitu keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan, rumah sakit belum memiliki jumlah rawat inap yang mencukupi untuk pasien BPJS Kesehatan, pelayanan dokter dan perawat yang baik terhadap pasien BPJS Kesehatan, pelayanan berobat menggunakan BPJS kesehatan, ketersediaan obat yang efektif dan mencukupi bagi pasien BPJS Kesehatan, pengguna BPJS belum memahami dengan baik terkait prosedur berobat dan rawat inap menggunakan BPJS Kesehatan, kelengkapan fasilitas bagi pasien BPJS Kesehatan, pengguna BPJS kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan di RS dan Puskesmas yg bekerjasama dgn BPJS Kesehatan, ketersediaan jumlah tenaga medis dan pegawai untuk menangani pasien BPJS Kesehatan, pegawai, dokter dan perawat bersikap ramah dan sopan kepada pasien BPJS Kesehatan, kebersihan, keteraturan dan kenyamanan ruang tunggu BPJS Kesehatan, kemampuan dokter dalam melakukan tindakan kepada pasien BPJS Kesehatan, sosialisasi BPJS Kesehatan di kawasan industri Cikarang, petugas merespon keluhan pasien BPJS Kesehatan dengan cepat dan efisiensi waktu pelayanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Aspek Eksternal : pelanggan belum puas dengan pelayanan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan. Tetapi sebagian besar pasien BPJS Kesehatan sudah ditangani dengan baik.
- b. Aspek proses internal (*Process Internal Perspective*): Masih ada kekurangan dalam proses internal BPJS Kesehatan, yaitu kurangnya jumlah ruang rawat inap di Rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, kurangnya jumlah dokter dan SDM yang menangani pasien BPJS, kurangnya keterampilan petugas BPJS dalam memberikan pelayanan, kurangnya ketersediaan kantor BPJS kesehatan yang mencukupi kuota pelanggan di kawasan industri mengakibatkan kurangnya efisiensi waktu pelayanan. Selain itu, kurangnya Sosialisasi BPJS Kesehatan di kawasan industri Cikarang, hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi BPJS Kesehatan di perusahaan sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman tenaga kerja tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan di RS dan puskesmas serta pelayanan kesehatan yang didapat.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis untuk meningkatkan kinerja pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan di kawasan industri Cikarang, yaitu:

1. Disarankan BPJS Kesehatan melakukan pengawasan terhadap instansi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pemberian fasilitas kesehatan di rumah sakit, klinik dan puskesmas.
2. Disarankan kepada BPJS Kesehatan agar memiliki data ruang rawat inap dari masing-masing fasilitas kesehatan tingkat 2 yang bersifat *online*. Hal ini dapat memudahkan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan ruang rawat inap.
3. Disarankan BPJS Kesehatan membuka kantor BPJS Kesehatan di Cikarang.
4. Disarankan kepada *front line* BPJS Kesehatan dapat memberikan sosialisasi yang baik dan jelas kepada peserta BPJS Kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____. (2002). *Pemikir-Pemikir dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Depok : FISIP UI Press
- _____. (1994). *Psikologi, pekerja sosial dan Ilmu pekerja sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alwasilah, A.C. (2002). *Pokok Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT.Dunia Pustaka Jaya
- Armstrong, Michael. (1994). *Manajemen Sumber Daya Manusia: A Handbook Of Human Resource Management*. Jakarta: PT.Elex Mediakomputindo
- Asyhadie, Zaeni. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Jamian Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers
- _____. (2008). *Hukum Kerja; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Azrul, Anwar. (1996). *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan
- Azwar, Azrul. (1994). *Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta
- _____.(1996). *Pengantar Administrasi Kesehatan : Edisi Ketiga*. Jakarta :Binarupa Aksara
- Bessis, Joel.(2002). *Risk Management in Banking 2nd edition*. England: John Wiley & Sons Ltd
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Chriswardhani. (2015). *Evaluasi Implementasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang terikat Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*. Tesis Universitas Diponegoro
- Creswell, John W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method. Third Edition*, Sage publication
- Djumialdji dan Wiwoho Soejono. (1985). *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Jakarta: PT.Bina Aksara
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

- Fajrin, Febri. (2013). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Kota (Jamsesko), Studi Kasus di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan*. Tesis Universitas Gajah Mada (UGM)
- Friedlander, Walter A. (1980). *A Concepts and Methods of Social Work*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs
- Freddy, Rangkuti. (2003). *Measuring Customer Satisfaction, cetakan kedua*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- H. Situmorang, Chazali. (2013). *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan*. Depok :Cinta Indonesia
- Irawan, Prasetya. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Ilyas, Yaslis. (2003). *Mengenal Asuransi Kesehatan : Review Utilitas, Manajemen Klaim,, dan Fraud (Kecurangan Asuransi kesehatan)*. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- Iskandar. (2006). *Menuju kebijakan yang mampu merevitalisasi standart pelayanan yang berkualitas dalam bekerja demi rakyat, meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam kebijakan dan pelayanan publik*, cet 1 jakarta komunal
- J. Supranto. (2001). *Statistik Teori dan Aplikasi, cetakan Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Kaplan, Robert S, Norton, David P.(1996).*The Balanced Scorecard, Translating Strategy into Action*. Boston:Harvard Business Press
- Kartono, Kartini. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kristiadi, J. (1998). *Otonomi Daerah di Indonesia dalam Perspektif Globalisasi, Makalah Seminar Otonomi Daerah Menyongsong Hari Otonomi Daerah*, Jakarta, 16 April
- Keller, Kevin Lane. (2006).*Marketing Management, Manajemen Pemasaran, Penerjemah Benyamin Molan,2007, Jilid I, Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Indeks
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi pelayanan publik*, Yogyakarta : MLA Citation
- Latar, Rahmadaniaty. (2014). *Kesiapan Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tual (Readiness Stakeholders In The Implementation Of The JKN Program In The City Of Tual)*. Jurnal Kebijakan Kesehatan FKM Universitas Hasanuddin
- Levey, Samuel.N. Paul Loomba. (1973). *Health Care Administration:A Managerial Perspective*”. dalam:Azwar, Azrul. (1996). Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: FKUI
- M. Zuhad. (2014). *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Studi Kasus di Puskesmas Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*. Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Sosio e-Kons

- Tulisan merupakan hasil penelitian, pemikiran, atau kajian analitis-kritis di bidang bimbingan dan konseling; ekonomi dan atau pendidikan ekonomi; serta sejarah dan atau pendidikan sejarah. Naskah yang diajukan merupakan hasil karya ilmiah orisinal, belum pernah diterbitkan dan tidak sedang diterbitkan di tempat lain.
- Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sepanjang kurang-lebih 15-18 halaman atau lebih (termasuk gambar dan tabel) dengan ukuran kertas A4 spasi 1^{1/2}, dilengkapi Abstrak (spasi 1) sekitar 150 dengan jumlah kata kunci 3-5 kata atau gabungan kata, jika tulisan dalam Bahasa Indonesia maka abstrak dalam Bahasa Inggris, dan sebaliknya), serta Biodata Penulis (pekerjaan; tempat dan tanggal lahir; pendidikan S-1/S-2/S-3 di mana, lulus tahun berapa, dan apa judul karya tulisnya; buku terakhir yang ditulis; dan alamat kantor/rumah lengkap untuk surat-menyurat).
- Dewan Editor berhak mengadakan penyesuaian format untuk keragaman dan konsistensi terbitan. Semua naskah yang diajukan ke Sosio e-kons akan melalui penilaian oleh mitra bestari dan/atau Dewan Editor. Editor menetapkan keputusan akhir naskah yang diterima untuk diterbitkan. Penulis akan diminta melakukan perbaikan (jika ada) dan mengembalikan revisi naskah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan (April, Agustus dan Desember) ditujukan kepada alamat redaksi *Sosio e-kons*, Wisma Unindra Ruang LPPM Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Nangka No.58 C Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan 12530. Telp. (021) 7818718-78835283 Ext. 123 e-mail: Sosioekons.ips@gmail.com / sosio.ekons@unindra.ac.id.
- Kepastian tentang dimuat atau tidaknya tulisan akan diberitahukan secara tertulis atau lisan. Tulisan yang dimuat, akan mendapat imbalan berupa nomor bukti pemuatan sebanyak 2 (dua) eksemplar. Sedangkan tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

■ Template Sosio e-kons

JUDUL (12pt, bold, centered)

Judul ditulis maksimal 12 kata (bahasa Indonesia), 8 kata (bahasa Jerman), 10 kata (bahasa Inggris): harus mencerminkan isi artikel dan harus menghindari kata-kata “umum” (telaah, analisis, studi, pengaruh, peran); bisa dibuatkan anak judul agar tidak terlalu panjang
(kosong, 1 spasi tunggal, 12 pt)

Nama Penulis (12 pt, bold, centered)

(Penulis Pertama, Penulis Kedua dan atau Penulis Ketiga, 12pt)

Nama Program Studi, Fakultas dan Universitas

(kosong, 1 spasi tunggal, 12 pt)

E-mail : penulis@address.com

(kosong, 2 spasi tunggal, 12 pt)

ABSTRAK (11 pt, bold, centered)

(kosong, 1 spasi tunggal, 11 pt)

untuk naskah dalam bahasa Indonesia, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris (atau sebaliknya) dengan jenis huruf Times New Roman (italic). Abstrak merupakan ringkasan tujuan, isi dan kesimpulan dari naskah yang tidak melebihi dari 150 kata dalam 1 paragraf.

(kosong, 1 spasi tunggal, 11 pt)

Keywords: maksimum 5 kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris (11 pt, italic)

(kosong, 2 spasi tunggal, 11 pt)

PENDAHULUAN (12 pt, bold)

(kosong, 1 spasi tunggal, 11 pt).

Pendahuluan merupakan uraian pokok permasalahan sehubungan dengan penelitian dan sekaligus memuat parameter/metode yang digunakan, serta tujuan penelitian. Pada hakikatnya, pendahuluan adalah argumentasi tentang sesuatu masalah yang teridentifikasi.

(kosong, 1 spasi tunggal, 11 pt)

METODE

(kosong, 1 spasi tunggal, 12 pt)

Berisikan kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, pendirian, atau sikap kita terhadap masalah yang kita bahas

(kosong, 1 spasi tunggal, 11 pt)

HASIL DAN PEMBAHASAN (12 pt, bold)

(kosong, 1 spasi tunggal, 11 pt)

Berisikan kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, pendirian, atau sikap kita terhadap masalah yang kita bahas.

(kosong, 1 spasi tunggal, 11 pt)

SIMPULAN DAN SARAN (11 pt, bold)

(kosong 1 spasi tunggal, 11 pt)

Penutup/simpulan merupakan jawaban hipotesis atau perumusan masalah, yang disusun berdasarkan fakta (bukan yang tersirat), dirumuskan secara ringkas dan cermat, dinyatakan dengan tegas tanpa embel-embel kata “mungkin”, “kiranya”, atau “tampaknya”. Pada hakikatnya, penutup/simpulan mengacu pada populasi atau konteks tertentu yang tidak berlaku secara universal.

Saran, berintikan hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Saran harus logis dan sah, memenuhi segi-segi praksis, serta ditujukan kepada orang, lembaga, atau pihak yang berwenang melaksanakannya.

(kosong 1 spasi tunggal, 11 pt)

DAFTAR RUJUKAN (11 pt, bold)

(kosong 1 spasi tunggal, 11 pt)

Daftar pustaka yang benar-benar dirujuk dalam naskah. Penyusunannya dilakukan berdasarkan abjad dan disesuaikan dengan gaya yang telah dikenal secara umum: APA Style, Gaya Chicago, Gaya Harvard, Gaya Vancouver, Gaya Leicester University, Gaya Monash University atau seperti contoh berikut :

Craton, M. and G. Saunders. (1992). *Islanders in the Stream: A History of the Bohemian People*. Athens: University of Georgia Press.

Herring, G. (1998). *The Beguiled: Misogynist Myth or Feminist Fable? Literature Film Quarterly* 26 (3): 214-219.

Yin, Sandra. 2003. Color bind. *American Demographics* 25, (7): 22-26. Academic Search Premier, via Galileo, <http://www/galileo.usg.edu>.

Lampiran / Ilustrasi / Tabel

(kosong 1 spasi tunggal, 11 pt)

Lampiran/ilustrasi/tabel hanya digunakan jika benar-benar diperlukan, diletakkan sebelum Daftar Acuan/Reference. Lampiran/ilustrasi dibuat dalam format file gambar (*.jpg, *.tif, *.bmp). Jika terdapat lebih dari satu, maka, diurut sesuai penomoran. Persamaan yang ditampilkan diberi nomor sebagai (A.1), (A.2) dan seterusnya.

(kosong 1 spasi tunggal, 11 pt)

TEMPLATE JURNAL SOSIO E-KONS

JUDUL DITULIS DENGAN
FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL
(MAKSIMUM 12 KATA)

Penulis¹⁾, Penulis²⁾ dst. [Font Times New Roman 12 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat]

*¹ Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 1)
email: penulis_1@abc.ac.id*

*² Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 2)
email: penulis_2@cde.ac.id*

Abstract [Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Miring]

Abstract ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan penelitian, metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidak lebih dari 200 kata. (Times New Roman 10, spasi tunggal, dan cetak miring).

Keywords: *Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 10 spasi tunggal, dan cetak miring]*

PENDAHULUAN [Times New Roman 11 bold]

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. [Times New Roman, 11, normal].

METODE

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis. [Times New Roman, 11, normal].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. [Times New Roman, 11, normal].

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. [Times New Roman, 11, normal].

REFERENSI/DAFTAR RUJUKAN

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti Mendeley, Endnote dan lain-lain. [Times New Roman, 11, normal]

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 21/E/KPT/2018, Tanggal 9 Juli 2018
Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2018

Nama Jurnal Ilmiah

Sosio e-Kons
E-ISSN: 2502-5449

Penerbit: Pusat Penelitian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 5

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu
Volume 8 Nomor 1 Tahun 2016 sampai Volume 12 Nomor 2 Tahun 2020

Jakarta, 9 Juli 2018
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan



Dr. Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001



ISSN 2502-5449 (online)



9 772502 544009

ISSN 2085-2266



9 772085 226668